



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12), perlu dijabarkan ke dalam dokumen yang lebih implementatif;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2011 - 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2011 – 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2006 – 2025.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Tahun 2011– 2015.

BAB II SISTEMATIKA RPJM DAERAH TAHUN 2011 – 2015

Pasal 2

Sistematika RPJM Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR
BAB VII	: PENUTUP

Lampiran Matriks RPJM Daerah Tahun 2011 – 2015 (Program dan Kegiatan)

Pasal 3

Isi dan uraian RPJM Daerah Tahun 2011 – 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJM Daerah Tahun 2011 – 2015 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra – SKPD.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2011 – 2015, harus dijabarkan ke dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2005) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2011 – 2015 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 JAN 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 JAN 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 01 TAHUN 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2011 - 2015

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006 -2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 -2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 LANDASAN HUKUM.....	2
1.4 HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN BANTUL DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	10
2.1. KONDISI GEOGRAFIS	10
2.1.1. Wilayah.....	10
2.1.2. Penggunaan Lahan	15
2.2. PEREKONOMIAN DAERAH.....	18
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	18
2.2.2. Investasi	23
2.2.3. Keuangan Daerah	24
2.2.3.1. Pendapatan Daerah	27
2.2.3.2. Belanja Daerah.....	29
2.2.3.3. Pembiayaan Defisit/Surplus	30
2.2.4. Industri, Perdagangan, dan UKM	31
2.2.4.1. Perkembangan industri.....	31
2.2.4.2. Perdagangan.....	33
2.2.4.3. Perkembangan Koperasi dan UKM	36
2.2.5. Pertanian	37
2.2.6. Ketahanan Pangan.....	40
2.2.7. Kehutanan dan Perkebunan	43
2.2.8. Perikanan dan Kelautan	45
2.2.9. Energi dan Sumberdaya Mineral	47
2.2.10. Pariwisata	48
2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH.....	52
2.3.1. Kependudukan	52
2.3.2. Ketenagakerjaan	53
2.3.3. Transmigrasi.....	55
2.3.4. Kesejahteraan Sosial	56
2.3.5. Kesehatan	59
2.3.6. Pendidikan	73
2.3.7. Kebudayaan	77
2.3.8. Pemberdayaan Masyarakat	79

2.3.9. Pemuda dan Olahraga	81
2.3.10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	82
2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH.....	83
2.4.1. Transportasi	83
2.4.2. Sumberdaya Air	87
2.4.3. Air Minum/Air Bersih	88
2.4.4. Air Limbah/Sanitasi	90
2.4.5. Persampahan dan Drainase.....	94
2.4.6. Perumahan dan Permukiman.....	95
2.4.7. Listrik.....	96
2.4.8. Komunikasi dan Informasi	96
2.5. PEMERINTAHAN UMUM	97
2.5.1. Pemerintahan.....	97
2.5.2. Pembentukan Peraturan, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum.....	101
2.5.3. Partisipasi di Bidang Politik	102
2.6. LINGKUNGAN HIDUP	103
2.6.1. Dampak Pemanasan Global	103
2.6.2. Tata Ruang	104
2.6.3. Penanggulangan Bencana	105
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	106
3.1. PEREKONOMIAN DAERAH.....	106
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	106
3.1.2. Investasi	107
3.1.3. Keuangan Daerah	108
3.1.4. Industri, Perdagangan, dan Koperasi.....	109
3.1.5. Pertanian dan Peternakan.....	111
3.1.6. Ketahanan Pangan	113
3.1.7. Kehutanan dan Perkebunan.....	114
3.1.8. Perikanan dan Kelautan	115
3.1.9. Energi dan Sumberdaya Mineral.....	117
3.1.10. Pariwisata.....	118
3.2. SOSIAL BUDAYA DAERAH	120
3.2.1. Kependudukan	120
3.2.2. Ketenagakerjaan	120
3.2.3. Transmigrasi.....	121
3.2.4. Kesejahteraan Sosial	122
3.2.5. Kesehatan	123
3.2.6. Pendidikan.....	125
3.2.7. Kebudayaan	127

3.2.8. Pemberdayaan Masyarakat.....	128
3.2.9. Pemuda dan Olahraga	129
3.2.10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	130
3.3. PRASARANA DAN SARANA DAERAH.....	131
3.2.1 Transportasi	131
3.2.2 Sumberdaya Air	133
3.2.3 Air Minum/Air Bersih	134
3.2.4 Air Limbah/Sanitasi	135
3.2.5 Persampahan.....	136
3.2.6 Perumahan, Permukiman, dan Drainase	137
3.2.7 Listrik.....	138
3.2.8 Komunikasi dan Informasi	139
3.4. PEMERINTAHAN UMUM	140
3.4.1 Pemerintahan.....	140
3.4.2 Pembentukan Peraturan, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum	142
3.4.3 Partisipasi di Bidang Politik	143
3.5 LINGKUNGAN HIDUP	145
3.6 TATA RUANG	146
3.7 PENANGGULANGAN BENCANA.....	147
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	149
4.1. VISI	149
4.2. MISI.....	151
4.3. TUJUAN DAN SASARAN	151
4.3.1. Tujuan MISI 1	151
4.3.2. Tujuan MISI 2.....	152
4.3.3. Tujuan MISI 3.....	154
4.3.4. Tujuan MISI 4.....	156
BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	157
5.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	157
5.1.1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	157
5.1.2. Organisasi Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	158
5.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	160
5.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015	164
5.3. Pengelolaan Belanja Daerah.....	167
5.3.1. Kondisi Belanja Daerah Tahun 2006-2010	168
5.3.2. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	171

5.4. Kebijakan Pembiayaan	176
5.5. Kebijakan Umum Anggaran	179
5.6. Kebijakan Umum Pengelolaan Aset Daerah	180
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR	183
6.1 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Pertama	186
6.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Kedua	193
6.3 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ketiga	202
6.4 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Keempat	221
6.5. Matrik Isian Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan Program, dan Pagu Indikatif RPJMD 2011 – 2015	227
BAB VII PENUTUP.....	243
7.1 Program Transisi.....	244
7.2 Kaidah Pelaksanaan	244
7.2.1. RPJMD Kabupaten Bantul Merupakan Pedoman Bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD.....	245
7.2.2. RPJMD Kabupaten Bantul Digunakan Dalam Penyusunan RKPD	245
7.2.3. Penguatan Peran para Stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJMD	246
7.2.4. Merupakan Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja lima Tahunan dan Tahunan.....	246

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul	10
Tabel 2.	Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah.....	12
Tabel 3.	Intensitas Curah hujan tahun 1999 – 2008	14
Tabel 4.	Jenis dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	17
Tabel 5.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2009	18
Tabel 6.	Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	19
Tabel 7.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	20
Tabel 8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2009 (Persen)	21
Tabel 9.	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	22
Tabel 10.	Koefisien Gini Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	23
Tabel 11.	Perkembangan Investasi Tahun 2005-2009	24
Tabel 12.	Peran Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2009	24
Tabel 13.	Realisasi APBD Tahun 2006-2009 dan Target APBD Tahun 2010 (Rupiah)	26
Tabel 14.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2006-2010	28
Tabel 15.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006 (Rupiah)	29
Tabel 16.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2007-2010 (Rupiah)	29
Tabel 17.	Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Bantul	30
Tabel 18.	Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	31
Tabel 19.	Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	33
Tabel 20.	Lokasi Pasar Kabupaten Tahun 2009	35
Tabel 21.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul.....	36
Tabel 22.	Jumlah dan Anggota Koperasi di Bantul Tahun 2005-2009	37
Tabel 23.	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009.....	39
Tabel 24.	Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	40

Tabel 25. Produksi daging, telur, dan susu di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	40
Tabel 26. Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) Untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	41
Tabel 27. Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	41
Tabel 28. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009.....	42
Tabel 29. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	43
Tabel 30. Luas Rehabilitasi Hutan Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	43
Tabel 31. Hasil Produksi Hutan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	44
Tabel 32. Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas	45
Tabel 33. Kecamatan dan Desa Pesisir.....	46
Tabel 34. Sarana prasarana milik nelayan Kabupaten Bantul Tahun 2009.....	47
Tabel 35. Sebaran Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bantul.....	48
Tabel 36. Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009	50
Tabel 37. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul	51
Tabel 38. Angka Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul	52
Tabel 39. Jumlah dan proporsi Penduduk Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2009.....	54
Tabel 40. Penduduk Berdasar Mata Pencaharian Utama Tahun 2009.....	54
Tabel 41. Jumlah Transmigran dari Bantul	56
Tabel 42. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007 dan 2008.....	57
Tabel 43. Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Tahun 2009	58
Tabel 44. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	58
Tabel 45. Indeks Pemberdayaan Gender	58
Tabel 46. Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	61
Tabel 47. Angka Kesakitan Penyakit Menular di Kabupaten Bantul	62
Tabel 48. Sepuluh Besar Pola PenyakitKasus Rawat Jalan	63
Tabel 49. Sepuluh Besar Pola Kematian Menurut Penyakit Ranap di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2009	64
Tabel 50. Kepesertaan Keluarga Berencana Tahun 2009.....	65
Tabel 51. Status Gizi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	66
Tabel 52. Cakupan Program Perbaikan Gizi Kabupaten Bantul	67
Tabel 53. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab. Bantul Tahun2005 – 2009	68
Tabel 54. Jumlah Pegawai Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009	69
Tabel 55. Anggaran Kesehatan Rutin dan Pembangunan	

Kabupaten Bantul	70
Tabel 56. Kualitas Perumahan, Jamban, dan SPAL di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	71
Tabel 57. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2006/2007 – 2008/2009.....	75
Tabel 58. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2009	76
Tabel 59. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2009.....	77
Tabel 60. Jumlah keluarga miskin Kab. Bantul tahun 2008-2009	81
Tabel 61. Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009.....	71
Tabel 62. Jumlah PTS, Dosen dan Mahasiswa Aktif di Kabupaten Bantul.....	82
Tabel 63. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2009	84
Tabel 64. Trayek Angkutan Umum (Pedesaan/Perbatasan) Yang Masih Beroperasi Tahun 2007 – 2009.....	86
Tabel 65. Jumlah Kendaraan Bermotor	86
Tabel 66. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2009.....	87
Tabel 67. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2009	89
Tabel 68. Jenis usaha industri dan penanganan limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008.....	91
Tabel 69. Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008.....	92
Tabel 70. Ketersediaan Sarana Jamban di Kabupaten Bantul	93
Tabel 71. Jenis dan jumlah sarana persampahan Kabupaten Bantul	95
Tabel 72. Jumlah Kerja Sama di Kabupaten Bantul.....	98
Tabel 73. Produk Hukum Di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	102
Tabel 74. Partisipasi Masyarakat dalam PILEG dan PILPRES 2009di Kabupaten Bantul.....	103
Tabel 75. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2009 dan Target Tahun 2010.....	163
Tabel 76. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.....	166
Tabel 77. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006	169
Tabel 78. Realisasi Belanja APBD Tahun 2007-2009 dan Target Belanja APBD Tahun 2010 Kabupaten Bantul (Rupiah).....	170
Tabel 79. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.....	174
Tabel 80. Komponen APBD Tahun 2011-2015 (Rupiah)	177

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul	51
Grafik 2. Penempatan Transmigrasi dari Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.....	55
Grafik 3. APK di Kabupaten Bantul Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 - 2009.....	74
Grafik 4. APM di Kabupaten Bantul pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009.....	75
Grafik 5. Perkembangan Jumlah KK dan KK Miskin Kab. Bantul Tahun 2004 - 2009	80
Grafik 6. Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.....	88
Grafik 7. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2015 ini merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Tahun 2009-2013.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program

kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program, dan pagu indikatif dalam kurun waktu lima tahun. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Bantul disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
- 2) Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang memberi ruang pada aspek pengurangan risiko bencana, pelestarian lingkungan, ilmu dan teknologi, serta responsif gender yang akan dibiayai;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan;
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
- 5) Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RPJMD ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

- 1) Landasan idiil Pancasila;
- 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- 3) Landasan operasional:

- a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1950);
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- g) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- i) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- k) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- l) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- m) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2009);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

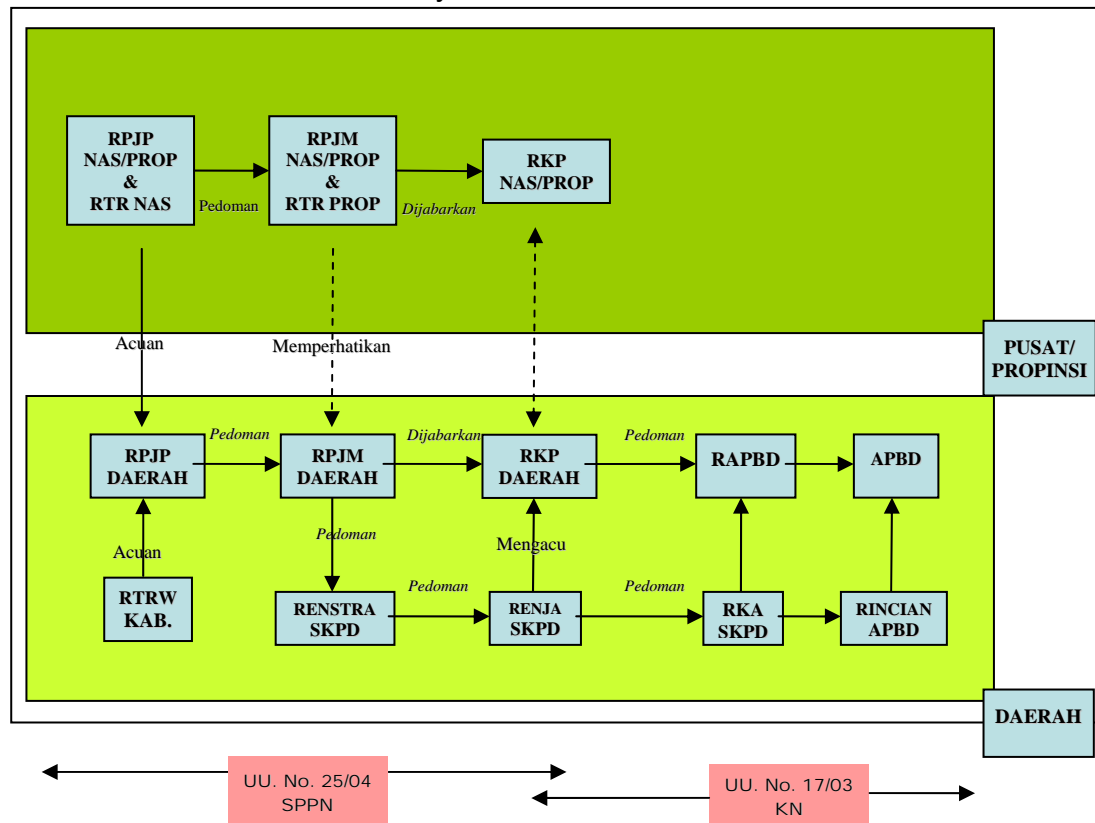
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional;
- t) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- u) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- v) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 (Lembaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
- w) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
- x) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
- y) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
- z) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda No 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

1.4 HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN BANTUL DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJMD Propinsi, RPJPD Kabupaten Bantul, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen RPJMD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.

Untuk memudahkan dalam implementasi rencana pembangunan, maka dokumen RPJMD ini harus dijabarkan ke dalam dokumen rencana kerja dinas yang disebut sebagai Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk tataran operasional setiap tahun maka RPJMD dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Renstra SKPD perlu dijabarkan ke dalam dokumen tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal, maka penyusunan rencana kerja SKPD perlu juga memperhatikan dokumen Renstra PEL Bantul Tahun 2011-2014.

Gambar 1: Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan berbagai bidang dan

aspek kehidupan sosial ekonomi yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program dalam jangka waktu lima tahun.

Dalam tradisi penyusunan rencana pembangunan berwawasan waktu lima tahun, statistik kondisi umum daerah yang disajikan dalam bab ini antara lain adalah:

1. Kondisi geografis, yang mencakup uraian tentang wilayah dan penggunaan lahan;
2. Perekonomian daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi; investasi; keuangan daerah; industri, perdagangan, koperasi dan UKM; pertanian; ketahanan pangan; kehutanan dan perkebunan; perikanan dan kelautan; energi dan sumberdaya mineral; dan pariwisata;
3. Sosial budaya daerah, seperti kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olahraga, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Prasarana dan sarana daerah, seperti transportasi, sumber daya air, air minum/air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan dan drainase, perumahan dan permukiman, listrik, serta komunikasi dan informasi;
5. Pemerintahan umum, yang mencakup pemerintahan, hukum, dan politik;
6. Lingkungan hidup, yang mencakup dampak pemanasan global, tata ruang, dan penanggulangan bencana.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis meliputi pertimbangan isu-isu strategis hasil analisis perekonomian daerah, sosial budaya daerah, prasarana dan sarana daerah, pemerintahan umum, dan lingkungan hidup.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan visi dan diturunkan (diderivasi) menjadi misi kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan tujuan dan sasaran masing-masing misi.

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan kebijakan umum anggaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

Dalam bab ini diuraikan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan program kepala daerah sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengukur kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan yang mencakup mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

0.1. KONDISI GEOGRAFIS

0.1.1. Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 506,85 km² yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Desa	Dukuh	Luas (Km ²)	%
1	Srandakan	2	43	18.32	3.61
2	Sanden	4	62	23.16	4.57
3	Kretek	5	52	26.77	5.28
4	Pundong	3	49	23.68	4.67
5	Bambanglipuro	3	45	22.70	4.48
6	Pandak	4	49	24.30	4.79
7	Pajangan	3	55	33.25	6.56
8	Bantul	5	50	21.95	4.33
9	Jetis	4	64	24.47	4.83
10	Imogiri	8	72	54.49	10.75
11	Dlingo	6	58	55.87	11.02
12	Banguntapan	8	57	28.48	5.62
13	Pleret	5	47	22.97	4.53
14	Piyungan	3	60	32.54	6.42
15	Sewon	4	63	27.16	5.36
16	Kasih	4	53	32.38	6.39
17	Sedayu	4	54	34.36	6.78
	Jumlah	75	933	506.85	100.00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bantul, 2010

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Dengan demikian wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami.

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Oya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Secara garis besar satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*). Perbukitan di sisi barat dan timur dan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari.
- b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal.
- c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi.
- d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Ketinggian tempat Kabupaten di Bantul dibagi menjadi empat kelas dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Kelas Ketinggian (dpl) m	Luas (ha)	(%)
1	0 – 7	3,228	6.37
2	7 – 25	8,948	17.65
3	25 – 100	27,709	54.67
4	100 - 500	10,800	21.31
5	> 500	-	-
Jumlah		50,685	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelas ketinggian tempat yang memiliki penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian Utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Bantul berkisar antara 1.063 mm dengan sembilan bulan basah dan tiga bulan kering. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C – 27°C. Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian Barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara.

Rata-rata curah hujan 10 tahun terakhir yakni tahun 1999 sampai dengan 2008 di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa intensitas hujan mulai menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober, puncaknya terjadi pada bulan Desember-

Januari, mulai menurun pada bulan Mei, dan sampai dengan bulan Agustus sering tidak terjadi hujan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Intensitas Curah hujan tahun 1999 – 2008

No	Bulan/Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Januari	1.689,00	1.185,00	1.803,00	976	1.028,00	1.209,00	5	-	1.221,50	7.799,20
2	Februari	1.213,00	1.524,00	623	1.047,00	1.734,00	953	7.709,00	-	4.767,80	4.387,10
3	Maret	1.194,00	812	1.440,00	144	15	1.397,00	5.838,00	-	4.307,00	4.206,50
4	April	1.038,00	791	522	146	0	0	3.825,00	-	3.680,50	1.962,50
5	Mei	136	389	163	10	121	586	1.548,00	-	938,2	243
6	Juni	12	178	160	0	77	36	1.166,00	-	1.147,90	53
7	Juli	35	0	171	0	0	101	776	-	39	-
8	Agustus	-	41	0	0	0	0	233	-	0	-
9	September	6	56	3	0	20	0	411	-	0	-
10	Oktober	430	631	483	40	189	61	2.942,00	-	533	1.955,60
11	November	764	2.782,00	1.359,00	736	1.485,00	586	9.339,00	236,5	2.454,75	4.465,80
12	Desember	1.263,00	749	508	580	2.312,00	2.394,00	9.239,00	3.995,00	7.799,20	3.316,00
	Jumlah	7.780,00	9.138,00	7.235,00	3.679,00	6.981,00	7.323,00	51.391,00	4.231,50	26.888,85	28.388,70
	Rerata tahunan	648,33	761,5	602,92	306,58	581,75	610,25	4282,58	352,63	2.240,74	2.365,73

Sumber: Dinas Sumberdaya Air Kabupaten Bantul tahun 1999-2008

0.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Bantul dapat diklasifikasikan menjadi kampung/permukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, tanah tandus, dan lain-lain penggunaan lahan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah yang berkurang seluas 186,0894 ha atau 0,367% dari total luas lahan. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan.

Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Perubahan penggunaan lahan selama tahun 2005- 2009 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wiayah tahun 2010, rencana penggunaan lahan dikelompokkan menjadi tiga, terdiri dari:

1) Kawasan Lindung Kabupaten

Kawasan lindung merupakan wilayah yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan kawasan rawan bencana.

2) Kawasan Budidaya Kabupaten

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih

bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Kawasan ini meliputi kawasan peruntukan hutan rakyat dan perkebunan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

3) Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan ini meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Bantul Kota Mandiri (BKM), pantai Selatan (yang meliputi pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai Depok, Samas, Kuwaru, dan Pandansimo), Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu, kawasan industri Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, dan gumuk pasir Parangtritis.

Tabel 4. Jenis dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Penggunaan Lahan	Tahun, Proporsi, dan Luas Penggunaan (ha)										Perubahan 2005 - 2009
		2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	
1	Perkampungan	3,635.2419	7.17	3,686.4516	7.27	3,724.3291	7.35	3,770.1308	7.44	3,810.7277	7.52	175.4858
2	Sawah	16,232.3092	32.03	16,168.3662	31.90	16,130.4887	31.82	16,085.6390	31.74	16,046.2198	31.66	-186.0894
3	Tegal	6,638.8969	13.10	6,638.8969	13.10	6,638.8969	13.10	6,637.9449	13.10	6,637.3855	13.10	-1.5114
4	Kebun Campur	16,604.5000	32.76	16,603.0770	32.76	16,603.0770	32.76	16,603.0770	32.76	16,602.4557	32.76	-2.0443
5	Hutan	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	1,385.0000	2.73	0.0000
6	Tanah Tandus	573.0000	1.13	573.0000	1.13	573.0000	1.13	573.0000	1.13	573.0000	1.13	0.0000
7	Lain-lain	5,616.0520	11.08	5,630.2083	11.11	5,630.2083	11.11	5,630.2083	11.11	5,630.2113	11.11	14.1593
	JUMLAH	50,685.0000	100.00	50,685.0000	100.00	50,685.0000	100.00	50,685.0000	100.00	50,685.0000	100.00	0.0000

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, tahun 2010

0.2. PEREKONOMIAN DAERAH

0.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun (2005-2009) pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Bantul memiliki kinerja yang cukup baik, bahkan saat gempa terjadi tahun 2006 (lihat Tabel 5). Berdasarkan harga berlaku tampak pertumbuhan ekonomi yang dicapai fluktuatif dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, yakni cenderung meningkat. Pada tahun 2009, dengan angka pertumbuhan harga berlaku yang lebih rendah dibandingkan tahun 2008 (9,84% dibanding 15,73%) menghasilkan angka pertumbuhan harga konstan yang relatif tetap (4,47% dibanding 4,90%). Artinya pertumbuhan yang dicapai tahun 2009 betul-betul disebabkan oleh bertambahnya barang dan jasa bukan oleh kenaikan harga semata. Hal yang sama tidak hanya terjadi pada tahun 2009 tetapi juga pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan angka pertumbuhan harga berlaku dan harga konstan.

Tabel 5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2009

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2005	4.903.668	15,69	3.234.172	4,99
2006	5.722.466	16,69	3.299.646	2,02
2007	6.409.648	12,00	3.448.949	4,52
2008	7.417.980	15,73	3.618.060	4,90
2009	8.147.860	9,84	3.779.948	4,47
	Rata-rata	13,99	Rata-rata	4,18

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010

Tabel 6. Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan Tahun 2000	
		Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2005	5,628,617	13.20	3,712,307	2.74
2	2006	6,472,748	15.00	3,732,268	0.54
3	2007	7,145,697	10.40	3,845,008	3.02
4	2008	8,153,311	14.10	3,976,712	3.43
5	2009	8.831.737	8,32	4.097.212	3,03
Rata-rata			10,54	Rata-rata	1,946

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010

PDRB Kabupaten Bantul ditopang oleh sembilan sektor dimana sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi tertuju pada sektor pertanian, perdagangan dan industri. Sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan peran yang relatif stabil (tahun 2007 menurun akibat gempa). Sektor industri dan jasa yang berbasis di permukiman mengalami penurunan dari tahun 2005-2007 digantikan oleh peran sektor bangunan. Keadaan ini terkait oleh pemulihan pasca gempa yang menyebabkan peningkatan peran sektor bangunan. Namun pada tahun 2009 sektor bangunan yang mengalami kontraksi negatif juga mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi sebagai akibat program rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu pemulihan perumahan dan permukiman serta pemulihan prasarana publik akibat gempa pada tahun 2006 telah selesai. Kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sektor	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	24,48	24,69	24,31	24,33	24,32
Pertambangan & penggalian	1,01	1,03	1,02	0,99	0,95
Industri pengolahan	19,93	17,22	16,88	16,48	16,16
Listrik, gas & air bersih	0,9	0,82	0,85	0,88	0,91
Bangunan	8,54	11,57	11,99	12,08	11,49
Perdagangan, hotel & restoran	18,95	18,92	19,12	19,41	19,76
Pengangkutan & komunikasi	6,88	6,65	6,81	6,88	7,09
Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	6,34	5,68	5,87	5,88	6,11
Jasa-jasa	12,98	13,23	13,14	13,07	13,21
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2005-2009 berfluktuatif. Pada tahun 2007 turun menjadi 2,02 persen akibat adanya gempa bumi. Namun seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian maka laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mulai tahun 2005 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 8. Sektor pertanian masih merupakan komponen terpenting penyusun PDRB sampai dengan tahun 2009 meskipun laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2009 (4,46 persen) mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2008 (4,96 persen). Perlambatan laju pertumbuhan sektor pertanian ini terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sub sektor kehutanan, dimana produksi tanaman kehutanan berkurang karena faktor permintaan berkurang setelah program rekonstruksi gempa selesai pada tahun 2008. Laju sektor pertambangan juga mengalami kontraksi negatif yaitu sebesar -0,13 persen dibanding pertumbuhan pada tahun 2008 yang mampu tumbuh sebesar 2,30 persen. Faktor yang menyebabkan adalah akibat berkurangnya permintaan barang khususnya gol C yang pada tahun 2007,2008 banyak digali untuk keperluan rekonstruksi, sedangkan tahun 2009 program rekonstruksi gempa telah selesai. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan karena produksi di sektor industri khususnya

industri kerajinan dan tekstil sudah mulai bangkit. Laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2009 mencapai 7,78 persen lebih cepat dibanding pada tahun 2008 yang mencapai 5,95 persen. Percepatan sektor ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan sub sektor pengangkutan dan sub sektor komunikasi dengan maraknya penggunaan *handphone*, layanan internet yang merambah sampai ke pelosok desa di Kabupaten Bantul. Pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2009 sebesar 8,40 persen lebih cepat. Hal ini dibanding pertumbuhannya pada tahun 2008 yang hanya sebesar 5,12 persen didukung oleh meningkatnya jumlah penabung, jumlah peminjam dan meningkatnya jasa penyewa reklame. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai dan kenaikan jasa pelayanan pemerintah dalam mendukung percepatan kenaikan sub sektor pemerintahan umum.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2009 (Persen)

Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pertanian	3,63	2,92	2,92	4,96	4,46
2. Pertambangan dan Penggalian	0,81	3,71	3,01	2,30	-0,13
3. Industri Pengolahan	3,15	11,87	2,51	2,38	2,45
4. Listrik, gas, dan air bersih	9,21	-6,46	7,99	8,13	8,75
5. Bangunan	7,79	38,34	8,32	5,67	-0.08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,79	1,84	5,64	6,51	6,33
7. Pengangkutan dan komunikasi	8,67	-1,3	6,96	5,95	7,78
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9,86	-5,74	4,71	5,12	8,40
9. Jasa-jasa	3,46	4,56	3,82	4,35	5,56
PDRB	4.99	2.02	4.52	4.90	4.47

Sumber : BPS Kab.Bantul 2010

Tingkat inflasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai tahun 2009 mengalami fluktuasi(naik turun).Pada tahun 2008 inflasi di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 7,1 pada tahun 2007 menjadi 10,26 pada tahun 2008.Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM. Pada tahun 2009 inflasi di Kabupaten Bantul kembali menurun menjadi 2,99 karena harga

kebutuhan kembali normal. Perkembangan inflasi Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Tahun	Inflasi Kab. Bantul	Inflasi Kota Yogya	Inflasi Nasional
1	2005	12.3	14.98	17.11
2	2006	7.61	10.4	6.6
3	2007	7.1	7.99	6.59
4	2008	10.26	9.88	11.06
5	2009	2.99	2.93	2.78

Sumber: BPS, 2010

Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang terdistribusi juga secara baik. Secara rinci capaian Indeks Gini Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 10. Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indeks Gini Kabupaten Bantul terlihat fluktuatif. Indeks Gini tahun 2006 lebih rendah dari tahun 2005, gempa yang meluluhlantakkan sebagian Kabupaten Bantul menyebabkan distribusi pendapatan menjadi terganggu. Wilayah yang sangat rusak karena gempa terhambat pengembangan ekonominya, sementara wilayah lain yang relatif aman dari gempa kinerja perekonomiannya tidak berubah. Hal ini jelas terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri. Lokasi sektor industri yang rusak akibat gempa menurunkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah, sementara sektor pertanian relatif sedikit mengalami gangguan akibat gempa. Hal ini tampak dari pangsa sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto tahun 2007 yang hanya turun sedikit dari 24,69% menjadi 24,31%. Sementara sektor industri masih harus memulai dari awal lagi. Dampak dari semua ini adalah timpangnya distribusi pendapatan regional yang diperoleh oleh masing-masing sektor. Dalam masa pemulihan, berbagai sektor ekonomi mulai dibenahi kembali. Walaupun capaian Indeks Gini tahun 2009 belum sebaik tahun 2005 tetapi dari data terlihat kecenderungan yang semakin membaik.

Tabel 10. Koefisien Gini Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

Tahun	Indeks Gini
2005	0,2261
2006	0,2569
2007	0,2474
2008	0,2536
2009	0,2473

Sumber: BPS Kabupaten Bantul 2010

0.2.2. Investasi

Pertumbuhan ekonomi makro bisa bersumber dari pengeluaran masyarakat untuk konsumsi, pengeluaran pengusaha untuk investasi, pengeluaran pemerintah, dan transaksi perdagangan dengan daerah atau negara lain. Diantara berbagai sumber pertumbuhan itu, investasi adalah sumber pertumbuhan yang terbaik, melalui investasi pertumbuhan berkelanjutan. Investasi di satu sisi menciptakan nilai tambah (barang dan jasa), pada sisi yang lain menciptakan kesempatan kerja.

Jumlah investasi di Kabupaten Bantul dari tahun 2009 mencapai Rp1.798.486,886 milyar. Peran investasi yang cukup besar itu sampai saat ini masih didominasi oleh investasi sektor pemerintah (50,25%), diikuti sektor swasta dalam negeri (30,23%), sektor swasta asing (15,12%), dan investasi masyarakat (4,40%). Pertumbuhan investasi domestik di Kabupaten Bantul dari tahun 2005 – 2009 menunjukkan peningkatan. Investasi domestik pada umumnya dilakukan lebih padat tenaga kerja. Inilah salah satu kelebihan investasi domestik. Disamping itu investasi domestik lebih bertahan terhadap gejolak yang terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan investasi asing. Artinya ketika ada guncangan dalam masyarakat yang menyebabkan resiko investasi bertambah tinggi tidak serta merta membuat investasi domestik berpindah ke wilayah lain. Berbeda dengan investasi asing yang rentan terhadap gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Investasi masyarakat sebesar 4,40 % menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam proses pembangunan. Ini adalah sebuah modal yang sangat baik bagi investasi. Pemerintah diharapkan dapat menjadi pendorong terhadap berkembangnya investasi masyarakat dan swasta. Kabupaten Bantul memiliki banyak potensi

yang dapat dikembangkan. Dengan kemudahan melalui pembentukan Dinas Perijinan dengan penyederhanaan prosedur dan pelayanan satu pintu diharapkan akan mempermudah investor dalam menanamkan modalnya. Perkembangan investasi tahun 2005 – 2009 dan peran investasi tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 11 dan 12.

Tabel 11. Perkembangan Investasi Tahun 2005-2009

No.	Tahun	Investasi Swasta		Investasi Masyarakat	Investasi Pemerintah
		PMA	PMDN		
1	2005	201,682,621,200	511.740.865,000	44,655,700,000.00	417,798,070,033.78
2	2006	205,442,621,200	514.715.865,000	40,754,500,000.00	545,132,135,933.38
3	2007	240,504,621,200	528.404,865,000	63,062,300,000.00	676,835,481,623.06
4	2008	259,774,621,200	537.102.135,000	76,635,400,000.00	1,045,423,303,527.78
5	2009	271,994,621,200	543.679.565,000	79,045,700,000.00	903,767,000,429.01

Sumber: Bappeda,DPKAD,Disperindakop,Bag.AP Kab. Bantul Tahun 2010 (data diolah)

Asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.400,-

Tabel 12. Peran Investasi di Kabupaten Bantul Tahun 2009

Investor	Investasi tahun 2009	
	Nilai (Rp juta)	Peran (%)
PMA	271.994.621.200	15,12
PMDN	543.679.565.000	30,23
Pemerintah	903.767.000.000	50,25
Masyarakat	79.045.700.000	4,40
	1.798.486.886.629	100

Sumber: Bappeda Kab. Bantul tahun 2010 (data diolah)

0.2.3. Keuangan Daerah

Profil keuangan daerah dalam penyusunan RPJMD bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi keuangan daerah beserta komponennya. Gambaran umum kondisi keuangan daerah dipergunakan untuk mengetahui berbagai faktor penting yang menentukan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencakup: (1) struktur pendapatan beserta komponennya; (2) Struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend perkembangan pembiayaan defisit/surplus; (4) trend besaran penerimaan dana transfer dari pemerintah atasnya. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang

kondisi keuangan daerah, diperlukan data-data dalam rentang waktu tertentu sehingga didapatkan informasi yang lengkap.

Tabel 13. Realisasi APBD Tahun 2006-2009 dan Target APBD Tahun 2010 (Rupiah)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN	599,619,650,884.62	727,836,911,979.62	1,023,590,207,758.85	882.149.788.429,75	876.204.469.555,28
Pendapatan Asli Daerah	44,005,310,869.67	57,229,726,493.62	69,800,761,508.85	88.691.362.690,38	90.238.879.583,48
• Pajak Daerah	9,836,299,528.00	10,191,535,467.00	12,070,898,846.00	14,108,451,478.99	16,489,578,000.00
• Retribusi Daerah	22,412,839,917.00	30,808,408,803.00	37,171,638,611.00	58,205,951,445.00	56,377,938,662.00
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	100,000,000.00	181,478,076.87	26,623,886.66	1,126,585,441.99	1,573,000,000.00
• Laba penyertaan modal	2,479,134,676.79	2,833,168,049.11	3,423,291,081.92	6,386,252,752.83	7,000,000,000.00
• Lain2 PAD yg sah	9,177,036,747.88	13,215,136,097.64	17,108,309,083.27	8,864,121,571.57	8,798,362,921.48
Dana Perimbangan	526,753,134,017.00	602,943,019,186.00	679,250,090,167.00	668.488.989.539,37	683.081.409.250,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28,861,205,997.95	67,664,166,300.00	274,539,356,083.00	124.969.436.200,00	102.884.180.721,80
BELANJA	545.132.135.933,38	676.835.481.523,06	1.045.423.303.527,78	931.789.051.390,08	915.091.017.832,34
Belanja Tidak Langsung		451,495,661,530.06	598,167,227,346.78	634.893.132.281,01	685.712.895.007,34
Belanja Langsung		225,339,820,093.00	447,256,076,181.00	268.873.868.148,00	229.378.122.825,00
Surplus (Defisit) (A-B)	54.487.514.900,00	51.001.430.456,56	-21.833.096.231,07	-82.661.134.608,83	-38.886.548.277,06
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Daerah	66.106.003.300,00	88.468.641.260,85	119.713.769.894,59	84.776.365.285,09	39.282.779.277,06
Pengeluaran Daerah	32.126.033.144,26	19.756.301.722,82	13.104.308.840,57	2.115.231.676,26	396.231.000,00

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2010

Informasi tentang kondisi keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Tata kelola keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Tabel 13 menunjukkan Realisasi APBD Tahun 2006 – 2009 dan Target APBD Tahun 2010.

0.2.3.1. Pendapatan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan semakin bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah tersebut dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun yang dimaksud kemampuan daerah adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah.

Tabel 14. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2006-2010

No.	Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan	PAD/ Pendapatan (%)	Jumlah Belanja	PAD/ Belanja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2006	44,005,310,869.67	599,619,650,884.62	7.34	545,132,135,933.38	8.07
2	2007	57,229,726,493.62	727,836,911,979.62	7.86	763,254,947,189.55	7.50
3	2008	69,800,761,508.85	1,023,590,207,758.85	6.82	1,045,423,303,527.78	6.68
4	2009	88,691,362,690.38	882,149,788,429.75	10.05	931,789,051,390.08	9.52
5	2010	90,238,879,583.48	876,204,469,555.28	10.30	915,091,017,832.34	9.86

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2010

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul terhadap total Pendapatan Daerah selama lima tahun (2006-2010) sekitar 6,80% - 10,30%. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bantul rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 8,47%, Tingkat Kemandirian Daerah sebesar 9,21% dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 91,53%. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Bantul masih banyak bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Umum. Oleh sebab itu maka dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja Daerah rata-rata selama lima tahun (2006-2010) adalah sebesar 8,33%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah rata-rata selama lima tahun hanya mampu menyumbang untuk membiayai kegiatan pembangunannya sebesar 8,33%.

0.2.3.2. Belanja Daerah

Tata kelola belanja daerah juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah telah memberi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kreativitas sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dan pendistribusian semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah.

Tabel 15. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006 (Rupiah)

No	Tahun	Kebutuhan Fiskal		
		Belanja Aparatur	Belanja Publik	Total
1.	2006	118.338.774.610,59	426.793.361.322,79	545.132.135.933,38

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2010, (berdasarkan Kepmendagri 29/ 2003)

Tabel 16. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2007-2010 (Rupiah)

No	Tahun	Kebutuhan Fiskal		
		Belanja tdk langsung	Belanja Langsung	Total
1.	2007	451.495.661.530,06	225.339.820.093,00	676.835.481.62.,06
2.	2008	598.167.227.346,78	447.256.076.171,00	1.045.423.303.527,78
3.	2009	634.893.132.281,01	268.873.868.148,00	903.767.000.429,01
4.	2010*	685.712.895.007,34	229.378.122.825,00	915.091.017.832,34

Sumber : DPKAD Kabupaten Bantul 2010 (Permendagri 13 / 2006)

Ket : Tahun 2009 data setelah perubahan ;

* =Target APBD

Tabel di atas menunjukkan bahwa, belanja pembangunan daerah atau belanja langsung mengalami penurunan, sedangkan belanja administrasi umum atau belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat langsung belanja daerah kepada masyarakat mengalami penurunan. Dalam kondisi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat, maka kondisi ini mencerminkan adanya masalah yang serius dalam tata kelola pembangunan dan keuangan daerah. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

Dari tabel diatas didapatkan hasil perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja selama empat tahun terakhir rata-rata sebesar 66,50% sedangkan Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja rata-rata sebesar 32,50%.Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung masih mendominasi dari keseluruhan/total Belanja Daerah dibandingkan Belanja Langsung.

0.2.3.3. Pembiayaan Defisit/Surplus

Pembiayaan defisit anggaran bisa bersumber dari pinjaman daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai dasar/pedoman bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Namun demikian, untuk merealisasikan pinjaman ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada *debt service coverage ratio* (DSCR) saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek prediksi kondisi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal.

Tabel 17 di bawah ini menunjukkan Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010.

Tabel 17. Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
2006	66.106.003.300,00	32.126.033.144,26
2007	88.468.641.260,85	19.756.301.722,82
2008	119.713.769.894,59	13.104.308.840,57
2009	84.776.365.285,09	2.115.230.676,26
2010*	39.282.779.277,06	396.231.000,00

Sumber : DPKAD Kabupaten Bantul 2010

Ket : Tahun 2009 data setelah perubahan; *=Target APBD

0.2.4. Industri, Perdagangan, dan UKM

0.2.4.1. Perkembangan industry

Industri kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi Kabupaten Bantul yang sudah teruji ketangguhannya. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi dan gempa bumi di Kabupaten Bantul sektor industri masih mampu bertahan. Sektor industri di Kabupaten Bantul didominasi oleh industri kecil dan menengah. Jumlah industri kecil yang demikian banyak dengan penggunaan teknologi sederhana mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat tinggi.

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk selalu mengembangkan industri kecil dan menengah diantaranya melalui pemberian kemudahan ijin usaha dan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM), penyusunan kebijakan industri terkait dengan industri penunjang IKM, pelatihan dan bantuan permodalan, serta pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan unit usaha IKM, tenaga kerja yang diserap, nilai produksi, nilai tambah, dan nilai investasi usaha IKM tahun 2005-2009.

Tabel 18. Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

URAIAN	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Unit Usaha	17.801	17.865	17.911	17.937	18.014
Tenaga Kerja	77.600	78.783	79.904	80.468	80.968
Nilai Produksi (Rp Juta)	582.031	590.224	643.627	721.321,4	783.503.680
Nilai Tambah (RpJuta)	359.616	365.030	388.845	450.130,73	494.735.020
Nilai Investasi (Rp Juta)	337.149	340.124	349.813	358.501,27	365.087.700

Sumber: Disperindagkop, 2010

Ragam industri di Kabupaten Bantul cukup banyak mulai dari industri kerajinan berbasis kayu, kertas, logam, tanah, limbah, kulit sampai garmen. Industri yang beragam itu pada umumnya terkumpul dalam sentra-sentra industri. Tahun 2009 tercatat 73 sentra industri yang terbentuk. Diantara industri yang beraneka

ragam itu, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan beberapa macam industri sebagai komoditas terpilih yang diklasifikasikan dalam komoditas unggulan, komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) **Komoditas unggulan:** pemakaian bahan baku lokal $\geq 70\%$, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor \geq US\$ 1 juta, tujuan ekspor ≥ 3 negara, pertumbuhan ekspor $> 10\%$ selama lima tahun terakhir. Yang termasuk dalam kelompok industri unggulan antara lain industri mebel kayu, keramik, dan tatah sungging;
- 2) **Komoditas andalan:** pemakaian bahan baku lokal 60-69%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor $>$ US\$0.5-1 juta, tujuan ekspor = dua negara, pertumbuhan ekspor 5-10% selama lima tahun terakhir. Yang termasuk dalam kelompok industri andalan adalah kerajinan kayu.
- 3) **Komoditas yang diunggulkan:** pemakaian bahan baku lokal 50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor $<$ US\$0.5 juta, tujuan ekspor < 1 negara, pertumbuhan ekspor < 5 selama lima tahun terakhir. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah industri bambu dan emping mlinjo.

Diantara berbagai ragam industri yang ada, mebel kayu merupakan industri yang menunjukkan kinerja paling stabil dibandingkan dengan industri lainnya. Dari tahun 2005-2009 terus-menerus ada ekspor walaupun mengalami penurunan *share*. Namun demikian pangsa mebel kayu dalam pembentukan devisa semakin tahun semakin menurun digantikan oleh kerajinan dari kertas dan kerajinan kayu lain, seperti batik kayu atau patung kayu. Pergeseran ini erat berhubungan dengan permintaan konsumen yang selain mulai mempertimbangkan aspek lingkungan juga pertimbangan mode dan desain yang kurang dapat diikuti oleh pengrajin mebel. Permasalahan desain, inovasi produk, dan teknologi *packaging* memang menjadi kendala yang dihadapi pengrajin untuk dapat bersaing di pasar global.

0.2.4.2. Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun (pameran Furnicraft, Inacraft, Texcraft, Pekan Raya Jakarta, Jogja Ekspo Sekaten, Bantul Ekspo, dan Jogja Ekspor Ekspo) sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Sektor perdagangan Kabupaten Bantul, sebagaimana dapat dilihat dari kemampuan industri kerajinan untuk terus merambah pasar ekspor, terbagi dalam perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Perdagangan luar negeri tercermin dari kemampuan Kabupaten Bantul untuk melakukan ekspor. Dari segi volume, kemampuan untuk mengespor selama lima tahun terakhir tampak menurun, tetapi jika dilihat dari nilainya justru cenderung meningkat (lihat Tabel 19). Ini berarti harga produk yang diespor mengalami kenaikan. Jika dilihat dari jumlah negara tujuan maka tampak bahwa jumlah negara tujuan dan macam komoditas yang dijual semakin kecil. Di satu sisi ini dapat bermakna positif, artinya kemampuan ekspor ke masing-masing negara menjadi lebih tinggi dan komoditas yang dijual semakin terspesialisasi. Namun aspek negatifnya adalah konsentrasi pada makin sedikit negara dan makin sedikit komoditas seperti meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang, jika ada kegoncangan dari negara tujuan atau komoditas terpilih, maka sulit untuk melakukan pemulihan.

Tabel 19. Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

Tahun	Volume (ton)	Nilai (US\$ 000)	Jumlah negara tujuan	Macam Komoditas
2005	8.854,36	21.138,27	69	51
2006	8.555,18	23.633,29	60	48
2007	8.020,40	20.152,74	57	56
2008	7.027,12	20.548,23	48	29
2009	6.295,71	24.041,48	52	32

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, 2010

Perekonomian di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih didominasi kegiatan perdagangan skala kecil dan ekonomi lokal. Masih suburnya keberadaan pasar tradisional, yang memang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Bantul selama ini dapat menjadi indikasi kuatnya peran ekonomi lokal dalam perekonomian Bantul. Tahun 2009, sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 29 unit pasar kabupaten, 1 unit pasar seni, 27 unit pasar desa, 6 unit pasar hewan, 367 unit toko dan 370 unit kios.

Pasar yang ada tersebar di seluruh wilayah, setiap kecamatan rata-rata memiliki dua buah pasar (lihat Tabel 20). Dari sejumlah pasar tradisional itu telah dilakukan renovasi besar terhadap enam pasar yakni pasar Imogiri, Pijenan, Niten, Piyungan, Jejeran, dan Bantul dan satu unit gudang dengan pola Sistem Resi Gudang (SRG) Niten. Berkembangnya pasar tradisional dan pembatasan toko modern dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul diharapkan dapat menekan perkembangan toko modern. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengizinkan hypermarket dan supermarket beroperasi di wilayah Bantul. Minimarket dengan batasan yang sangat ketat ada ijin untuk pendiriannya. Diantara syarat yang ketat itu adalah bahwa minimarket itu adalah milik pengusaha lokal, dan jika minimarket itu sebuah waralaba, induknya haruslah pengusaha lokal.

Tabel 20. Lokasi Pasar Kabupaten Tahun 2009

No.	Kecamatan	Lokasi Pasar
1	Srandakan	- Mangiran
		- Jragan
		- Koripan
2	Sanden	- Sorobayan
		- Celep
3	Kretek	- Sangkeh
		- Angkruksari
4	Pundong	- Pundong
5	Bambanglipuro	- Turi
		- Gatak
		- Grogol
6	Pandak	- Pijenan
		- Pandak
		- Jodog
		- Gumulan
7	Bantul	- Bantul
8	Jetis	- Barongan
		- Bendosari
9	Imogiri	- Imogiri
		- Pasar hewan
10	Dlingo	- Dlingo
11	Banguntapan	- Ngipik
12	Pleret	- Jejeran
		- Pleret
13	Piyungan	- Piyungan
		- Panasan
14	Kasih	- Niten
15	Sedayu	- Semampir
		- Sungapan

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul, tahun 2010

Persoalan permodalan di sektor pertanian juga mendapatkan perhatian pemerintah dengan dibangunnya gudang dengan sistem resi gudang (SRG). SRG bertujuan untuk menyimpan sementara produk pertanian (gabah dan beras). Produk yang disimpan diberikan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank yang telah ditunjuk.

Pasar dan kegiatan ekonomi lokal yang dilestarikan di Kabupaten Bantul masih berhadapan dengan masalah klasik pedagang yakni permodalan. Untuk mengatasi masalah modal pedagang mencari pinjaman. Sementara koperasi masih memiliki peran yang rendah dalam penyediaan modal bagi pedagang. Peran rentenir yang besar menjadi indikasi kurang kuatnya upaya sektor perbankan dan koperasi dalam mengatasi persoalan permodalan pedagang.

Pemahaman atas perilaku pedagang dan aturan di sektor perbankan yang rigid menjadi penyebab masih kuatnya peran rentenir dalam penyediaan modal. Pemberian dana bergulir bagi pedagang kecil di pasar Bantul, Piyungan, Imogiri, dan Niten pada tahun 2008 merupakan solusi untuk mengantisipasi merebaknya rentenir di pasar-pasar.

0.2.4.3. Perkembangan Koperasi dan UKM

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang ideal juga berkembang di Kabupaten Bantul. Tahun 2009 di Bantul terdapat 407 unit koperasi dengan 180.814 anggota. Dari jumlah tersebut KUD adalah jenis koperasi yang memiliki anggota paling banyak (60,06%) tetapi jumlah unit koperasinya cukup kecil yakni 4,17%. Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. Koperasi yang telah berkembang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: induk koperasi, koperasi primer, dan koperasi unit desa (KUD). Jumlah induk koperasi sejak tahun 2005 sampai 2009 tidak mengalami perubahan, demikian juga dengan koperasi unit desa. Sejak tahun 2007 jumlah koperasi primer mengalami peningkatan.

Tabel 21. Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pusat Koperasi	3	3	3	3	3
2	Koperasi Primer	348	300	346	375	404
3	KUD	17	17	17	17	17

Sumber: Dinas Perindagkop, 2010

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan

Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Tabel 22. Jumlah dan Anggota Koperasi di Bantul Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Koperasi		Jumlah anggota
	Aktif	Pasif	
2005	274 (78,06)	77(21,93)	163.567
2006	242 (80,13)	60 (19,87)	165.203
2007	246 (70,48)	103 (29,62)	164.267
2008	278(73,54)	100(26,45)	180.575
2009	322(79,11)	85(20,88)	180.814

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul
Keterangan: angka dalam kurung adalah angka proporsi

0.2.5. Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Bantul merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Kondisi ini tercermin dalam distribusi PDRB per lapangan usaha yang menunjukkan kontribusi sektor ini merupakan komponen tertinggi dalam perekonomian daerah (PDRB).

Ditinjau dari ketersediaan lahan untuk usaha tani, sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul seluas 30.234 ha (59,65%) masih merupakan lahan pertanian, terdiri dari lahan sawah seluas 15.569 ha dan lahan bukan sawah seluas 14.665 ha (data tahun 2009). Penggunaan lahan di sektor pertanian meliputi usaha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Ketersediaan air untuk lahan pertanian dilakukan melalui irigasi teknis yang mencakup areal seluas 2.390 ha (7,9%), irigasi setengah teknis seluas 10.563 ha (34,94%), selebihnya irigasi sederhana, irigasi desa, tadah hujan, dan lahan kering. Upaya untuk mencukupi air irigasi untuk usaha pertanian dilakukan dengan membantu merehabilitasi jaringan irigasi, membangun dam dan parit,

membangun embung, membangun sumur pantek, dan pembinaan terhadap P3A.

Untuk menjamin ketersediaan lahan sawah, Kabupaten Bantul telah melakukan upaya dengan pemberian insentif berupa sertifikasi lahan, bantuan pupuk, pengembangan/optimalisasi lahan pantai yang memiliki potensi 600 ha, dan optimalisasi lahan pantai. Upaya optimalisasi lahan pantai dilaksanakan dengan cara reklamasi lahan untuk memulihkan kesuburan tanah dengan pemberian pupuk organik didukung dengan pengembangan sumur renteng.

Padi sawah menunjukkan bahwa terjadi penurunan produktivitas padi dari 6,7 ton GKG/ha pada tahun 2008 menjadi 6,5 ton GKG/ha pada tahun 2009. Meskipun ada penurunan produktivitas, namun produksi padi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan luas panen padi dari 25.089 ha pada tahun 2008 menjadi 28.258 ha pada tahun 2009.

Adanya peningkatan luas areal tanam padi menyebabkan kebutuhan benih padi meningkat. Sehingga dilakukan inovasi perbenihan melalui pengembangan *Bantul Seed Center*, yang diprioritaskan memproduksi benih padi sebanyak 500 ton per tahun dengan harga lebih rendah dari benih di pasar umum, namun tetap memiliki kualitas baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama 16 kelompok petani penangkar benih dengan Balai Benih Pertanian milik dinas.

Upaya peningkatkan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui penyediaan benih bermutu maupun peningkatan intensifikasi dengan penerapan teknologi PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. Upaya pengamanan produksi dilakukan melalui penyediaan sarana pengendali OPT dan lumbung pangan untuk menyimpan bahan pangan saat produksi melimpah. Adapun perkembangan pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian unggulan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009

NO	Komoditi	Tahun					ket
		2005	2006	2007	2008	2009	
Padi Sawah							
1	Luas Panen	25.081	24.655	25.681	25.089	28.258	ha
2	Produktivitas rata-rata (GKG)	58.67	59.08	62.22	66.46	65.27	kw/ha
3	Produksi (GKG)	147.139	145.654	159.787.2	166.737	184.439.97	ton
4	Produksi beras	92.911,85	92.053,33	100.687,28	105.377,78	116.566,06	ton
Padi Ladang							
1	Luas Panen	211	189	201	164	424	ha
2	Produktivitas rata-rata (GKG)	30.28	28.84	28.51	27.62	28.44	kw/ha
3	Produksi (GKG)	639	545	573	453	1206	ton
4	Produksi beras	402.57	434.35	360.99	285.39	759	ton/ha
Jagung							
1	Luas Panen	5155	4976	5526	5739	6290	ha
2	Produksi (pipilan kering)	23057	17867	26865	30117	37620.49	ton
3	Produktivitas	4.47	3.59	4.86	5.25	5.981	ton/ha
Kacang tanah							
1	Luas Panen	5709	5194	4680	3701	3677	ha
2	Produksi (wose kering)	5605	4903	4912	4568	4043	ton
3	Produktivitas	0.98	0.94	1.05	1.23	1.1	ton/ha
Kedelai							
1	Luas Panen	4177	3874	4197	5290	4380	ha
2	Produksi (wose kering)	5444	5127	5801	6150	7309	ton
3	Produktivitas	1.3	1.32	1.38	1.16	1.67	ton/ha
Bawang Merah							
1	Luas Panen	1951	2077	1368	1273	1227	ha
2	Produksi	19837	21787	13109	15145	16656	ton
3	Produktivitas	10.17	10.49	9.58	11.90	13.58	ton/ha
Cabe Merah							
1	Luas Panen	896	645	528	476	735	ha
2	Produksi	8266.2	5188	4278	4343	6321	ton
3	Produktivitas	9.23	8.04	8.10	9.12	8.6	ton/ha

Sumber: Dipertahut, 2010

Usaha bidang peternakan di Kabupaten Bantul dapat digambarkan dari banyaknya populasi ternak yang diusahakan oleh petani ternak meliputi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Adapun perkembangan populasi ternak besar dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24. Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2005 (ekor)	2006 (ekor)	2007 (ekor)	2008 (ekor)	2009 (ekor)
1	Sapi potong	48.157	48.399	49.655	51.452	52.514
2	Sapi perah	177	181	171	129	130
3	Kerbau	813	801	890	734	677
4	Kuda	365	458	852	845	855

Sumber: Dipertahut, 2010

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Bantul meliputi daging, telur dan susu. Produksi daging terdiri dari daging sapi potong, kuda, kambing/domba, ayam ras dan pedaging. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur dan itik. Perkembangan produksi komoditas peternakan tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Produksi daging, telur, dan susu di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No.	Hasil Ternak	Tahun				
		2005 (kg)	2006(kg)	2007 (kg)	2008 (kg)	2009 (kg)
1	Daging	11.038.573	9.253.369	8.143.936	9.664.378	9.873.036
2	Telur	3.849.564	3.861.264	4.048.968	4.801.153	5.172.715
3	Susu	291.176	297.757	281.306	212.213	168.209

Sumber: Dipertahut, 2010

0.2.6. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sehingga penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kebijakan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan meliputi tiga aspek, yakni menjamin ketersediaan, konsumsi, dan distribusi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul dapat diketahui dari indikator ketersediaan energi dan protein serta cadangan pangan yang ada di masyarakat. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein selama priode 2005-2009 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
1	2005	6.633	171,97	15,21	187,19
2	2006	6.299	158,63	17,79	176,42
3	2007	7.050	179,35	19,65	199
4	2008	7.065	186,71	20,38	207,09
5	2009	7.435	198,76	17,22	215,98

Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010

Penurunan KEP terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi yang berdampak pada penurunan produksi pangan. Adapun perkembangan cadangan pangan masyarakat (beras) yang terdiri dari stok beras yang ada di petani, penggilingan padi, pedagang, dan konsumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Jenis Stok	Keadaan Stok Beras (ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Masyarakat	93.314,42	92.487,68	101.048,27	105.663,17	115.949,00

Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010

Jika ditinjau dari aspek distribusi pangan, di Kabupaten Bantul distribusi pangan berjalan lancar karena didukung sarana jalan dan transportasi yang memadai.

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesenjangan harga yang mencolok antara sentra produksi dengan wilayah lainnya.

Sedangkan dari aspek konsumsi pangan, di Kabupaten Bantul dapat ditunjukkan dengan parameter Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat. Adapun perkembangan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul selama periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2005–2009

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	14,6	17,8	18,7	20,5	19,4
4	Minyak dan Lemak	0,8	4,8	4,4	4,2	4,2
5	Buah/Biji Berlemak	1	1	1	1	1
6	Kacang-Kacangan	10	10	10	10	10
7	Gula	-	-	-	-	-
8	Sayur dan Buah	30	30	30	30	30
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Total	83,9	91,1	91,6	93,2	92,1

Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat belum beragam, karena masih ada dominasi kelompok pangan tertentu yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, sayuran, dan buah.

Permasalahan yang ada terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain adalah masih terdapatnya daerah rawan pangan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan intervensi melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Salah satu bentuk intervensi tersebut antara lain adalah Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan sejak tahun 2006 dan telah dialokasikan pada enam desa rawan pangan di tiga kecamatan, yaitu Desa Muntuk dan Jatimulyo (Kecamatan

Dlingo), Desa Selopamiro dan Wukirsari (Kecamatan Imogiri), serta Desa Srihardono dan Seloharjo (Kecamatan Pundong).

0.2.7. Kehutanan dan Perkebunan

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pencapaian penutupan lahan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal berbasis kelestarian fungsi lingkungan, ekonomi dan sosial. Tahun 2005 sampai dengan 2009 luas lahan kritis di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 1.284,41 ha pada tahun 2005 menjadi 431,5 ha pada tahun 2009, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No	Jenis Lahan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Lahan Kritis (ha)	1.284,41	1.167,41	986	877	431,5

Sumber: Dipertahut, 2010

Penurunan lahan kritis ini karena adanya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan, sehingga lahan kritis berubah menjadi lahan yang lebih produktif. Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan sasaran hutan rakyat adalah terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30. Luas Rehabilitasi Hutan Rakyat di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No.	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Rebahilitasi Hutan Rakyat (Ha)	7.984	8.007	8.252	8.656	8.545

Sumber: Dipertahut, 2010

Lahan hutan rakyat saat ini juga lebih produktif karena sudah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan antara lain empon-empon dan garut. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha hutan dilaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha hutan rakyat, yaitu masyarakat sekitar hutan yang mengelola hutan. Jumlah kelompok tidak mengalami perubahan

sejak tahun 2005-2009 yaitu sebanyak 203 kelompok. Hasil produksi hutan rakyat berupa kayu dan non kayu yang terdiri dari madu dan sriti, seperti pada tabel berikut:

Tabel 31. Hasil Produksi Hutan di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

No.	Komoditi	Tahun					Ket
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Kayu	5.105.650	5.087,800	2.783,942	7.018,609	6.369,442	M3
2	Non Kayu						
	a. Madu	807	824	904	674,5	1.286	kg
	b. Sriti	324	349	342	235	305	kg

Sumber: Dipertahut, 2010

Hasil kayu hutan rakyat biasanya digunakan untuk bahan kerajinan. Penurunan hasil kayu pada tahun 2007 karena konsentrasi masyarakat masih terfokus pada konstruksi pasca gempa bumi. Pada tahun 2008 kembali terjadi kenaikan hasil, karena konsentrasi masyarakat sudah kembali pada lahan penghidupannya. Penurunan produksi tahun 2009 lebih disebabkan karena penurunan permintaan.

Tabel 32. Luas Panen, Produksi, dan Produktifitas
Tembakau, Mete, Tebu, Kelapa di Kabupaten Bantul
Tahun 2005–2009

NO	Tembakau virgina	Tahun					Ket
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Luas Panen	10.4	7	10.9	6.1	19.2	Ha
2	Produksi	10.76	14.2	21.3	19	48.46	Ton (KRG OVEN)
3	Produktivitas	1.03	2.03	1.95	3.11	2.52	ton/ha (KRG OVEN)
NO	TEBAKAU RAKYAT	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1	Luas Panen	3386.5	199	233.5	231.5	504.9	Ha
2	Produksi	217.4	128.9	152.56	154.13	314.03	Ton (KRG rajang)
3	Produktivitas	0.56	0.65	0.65	0.67	0.62	ton/ha (KRG rajang)
NO	METE	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1	Luas Panen	392.4	380	390	386.3	302.35	Ha
2	Produksi	76.38	122.88	125	124.3	124.28	Ton (glondong KRG)
3	Produktivitas	0.19	0.32	0.32	0.32	0.41	ton/ha
NO	TEBU	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1	Luas Panen	1.355	1324.04	1434.97	1174.99	1455.59	Ha
2	Produksi	5569.4	5792	6941.17	6023	7245.59	Ton (HABLUR)
3	Produktivitas	4.11	4.37	4.48	5.13	4.97	ton/ha (HABLUR)
NO	KELAPA	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
	Luas area	10932.0 1	10521.37	10246.11	10307.05	10330.05	Ha
1	Luas Panen	7515	6941	6748.4	6760.52	6797.45	Ha
2	Produksi	11119.1	11659.5	10797.5	10228.4	10287.71	Ton (KOPRA)
3	Produktivitas	1.48	1.68	1.6	1.51	1.51	ton/ha (KOPRA)

Sumber: Dipertahut, 2010

Untuk komoditas unggulan tanaman perkebunan, di Kabupaten Bantul meliputi kelapa, mete, tebu dan tembakau. Adapun perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas komoditas-komoditas dapat dilihat pada Tabel 34.

0.2.8. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Bantul memiliki wilayah pantai sepanjang 17 km yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dengan kewenangan pengelolaan pantai sejauh 4 mil laut dari tepi garis pantai pasang surut. Wilayah laut di Kabupaten Bantul yang menjadi kewenangan pengelolaan seluas 100,008 km².

Sumberdaya kelautan perikanan tangkap di Samudra Hindia memiliki potensi lestari 6.994,8 ton/tahun yang meliputi ikan-ikan demersal sebanyak 874,8 ton dan ikan-ikan pelagis sebanyak 6.120 ton.

Potensi perikanan budidaya air tawar pada tahun 2009 seluas 7.830 ha, dan 10 Ha untuk budidaya air payau, dengan luas baku usaha budidaya air tawar 96 ha yang dimanfaatkan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebanyak 284 kelompok dengan jumlah pembudidaya 5.092 RTP, dan hasil produksi perikanan 2.037,4 ton. Pemanfaatan lahan yang baru mencapai 1,22% masih terbuka peluang luas untuk dikembangkan. Kecamatan dan Desa Pesisir yang berada disepanjang pantai Kabupaten Bantul tampak dalam tabel berikut:

Tabel 33. Kecamatan dan Desa Pesisir

No	Kecamatan	Desa	Luas (km ²)
1.	Kretek	1. Parangtritis	11,87
		2. Tirtohargo	3,62
2.	Sanden	1. Srigading	7,57
		2. Gadingsari	8,12
3.	Srandakan	1. Poncosari	11,86

Sumber: DKP, 2010

Lahan daratan pesisir disepanjang pantai Kabupaten Bantul berupa hamparan pasir dengan potensi perikanan untuk usaha budidaya tambak seluas 600 ha.

Realisasi pemanfaatan potensi lahan tersebut sampai saat ini belum optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor/ kendala yang dihadapi antara lain aspek teknologi, sarana permodalan serta kemampuan SDM masyarakat pesisir.

Sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan milik kelompok nelayan di Kabupaten Bantul tahun 2009 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 34. Sarana prasarana milik nelayan Kabupaten Bantul tahun 2009

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Asset/ Kelompok Nelayan					Jumlah	Ket
		Mino Tirtohargo	Mina Bahari 45	Mino Samudro	Fajar Arum	Pandan Mino		
1	TPI	-	1	1	1	1	5	Unit
2	Los Pasar TPI	-	3	1	1	1	6	Unit
3	PMT	2	22	8	14	15	68	Unit
4	PPI (sederhana)	-	1	1	1	1	5	Titik
5	Gill Net	30	660	78	140	128	663	Set
6	Pancing Rawai	2	88	17	29	30	104	Set
7	Hand Line	2	29	9	15	14	69	Set
8	Tramel Net	-	87	27	45	42	207	Set
9	Jaring Ered	170	-	85	80	35	200	Set
10	Pelampung	8	99	30	42	45	224	Buah
11	Dayung	8	105	35	28	30	206	Buah
12	Alat Pengolah Ikan	-	31	20	10	9	70	Unit
13	Warung Khas Ikan	-	25	5	9	2	41	Unit
14	Kapal 10 GT	-	-	1	1	1	3	Unit
15	Kapal 7 GT	-	-	-	-	1	1	Unit
16	Rumpon	-	-	-	-	-	3	Hilang
17	GPS	1	4	4	4	4	17	Unit

Sumber: DKP, 2010.

0.2.9. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pembangunan pada sektor energi di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT). Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang diversifikasi energi. Upaya untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dan memperluas jangkauan jaringan listrik ke seluruh desa di Kabupaten Bantul ditempuh dengan cara pengembangan energi alternatif dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dan berwawasan lingkungan (energi matahari, angin, dan biogas).

Kabupaten Bantul mempunyai potensi dalam kandungan sumberdaya mineral dan bahan tambang yang belum semua terukur dan terekplorasi. Adapun lokasi sumber daya mineral tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, yakni: Dlingo, Imogiri, Piyungan, Sewon, Pleret, Jetis, Pajangan, Srandakan, Sedayu, Banguntapan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Kretek, dan Pundong. Pengelolaan tambang ini harus diawasi agar nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam penambangan yang dapat merusak lingkungan. Lokasi penambangan harus sesuai dengan site plan wilayah pertambangan dan harus dibatasi secara jelas agar tidak terjadi pelebaran yang

nantinya dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

0.2.10. Pariwisata

Basis yang ada saat ini untuk obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul dikategorikan dalam beberapa kelompok, seperti: (1) wisata alam, terdiri dari: pantai, pegunungan, goa dan agrowisata; (2) wisata budaya, terdiri dari: petilasan, ziarah, makam, monumen, museum dan situs; (3) wisata buatan, terdiri dari: taman rekreasi dan pemandian, wisata pendidikan, dan sentra industri kerajinan. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35. Sebaran Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No.	Obyek dan Daya Tarik Wisata	Jumlah lokasi
1.	Wisata Alam	
	a. Pantai	6 lokasi
	b. Pegunungan	2 lokasi
	c. Goa	7 lokasi
	d. Agrowisata	3 lokasi
2.	Wisata Budaya	
	a. Petilasan/Ziarah	12 lokasi
	b. Monumen	7 lokasi
	c. Makam/Ziarah	14 lokasi
	d. Museum	4 lokasi
	e. Situs	12 lokasi
3.	Wisata Buatan	
	a. Taman Rekreasi dan pemandian	6 lokasi
	b. Wisata Pendidikan	5 lokasi
	c. Sentra Industri Kerajinan	37 lokasi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bantul, 2009

Pertumbuhan jumlah obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul dalam beberapa tahun terakhir tidak begitu signifikan, yang terjadi hanya penambahan dan perbaikan beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana pada obyek atau kawasan wisata. Beberapa kawasan wisata yang sudah dibangun, diperlukan

terobosan kebijakan agar bisa kembali berjalan seperti perencanaan semula. Kawasan wisata GMT (Gabusan-Manding-Tembi) dan Kajigelem misalnya, keberadaan dan peranan Pasar Seni Gabusan sebagai pusat promosi dan penjualan produk kerajinan kurang berfungsi dengan semestinya, sehingga tidak dapat mendukung kawasan GMT sebagai mana telah direncanakan.

Tabel 36. Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Obyek Wisata
1	Kretek	Desa Parangtritis	- Pantai Parangtritis - Pantai Parangkusumo - Pantai Depok - Cepuri Parangkusumo - Gumuk Pasir - Lab. Geospasial - Makam Syeh Bela Belu - Makam Syeh Maulana Maghribi - Pemandian Parangwedang
2	Sanden	Desa Sri Gading	- Pantai Samas - Pantai Patehan
3	Srandakan	Desa Poncosari	- Pantai Pandansimo - Pantai Kwaru
4	Pajangan	Desa Guwosari	- Goa Selarong
		Ds. Sendangsari	- Desa Wisata Kreet
5	Imogiri	Ds. Selopamioro	- Goa Cerme
		Desa Girirejo	- Kerajinan Keris - Makam Pangeran Pekik
		Desa Wukirsari	- Makam Seniman Girisapto - Kerajinan Batik - Tatah Sungging - Makam Raja-Raja Mataram
		Ds. Kebonagung	- Kerajinan Tatah Sungging - Desa Wisata Kebonagung
6	Bantul	Desa Tirenggo	- KR Tirtatamansari
		Desa Sabdodadi	- Desa Wisata Manding
7	Pundong	Desa Seloharjo	- Goa Jepang - Kerajinan Keramik
8	Dlingo	Desa Mangunan	- Goa Gajah - Kebun Buah Mangunan
9	Sewon	Desa Timbulharjo	- Pasar Seni Gabusan - Desa Wisata Tembi
10	Kasihan	Desa Bangunjiwo	- Desa Wisata Kasongan - Kerajinan Tatah Batu Lemahdadi - Kerajinan Tatah Sungging
11	Pandak	Desa Wijirejo	- Kerajinan Batik
12	Banguntapan	Desa Baturetno	- Taman Rekreasi Air Balong - Museum Wayang Kekayon

Sumber: Disbudpar Kabupaten Bantul, tahun 2010

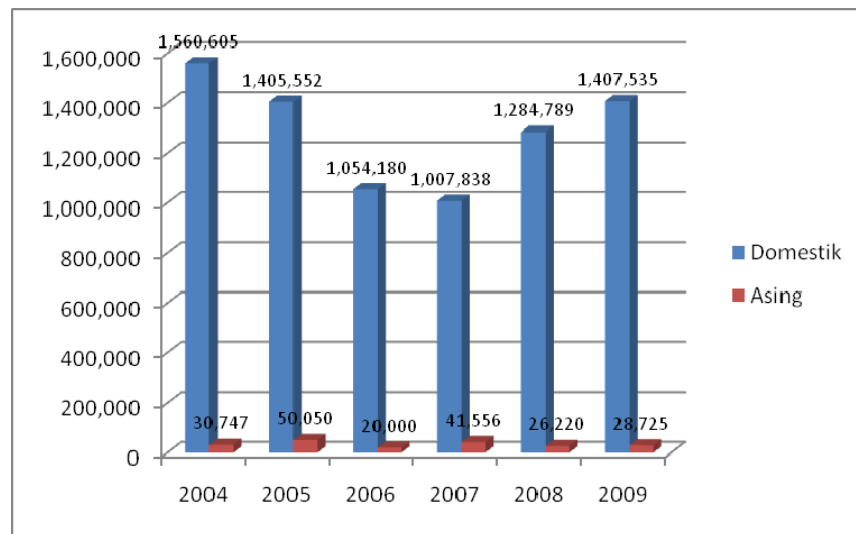
Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata dapat ditinjau dari jumlah kunjungan wisatawan. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul tahun 2004–2009 disajikan pada Tabel 37 dan perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Bantul tahun 2004–2009 disajikan pada Grafik 1.

Tabel 37. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009

Wisatawan	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Domestik	1.506.605	1.405.552	1.054.180	1.007.838	1.284.789	1.407.535
Asing	30.747	50.050	20.000	41.556	26.220	28.725
Jumlah	1.537.352	1.455.602	1.074.180	1.049.394	1.311.009	1.436.260
Pertumbuhan		-5,32	-26,20	-2,31	24,93	9,55

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2004 - 2009



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

Dari Tabel 39 dan Grafik 1 dapat diketahui bahwa secara umum jumlah kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan dari 1.506.605 wisatawan menjadi 1.007.838 kunjungan (turun 33,10%) pada tahun 2007. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2008 dan 2009, hingga mencapai 1.407.535 wisatawan. Penurunan jumlah wisatawan ini bisa dimaklumi, karena pada tahun 2006 Kabupaten Bantul dilanda Gempa Bumi dan mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur daerah. Seirama dengan wisatawan domestik, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten

Bantul juga mengalami fluktuasi penurunan pada tahun 2006. Untuk tahun 2008 dan tahun 2009 kunjungan wisatawan asing sudah meningkat yaitu 26.220 dan 28.725 kunjungan wisatawan asing.

Jumlah ketersediaan akomodasi berupa hotel bintang dan non bintang, sebagai pendukung pariwisata di Kabupaten Bantul yang tersebar di 17 kecamatan mencapai 230 unit. Kecamatan Kretek merupakan pemilik akomodasi paling banyak (251 unit). Hotel bintang hampir tidak ada di ditemui di wilayah Kabupaten Bantul, umumnya adalah hotel non- bintang. Kalau melihat kondisi yang ada saat ini, wisatawan tidak terlalu mementingkan apakah hotel tersebut bintang ataupun non bintang.

0.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH

0.3.1. Kependudukan

Salah satu faktor penting dalam aspek kependudukan yang menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan adalah angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 38. Dari Tabel 38 tersebut dapat diketahui bahwa angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yaitu dari 2,19% (tahun 2005) menjadi 1,41% (tahun 2009). Kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

Tabel 38. Angka Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	TH	JUMLAH PENDUDUK BERDASAR KELOMPOK UMUR								JUMLAH	Pertumb (%)
		0 -9 TH		10 -19 TH		20 - 39 TH		> 40 TH			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2005	64.746	63.083	66.377	68.502	148.884	148.059	144.284	167.268	871.203	2,19
2	2006	64.359	64.240	71.752	68.913	142.848	144.528	152.721	174.725	884.086	1,48
3	2007	63.922	65.407	77.275	69.315	136.520	140.871	161.367	182.317	896.994	1,46
4	2008	64.835	66.341	78.379	70.305	138.471	142.884	163.674	184.923	909.812	1,43
5	2009	65.338	68.134	69.168	67.955	143.063	142.134	178.025	188.749	922.566	1,41

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2010

Selain itu, dari Tabel 40 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Bantul memiliki kecenderungan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Bantul berusia di atas 40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.

0.3.2. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bantul sebanyak 30.853 orang atau 8% dari jumlah angkatan kerja. Berdasar data jumlah pencari kerja, penduduk yang menganggur dan mencari kerja itu dari tahun ke tahun bervariasi. Selama tahun 2005-2009 pencari kerja terbanyak terjadi pada tahun 2008 yang mencapai mencapai angka 14.786 orang dan terendah tahun 2006 sebanyak 7.471 orang. Sedikitnya pencari kerja pada tahun 2006 terkait dengan kejadian gempa yang menimpa penduduk Bantul.

Masalah pelik ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul adalah para pencari kerja ini sebagian besar justru mereka yang berpendidikan (lihat Tabel 39). Lulusan terbanyak pencari kerja adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana S1), diikuti oleh lulusan sekolah menengah kejuruan dan Diploma III/IV baru SMA. Sementara itu mereka yang lulusan SD dan SMP cenderung tidak mencari pekerjaan. Persoalan ini menjadi indikasi serius lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun.

Tabel 39. Jumlah dan proporsi Penduduk Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2009

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
1	Sekolah Dasar	26	0,1
2	Sekolah Menengah Pertama	341	2,59
3	Sekolah Menengah Atas Umum	1.937	14,75
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	3.908	29,76
5	Diploma 1 dan 2	239	1,82
6	Diploma 4 dan 4	2.066	15,73
7	Sarjana S1	4.584	34,26
8	S2 dan S3	30	0,2
	Jumlah	13.131	100

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2010

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul yang berkerja sebagian besar bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri (lihat Tabel 40). Jika angka ini dikaitkan dengan pangsa sektor tersebut untuk menghasilkan nilai tambah (PDRB) maka terlihat bahwa penduduk juga terdistribusi secara relatif merata. Sektor pertanian yang menghidupi 25,56% penduduk menghasilkan PDRB sekitar 24,32%, sementara itu perdagangan dengan penduduk sebanyak 21,16% menghasilkan nilai tambah sekitar 19,76% dan industri dengan penduduk sebanyak 18,95% menghasilkan PDRB sekitar 16,16%.

Tabel 40. Penduduk Berdasar Mata Pencaharian Utama Tahun 2009

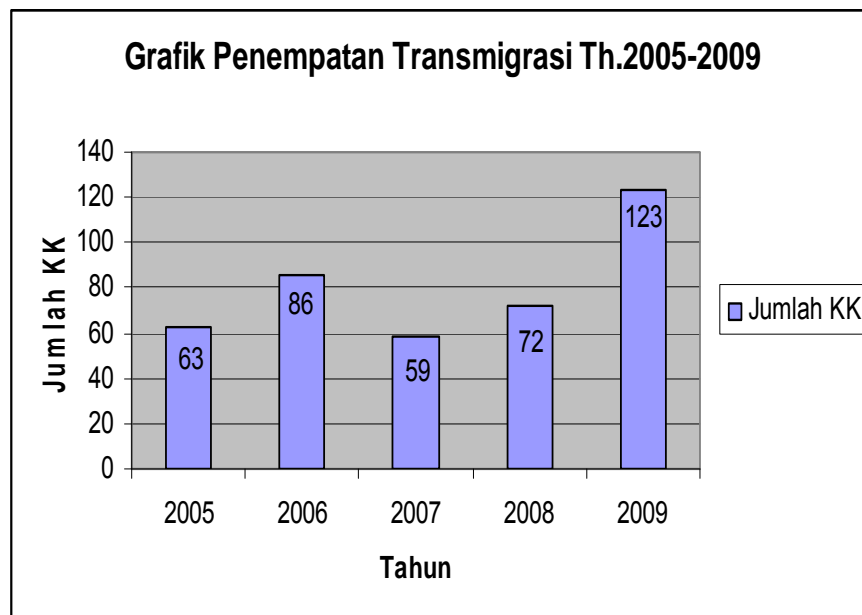
No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1	Pertanian dan	25,56
2	Pertambangan dan	1,98
3	Industri	18,95
4	Listrik, gas, dan air	0,07
5	Konstruksi	8,88
6	Perdagangan	21,16
7	Komunikasi/transportasi	4,64
8	Keuangan	1,61
9	Jasa	16,89
10	Lainnya	0,27
	Jumlah	100,00

Sumber: BPS Kab. Bantul, 2010

0.3.3. Transmigrasi

Sejalan dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, maka transmigrasi tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah pengirim dan penerima transmigran, sementara pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator. Kabupaten Bantul yang sebagian merupakan wilayah tandus menjadi salah satu pendorong terus berjalanya transmigrasi dari Kabupaten Bantul ke berbagai wilayah di Indonesia. Adapun jumlah kepala keluarga yang ditempatkan di sejumlah kabupaten dari tahun 2005–2009 mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 63 KK pada tahun 2005 menjadi 123 KK pada tahun 2009 telah ditempatkan di sejumlah kabupaten. Grafik berikut menggambarkan jumlah KK yang telah ditempatkan di daerah tujuan selama tahun 2005 -2009.

Grafik 2. Penempatan Transmigrasi dari Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009



Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2010, data diolah

Sedangkan jika dilihat dari pendidikannya maka penduduk yang bertransmigrasi dari Kabupaten Bantul sebagian besar berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hanya satu persen saja sarjana yang melakukan transmigrasi.

Tabel 41. Jumlah Transmigran dari Bantul Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2008

Pendidikan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Tidak lulus SD	80	20,35
Lulus Sd	154	39,18
Lulus SMP	80	20,35
Lulus SMA	75	19,08
Sarjana	4	1,01

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2010, data diolah

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan transmigrasi diperlukan pemetaan fungsi kantong daerah asal transmigrasi. Daerah rawan bencana misalnya merupakan daerah potensial sebagai sumber pengiriman transmigrasi. Diperlukan identifikasi potensi pengerahan transmigrasi secara detail, tipologi daerah asal, profil calon transmigran, minat bertransmigrasi adalah beberapa informasi yang sangat berguna dalam rangka peningkatan pengelolaan transmigrasi.

0.3.4. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial di suatu wilayah sangat terkait dengan kuantitas penduduk dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni budaya, dan keagamaan. Kuantitas penduduk Kabupaten Bantul telah dibahas pada sub bab terdahulu. Pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bantul masih tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada tahun 2008, IPM Kabupaten Bantul mencapai angka 73,38, meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 72,78. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007 dan 2008

Prop/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup		Rata-rata Lama Sekolah		Angka Melek Huruf		Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan		IPM		Peringkat		Reduksi Shortfall	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
(1)														
D.I. Yogyakarta	73,17	73,11	8,59	8,71	87,78	89,46	639,88	643,25	74,19	74,88	4	4	1,83	2,81
01. Kulonprogo	73,35	73,79	7,80	7,80	88,69	88,72	624,09	628,29	72,69	73,26	108	110	2,43	1,86
02. Bantul	70,95	71,11	8,36	8,55	88,46	88,60	637,79	642,19	72,78	73,38	106	102	2,89	2,20
03. Gunungkidul	70,85	70,79	7,76	7,60	84,50	84,50	617,70	621,67	69,85	70,00	238	255	1,37	1,07
04. Sleman	73,85	74,43	10,26	10,10	91,49	91,49	640,60	645,15	76,68	77,24	15	15	1,89	2,29
71. Yogyakarta	73,17	73,27	10,95	11,42	97,55	97,70	640,66	645,10	78,16	78,95	2	2	1,58	3,68

Sumber: BPS Bantul, 2009

Tingginya IPM yang dicapai Bantul bukan berarti tidak ada masalah sosial. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bantul relatif cukup besar. Secara rinci kondisi PMKS tahun 2009 yang dominan dapat digambarkan dalam Tabel 43.

Penyandang masalah sosial di Kabupaten Bantul ditangani melalui program-program antara lain bantuan sosial kemasyarakatan, penyuluhan PMKS, dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba.

Selain data penyandang masalah sosial (PMKS) sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang bisa memberikan kontribusi/dorongan perbaikan terhadap penyandang masalah sosial. Disamping itu juga terdapat potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagaimana disajikan pada Tabel 44.

Tabel 43. Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Tahun 2009

No	Jenis PMKS	2009
1	Anak Balita Terlantar	699
2	Anak Terlantar	5.795
3	Anak Nakal	239
4	Anak Jalanan	232
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.871
6	Korban Tindak Kekerasan	1.051
7	Lanjut Usia Terlantar	3.900
8	Penyandang Cacat	7.957
9	Tuna Susila	45
10	Pengemis	119
11	Gelandangan	72
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	827
13	Korban Penyalahgunaan Napza	553
14	Keluarga Fakir Miskin	49.157
15	Keluarga Tinggal di Rumah Tdk Layak Huni	3.821
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	575
17	Komunitas Adat Terpencil	0
18	Korban Bencana Alam	21
19	Korban Bencana Sosial	3
20	Pekerja Bermasalah Sosial/Terlantar	477
21	Penyandang HIV/AIDS	93
22	Keluarga Rentan	21.488

Sumber: Dinas Sosial, 2010

Permasalahan kesejahteraan sosial yang lain adalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender di Kabupaten Bantul tidak jauh berbeda dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Sumber utama permasalahan tersebut adalah sebagian besar berakar pada budaya paternalistik dan primordial yang cenderung mendistorsi terhadap kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan (sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, budaya, hankam, dan lain-lain).

Tabel 44. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2009

No	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	534
2	Keperintisan dan Kepahlawanan	807
3	Organisasi Sosial (Orsos)	57
4	Karang Taruna (KT)	75
5	Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	16
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	8

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul Th 2010.

Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan telah dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Sebagai gambaran pencapaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Indeks Pemberdayaan Gender

Thn	DIY		Yogyakarta		Bantul		KP		GK		Sleman	
	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank	Angka	Rank
2004	62,3	2	73,8	1	60,7	36	47,5	223	56,1	96	63,1	18
2005	62,4	2	73,8	3	61,7	33	47,5	247	54,6	128	63	25
2006	62,4	6	74,2	4	63,3	38	59,8	84	56,4	143	62,7	45
2007	62,7	8	74,3	4	63,6	41	60,1	87	57,8	134	62,8	49

Sumber: BPPM Provinsi DIY, 2010

0.3.5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama.

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang besar pengaruhnya secara berurutan, yaitu (1) faktor lingkungan, (2) faktor perilaku, (3) faktor pelayanan kesehatan dan (4) faktor keturunan (Hendrik L. Blum).

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH),

Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status gizi masyarakat.

1) Indikator Kematian Ibu dan Anak

Indikator yang penting untuk mengukur kapasitas pelayanan kesehatan adalah kematian yang dianggap tidak diharapkan. Kematian wajar termasuk yang disebabkan kondisi kelainan sejak lahir dan karena lanjut usia. Kematian pada usia muda (bayi dan Balita) dan kematian karena kehamilan, persalinan dan masa nifas termasuk kondisi yang tidak diharapkan. Kondisi kematian semacam itu dalam situasi yang wajar dapat diatasi oleh sistem pelayanan kesehatan, sehingga suatu daerah bisa mempelajari kemampuan sistem pelayanannya. Sektor kesehatan dunia menyepakati bahwa kematian ibu dan kematian anak merupakan agenda kesehatan internasional karena pandangan hak asasi. Pandangan hak asasi ini menegaskan bahwa kematian ibu dan anak bertentangan dengan asas kemanusiaan. Kesepakatan ini tertuang dalam Millenium Development Goal's (MDG's), yaitu menurunkan angka kematian anak (target 4), dan meningkatkan kesehatan ibu (target 5).

Angka kematian ibu karena proses kehamilan, persalinan dan masa nifas serta Angka Kematian pada Bayi dan Balita dapat dilihat pada tabel berikut. Jumlah kematian ibu karena proses persalinan pada tahun 2009 adalah 18. Kabupaten Bantul memiliki kontribusi 37,5% terhadap jumlah kematian ibu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki Angka Kematian Ibu lebih tinggi dari angka untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (158 versus 109).

Tabel 46. Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	KAB. BANTUL, TAHUN					DIY
		2005	2006	2007	2008	2009	TH. 2009
1	Proporsi Kematian Bayi/1.000 KH	7,9	9,8	7,69	13,23	11,8	7,54
2	Proporsi Kematian Balita/1.000 Balita			0,39	0,12	0,19	0,82
3	Proporsi Kematian Ibu/100.000	114	84	47,14	140,13	158,29	109
4	Umur Harapan Hidup :						
	Pria(th)	70	70	71	71	71	
	Wanita (th)	72	72	72	72	72	

Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Bantul, 2010

Status kesehatan penduduk di atas ini bisa ditafsirkan dengan dua cara. Jika status kesehatan penduduk seperti angka di atas dianggap wajar, maka kondisi yang mendukungnya adalah perbedaan ciri-ciri sosial demografi dari daerah ini dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dianggap tidak wajar, maka kinerja sistem pelayanan kesehatan di Bantul lebih buruk daripada daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika demikian, maka kapasitas pelayanan kesehatan harus dipelajari.

Disisi lain, dapat juga dikatakan bahwa sistem surveilens di Bantul sudah lebih baik daripada daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Kondisi Penyakit di Bantul

Selain indikator kematian ibu dan anak, penderita dengan berbagai penyakit yang memerlukan pertolongan tetap tinggi. Penyakit-penyakit infeksi seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), atau pun diare yang tidak memperoleh layanan pengobatan yang efektif dapat berpotensi menjadi wabah dan krisis sosial. Penyakit leptospirosis mulai muncul. Penyakit TBC menyebar di seluruh desa, namun angka penemuan kasus masih sangat rendah. Penyakit DBD merebak bahkan meningkat diluar desa endemis yang berbatasan dengan kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi penyakit tidak menular terutama penyakit degeneratif di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Hal ini menyebabkan beban ganda Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bantul, yaitu selain penanganan terhadap penyakit infeksi harus terus diintensifkan, tindakan pencegahan terhadap meningkatnya penyakit tidak menular juga harus dilaksanakan.

Tabel 47. Angka Kesakitan Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	JENIS PENYAKIT	IR/1.000					
		2005	2006	2007	2008	2009	NASIONAL
1	DBD	0,26	0,6	0,7	0,45	0,67	0,3
2	Diare	11,74	12,29	14,88	15,01	12,75	33
3	Malaria	0	0	0	0	0	1
4	Kusta			0,0096	0,0085	0,007	0,001
5	IMS (Sipilis pd risti)	11,8	37,03	14,89	10,12	72,07	10
6	Penanganan Pneumonia (Balita)	100	100	100	100	100	100
7	HIV (+) kasus	11	13	17	36	43	
	AIDS						
8	Tetanus Neonatorum	0	0	0	0	0	0
9	Suspek (kasus) TB						
	Perkiraan BTA (+) kasus	521	521	521	521	521	
	BTA (+) kasus	173	247	235	258	260	
	TB BTA (+) %	33,86	47,4	45,11	49,52	49,90	70
	Angka Kesembuhan	83,24	88,06	88,06	88,27	84,94	85 %
10	Imunisasi Dasar	96,99	95,03	96,39	95,97	99,4	80
11	Leptospirosis (kasus)	0	0	0	0	1	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010

Keterangan : IR= Incidens Rate

MS = Infeksi Menular Seksual

Pola penyakit yang ada di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, terlihat pada kejadian penyakit tidak menular mulai mendominasi pasien rawat jalan di RS seperti Hipertensi (17,43%) dan Diabetes mellitus (10,32%).

Tabel 48. Sepuluh Besar Pola Penyakit Kasus Rawat Jalan di RSU Panembahan Senopati Untuk Semua Golongan Umur Tahun 2009

NO	NAMA PENYAKIT	KASUS BARU	
		JUMLAH	%
1	Hipertensi	10.784	17,43
2	Diabetes Mellitus	6.384	10,32
3	Dyspensia	5.292	8,55
4	PKTB	4.231	6,84
5	Low Back Pain (LBP)	3.408	5,51
6	Post Operasi	2.889	4,67
7	Decom Cordis	2.547	4,56
8	ISK	2.290	4,12
9	Keur Umum	2.290	3,70
10	Osteoarthritis	2.206	3,57

Sumber Data : SP2RS

Dari data pasien rawat inap di RSUD pada tabel 49 terlihat bahwa penyebab utama kematian untuk semua golongan umur adalah stroke (17,84%). Angka ini secara umum menunjukkan penyakit degeneratif sudah menjadi masalah yang cukup serius disamping penyakit-penyakit infeksi. Namun angka ini tidak bisa menggambarkan pola penyebab kematian secara menyeluruh di Kabupaten Bantul, karena data tersebut hanya yang ada di rumah sakit sehingga sampelnya sangat spesifik. Sedangkan pola penyebab kematian di masyarakat belum dimiliki.

Tabel 49. Sepuluh Besar Pola Kematian Menurut Penyakit Ranap di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2009

NO	NAMA PENYAKIT	KASUS	
		JUMLAH	%
1	Stroke	84	17,84
2	Decompensasio Cordis	31	6,58
3	Dyspnoe	28	5,94
4	Syok Kardiogenik	25	5,31
5	KP/TBC	21	4,46
6	Diabetes Militus	20	4,25
7	CKD	18	3,82
8	Syok Septik	15	3,18
9	Pneumonia	10	2,12
10	AMI	8	1,70

Sumber Data : SP2RS

3) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Kesehatan reproduksi memiliki dua sisi, yaitu sisi kesehatan anak dan kesehatan perempuan. Sistem kesehatan yang gagal memprioritaskan pelayanan kesehatan reproduksi mengakibatkan kematian ibu pada masa hamil, persalinan dan masa nifas serta kondisi yang merugikan kepentingan perempuan. Pada sisi yang lain, perempuan pada masyarakat kini memiliki peran yang penting dalam ranah publik. Peran itu terganggu jika pelayanan kesehatan reproduksi tidak terpenuhi. Pelayanan kesehatan reproduksi mewakili penghargaan terhadap hak asasi manusia baik dari kepentingan anak maupun perempuan.

Jumlah penduduk merupakan aset yang penting bagi ekonomi daerah. Meski demikian jumlah yang tidak seimbang dengan kapasitas pelayanan publik untuk mengembangkan mutu penduduk dapat merugikan daerah. Keluarga berencana merupakan salah satu strategi kunci dalam mengontrol kelebihan penduduk. Jika melihat kapasitas layanan publik saat ini, penekanan angka kelahiran masih diperlukan agar Kabupaten Bantul bisa menekankan peningkatan kualitas hidup dari jumlah penduduk yang ada. Tabel di bawah ini menyajikan indikator umum kepesertaan keluarga berencana yang telah berhasil.

Tabel 50. Kepesertaan Keluarga Berencana Tahun 2009

Indikator Keluarga Berencana	Persentase
Peserta KB Baru	8.78
Peserta KB Aktif	76.34
Peserta KB Aktif (MKJP + Non MKJP)	100.00
Peserta KB Baru (MKJP + Non MKJP)	100.00

Sumber data :

Keterangan: MKJP = Metode kontrasepsi jangka panjang

Data kepesertaan ini menunjukkan program keluarga berencana memiliki kapasitas yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga di bidang keluarga berencana, meskipun masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang belum menggunakan konsep keluarga berencana, sehingga masih ada ibu hamil dengan faktor resiko “4 T”, yaitu terlalu muda (umur kurang dari 20 tahun) sebanyak 10,3%, terlalu tua (umur lebih dari 35 tahun) sebanyak 11,24%, terlalu sering (jarak kehamilan kurang dua tahun) sebanyak 5,5%, dan terlalu banyak (anak lebih dari empat) sebanyak 2,07%.

4) Masalah Gizi Anak dan Masyarakat

Anak merupakan masa persiapan untuk menjadi manusia dewasa yang berkualitas dan produktif. Kegagalan perkembangan anak mengakibatkan kualitas penduduk dewasa yang lemah dalam berbagai aspek. Hal ini dimulai dari kondisi ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Program pengentasan gizi buruk merupakan kewajiban dari semua *stakeholders*, baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan, dll. Strategi perbaikan gizi yang berbasis peternakan, perikanan dan kebun keluarga yang dikelola bersama antara SKPD terkait merupakan kunci kemandirian bidang pangan. Selain itu, dua program rutin mengenai gizi yang dominan hingga sekarang adalah (1) kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan dan Penyuluhan di pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang terintegrasi dalam layanan *Antenatal Care* dan penimbangan balita dan (2) Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang dilakukan di sekolah dengan melibatkan peran TP-PKK di semua tingkat.

Tabel 51. Status Gizi di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	URAIAN	TAHUN					Standar
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	KEP Balita :						
	Nyata	1,02	0,74	0,87	0,62	0,33	2%
	Ringan	9,76	11,86	12,53	10,58	10,87	15%
	Total	10,72	12,60	13,40	11,20	11,31	20%
2	BBLR		5,40	3,20	5,03	5,17	4%
3	Anemia Gizi Besi Bumil	16,4	21,55	14,30	26,71	60,0	50%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010

Status kekurangan gizi mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Gizi buruk tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga bisa membuat anak mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang berat akan memperparah status gizi anak. Tabel di atas menunjukkan beberapa indikator tentang gizi anak. Yang terpenting dari informasi di bawah adalah yang berkaitan dengan penimbangan balita dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Hasil pemantauan status gizi terhadap balita pada tahun 2005 masih terdapat 10,72% yang termasuk dalam kategori KEP (Kurang Energi Protein) dengan kecenderungan mengalami kenaikan dan pada tahun 2009 menjadi 11,31%. Hal ini masih perlu diwaspadai, walaupun prevalensi Kurang Energi Protein secara total sudah berada dibawah standar yang ditetapkan.

Hasil pelaksanaan cakupan program perbaikan gizi Kabupaten Bantul dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 52. Cakupan Program Perbaikan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

INDIKATOR	CAKUPAN (%)					TARGET
	2005	2006	2007	2008	2009	
D/S	72,91	72,00	75,02	75,34	74,44	80
N/D	58,1	61	62,23	59,20	56,94	70
Fe-3 Ibu hamil	81,37	65,91	72,40	76,23	82,07	80
Vit. A Bufas	85,18	66,79	96,80	97,03	85,57	100
Vit A Bayi	88,99	81,46	91,34	94,58	97,12	100
Vit. A Balita	82,78	88,22	95,52	97,87	96,50	90
Kapsul Yodium Bumil	92,88	76,67	96,80	Tidak ada kapsul		100
Pemantauan garam Yodium (Desa Baik)	66,79	96,8	97,03	85,57	81,69	80

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010

Keterangan : D/S = Balita yang ditimbang di Posyandu dibanding dg jumlah Balita yang ada

N/S = Balita yang naik berat badannya dibanding dengan jumlah Balita yang ada

Berdasarkan hasil cakupan diatas terlihat bahwa sebagian besar pencapaian indikator program gizi belum dapat mencapai target yang ditentukan walaupun untuk pencapaian tahun 2009 sudah mengalami beberapa peningkatan terutama untuk pemberian vitamin A dan Fe. Pencapaian indikator tersebut sangat membutuhkan partisipasi masyarakat di Posyandu.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam kegiatan Posyandu, perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan.

5) Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

• Sarana Kesehatan

Kabupaten Bantul memiliki sejumlah pelayanan kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas rawat inap dan rawat jalan, serta perangkat tenaga kesehatan yang bekerja sebagai pemberi layanan kesehatan primer. Pemberi layanan primer swasta yang telah banyak bertambah. Kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul tahun disajikan pada Tabel 55.

Tabel 53. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009

NO	JENIS SARANA	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Puskesmas Non TT	18	15	10	11	11
2	Puskesmas TT	8	11	16	16	16
	Jumlah TT	76	110	160	160	160
	Rasio puskesmas/pddk	1 : 31.152	1 : 31.559	1 : 31.998	1 : 34.479	1 : 34.910
3	Pustu	67	67	67	67	67
	Rasio Pustu/pddk	1 : 12.089	1 : 12.247	1 : 12.417	1 : 13.895	1 : 14.068
4	Pusling	26	26	26	27	27
5	Posyandu	1.092	1.095	1.101	1.113	1.123
	Rasio Posyandu/pddk	1 : 741	1 : 734	1 : 745	1 : 836	1 : 839
6	Poskesdes	0	0	6	10	16
	Rasio Polindes/pddk	0	0	1 : 138.659	1 : 93.095	1 : 58.911
7	Rumah Bersalin	7	15	25	27	28
8	Balai Pengobatan	21	21	60	66	66
9	Tempat Praktek Dokter	166	317	515	515	325
10	Apotek	54	56	66	72	70
11	Rumah Sakit Umum	4	4	4	5	9
12	Rumah Sakit Khusus	2	3	3	2	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan unit pelayanan kesehatan swasta seperti rumah bersalin, balai pengobatan, apotek, dan rumah sakit umum. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, demi peningkatan pelayanan sekaligus melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak bertanggungjawab.

- **Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan tahun 2005 telah mengalami peningkatan yang cukup berarti, jumlah Bidan PNS sebanyak 159 orang, jika dibanding dengan jumlah desa maka rasionya 2,17 : 1, dan telah meningkat menjadi 199 orang pada tahun 2009 ditambah tenaga bidan PTT sebanyak 73 orang. Tenaga Paramedis Perawatan (Perawat dan perawat gigi) ada 184 orang pada tahun 2005, dan telah meningkat menjadi 259 orang di tahun 2009. Dokter gigi PNS 31 orang meningkat menjadi 44 orang pada tahun 2009 dan masih ditambah dokter gigi PTT sejumlah 10 orang. Dokter umum termasuk Dokter PTT sebanyak 63 orang pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 83 orang pada tahun 2009.

Jumlah tenaga kesehatan PNS ini sudah termasuk pegawai yang tugas belajar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 54. Jumlah Pegawai Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	JENIS PENDIDIKAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Dokter Umum	63	63	70	71	83
2	Dokter Gigi	31	31	38	37	44
3	Bidan	159	165	194	195	199
4	Paramedis Perawatan	184	200	240	237	259
5	Pembantu Paramedis	54	0	0	0	0
6	Paramedis Non Perawatan :	106				
	Gizi		32	33	31	29
	Farmasi		41	35	36	37
	Teknis Medis		55	55	47	46
	Sanitarian		51	42	45	42
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	13	28	29	31	32
8	S1 Non Kesehatan	1	18	16	16	17
9	D3 Non Kesehatan		17	10	8	8
10	Pascasarjana	0	14	11	10	14
11	Tenaga Non Kesh (SD, SMP, SMA)	108	195	194	196	191
	Jumlah	719	910	967	966	1002

Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Bantul, 2010

- **Sarana Kesehatan**

Pada umumnya peralatan medis Puskesmas baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih kurang, apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Sarana kesehatan non medis, kondisinya belum memadai, baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, antara lain meja kursi karyawan, komputer, yang perlu dipisahkan untuk Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan administrasi, jaringan online komputer UPT Kesehatan, perangkat audio, dan audio visual aid (AVA).

- **Pembiayaan Kesehatan**

Dengan adanya kebijaksanaan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tiga sumber pendapatan untuk membiayai kegiatannya yaitu :

- (1) Alokasi dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dialokasikan kepada daerah sebagai *unspecified block grant*, sedangkan DAK digunakan untuk keperluan Rehabilitasi Puskesmas/Rumah Sakit dan Pengadaan Sarana/Prasarana,
- (2) Pendapatan dari retribusi,
- (3) Anggaran dari cukai

Tabel 55. Anggaran Kesehatan Rutin dan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2005-2008

No	Sumber Dana	2005		2006		2007		2008	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Anggaran Kesehatan APBD Kab.	16.925.128.415	39	29.755.261.782	53	50.320.127.202	63	59.118.369.344	63
	Pembangunan Rutin/ termasuk gaji	23.299.976.185	54	24.366.016.000	44	29.937.343.000	37	35.013.195.400	37
2	APBN : Pembangunan Rutin/Gaji Via Prop.	3.034.836.757	7	1.685.581.100	3				
Jumlah									
	Pembangunan Rutin	19.959.965.172	46	31.440.842.882	56	50.320.127.202	63	59.118.369.344	63
	Total Dana Kesehatan	23.299.976.185	54	24.366.016.000	44	29.937.343.000	37	35.013.195.400	37
		43.259.941.357	100	55.806.858.882	100	80.257.470.202	100	94.131.864.744	100
3	Anggaran APBD	424.914.879.019	100	595.956.853.508	100	676.890.054.61	100	1.040.092.602.101	100
	Biaya Kes.DAU PAD	40.225.104.600	9	54.121.277.782	9	3	12	94.131.864.744	9
						80.257.470.202			

Sumber Data : Perda Kab. Bantul No. 05 Th 2005, Profil Kesehatan Bantul & Study DHA Kab. Bantul 2008.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa alokasi dana untuk pembiayaan kesehatan mencapai 9% dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan demikian perlu pemikiran lebih lanjut untuk mempersiapkan strategi ke depan terhadap pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bantul dalam era

otonomi sepenuhnya tergantung kepada daerah, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

6) Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah rumah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebanyak 183.182 rumah, meningkat pada tahun 2009 menjadi 204.781. Jumlah rumah yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 32.659 (15,59%) rumah, dimana 62,96% masuk dalam kategori rumah sehat.

Tabel 56. Kualitas Perumahan, Jamban, dan SPAL di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009

NO	TAHUN	2005	2006	2007	2008	2009
1	% Rumah Sehat	50.94	55.75	65.98	58.08	62.96
2	% Jamban Sehat	83,78	64.58	64.20	64.50	83.64
3	% SPAL Sehat	74.32	64.50	64.20	64.50	74.84

Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Bantul, 2010

Jumlah keluarga di Kabupaten Bantul tahun 2009 yang diperiksa akses air bersihnya dilaporkan sebanyak 16,44%, dimana hasilnya adalah seluruh keluarga yang diperiksa akses air bersih 59,64% memiliki akses air bersih dengan memanfaatkan sumur gali.

Jumlah keluarga yang memiliki jamban dilaporkan sebanyak 69,73%, yang memenuhi syarat jamban sehat sebanyak 83,65%.

Kepemilikan tempat sampah dilaporkan sebanyak 77,35%, yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 81,72%

Pada pengelolaan limbah rumah tangga, dilaporkan sebanyak 68,36% KK sudah memiliki sarana pengelolaam limbah rumah tangga, dimana yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 74,84%.

Dalam rangka upaya pencegahan penyakit yang dibawa oleh nyamuk di Kabupaten Bantul dilakukan kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN), dilaporkan bahwa 6,59% rumah atau bangunan yang diperiksa keberadaan jentik nyamuknya. Hasil pemeriksaan ditemukan sebanyak 79,12% rumah atau bangunan bebas dari jentik nyamuk.

7) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Semesta

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul yang telah tercakup dalam jaminan kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 227.305 jiwa, yang terdiri dari (1) Jamkesmas untuk masyarakat miskin sebesar 134.195 jiwa, (2) Askes PNS sebanyak 83.573 jiwa, dan (3) Jamsostek sebanyak 9.537 jiwa.

Sebanyak 683.267 jiwa penduduk Bantul belum memiliki jaminan kesehatan. Dalam rangka program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Semesta (Jamkesta), diharapkan pada tahun 2015 semua penduduk di Kabupaten Bantul sudah dicakup dengan jaminan pemeliharaan kesehatan.

8) Manajemen dan Informasi Kesehatan

Manajemen kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari sisi manajemendi tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah dapat berjalan secara optimal. Dinas Kesehatan sebagai penyusun kebijakan dan koordinasi pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten Bantul sejak Desember 2009 mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 07 Tahun 2010.

Dalam organisasi Dinas Kesehatan Bantul, terdapat jabatan eselon III (5 orang, yaitu sekretaris dan 4 kepala bidang) dan eselon IVa (15 orang, yaitu 3 orang kepala sub bagian dan 12 orang kepala seksi).

Kepala Puskesmas di Kabupaten Bantul telah terpenuhi sebanyak 27 orang, bahkan pada bulan Pebruari 2010, seluruh Puskesmas telah memiliki kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Sistem informasi manajemen kesehatan, telah dimulai pada bulan April 2010 dengan menggunakan komputer, khususnya pada bagian pelayanan pasien dalam gedung Puskesmas. Sistem yang digunakan yaitu *Integrated Health Information System (IHIS)* yang dikembangkan sejak tahun 2007 dan *e-Health* yang dikembangkan sejak tahun 2009 melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemmenkominfo). Integrasi data dari sistem IHIS maupun e-Health telah dilakukan, namun belum dapat *real time online* dan sebagian masih dengan cara manual. Namun demikian, permasalahan ini tidak mengurangi upaya penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan sebagai upaya pemecahan masalah dengan pendekatan *evidence based*, hanya perlu ditingkatkan secara optimal, seperti pengambilan keputusan dalam waktu segera untuk penanggulangan penyakit menular, KLB dan wabah penyakit, gizi buruk dan lain-lain diupayakan dapat dilakukan dengan segera sesuai dengan informasi yang ada.

0.3.6. Pendidikan

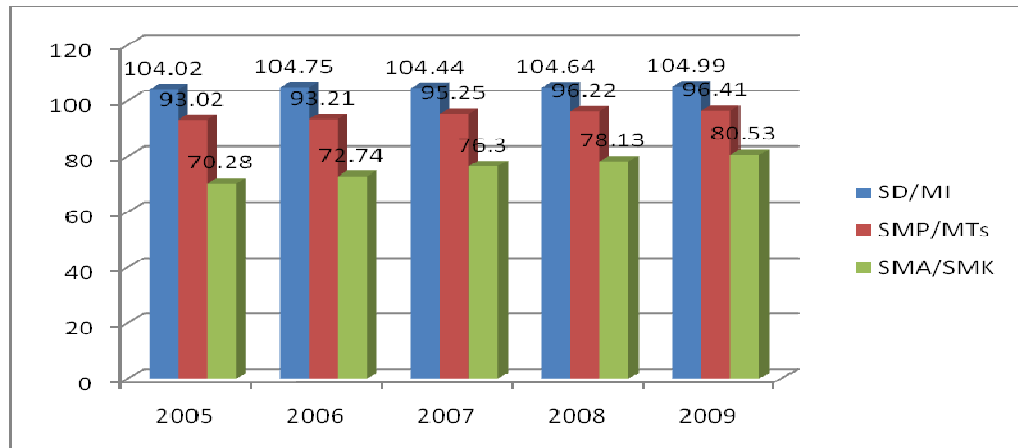
Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bantul telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi sekolah (APS), angka putus sekolah, dan angka melek huruf.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran umum mengenai banyaknya anak yang sedang menerima pendidikan pada

jenjang tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Grafik 3.

Grafik 3. APK di Kabupaten Bantul Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 - 2009



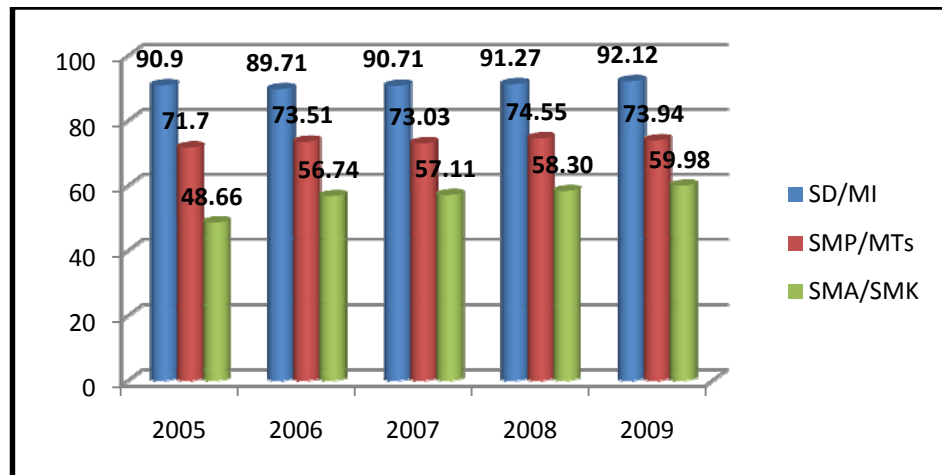
Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010

Dari Grafik 3 tersebut dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005–2009 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan APK tersebut menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Grafik 4

Grafik 4. APM di Kabupaten Bantul pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2005 – 2009



Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010

Dari Grafik 4 dapat dilihat bahwa APM di Kabupaten Bantul pada tahun 2005–2009 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk

3) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan indikator yang mencerminkan anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 57.

Tabel 57. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2006/2007 – 2008/2009

Indikator	2006/2007	2007/2008	2008/2009
SD	0,09	0,08	0,07
MI	0,09	0,14	0,08
SMP	0,33	0,40	0,20
MTs	0,92	1,2	0,44
SMA	0,41	0,25	0,09
MA	0,75	3,23	0,05
SMK	1,72	3,00	0,49

Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010

4) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk :

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2009 disajikan pada tabel 58.

Tabel 58. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2009

Uraian	2006	2007	2008	2009
Jumlah Melek Huruf (orang)	789.575	815.913	902.166	709.499
Persentase Melek Huruf (%)	98,34	98,71	99,15	99,60
Jumlah Penduduk seluruhnya (orang)	802.894	826.546	909.812	712.351

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada tahun 2006–2009 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Bantul.

0.3.7. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian. Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2009 disajikan pada Tabel 59.

Tabel 59. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No.	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
1	Bintang Mataram	Jl. Ringin putih 500 B Perum Depag Kotagede telp. 378620	Org. informal	Teater kontemporer
2	Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI)	Purek III ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. informal	Musik tradisional, musik kontemporer, teater, tari, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra
3	Dagelan Mataram Baru (DMB)	Desa Kerajinan Keramik Kasongan	Org. informal	Teater tradisional
4	Forum Kesenian Indonesia	Jotawang, Bangunharjo Telp. 385137	Yayasan	Teater kontemporer, pendamping dan pelatihan sastra
5	Institut Seni Indonesia	ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. informal	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antropologi
6	Kelompok Jendela	Kersan No. 211 RT 08 / 05 Tirtonirmolo Telp.08122965526	Org. informal	Seni lukis kontemporer, seni patung kontemporer, instalasi, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropologi, lingkungan, hukum, politik dan social
7	Keroncong Sinten Remen	Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	musik tradisional dan kontemporer
8	Komunitas Angkringan	Jl. Nitiprayan 50 Ngestiharjo RT 01/RW 01 Kode pos 55182	Org. informal	Musik kontemporer, teater kontemporer, tari kontemporer, sastra, tradisi lisan, entomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antropologi
9	Gentong Potters	Soboiman Gg. Kemuning no. 232 RT 06 / 29 Ngestiharjo 55182 Telp. 418261 Fax. 381217	Org. informal	Keramik
11	Komunitas Kethoprak Lesung Yogyakarta	Perum Sewon Indah C-17 Kode Pos 55188	Org. informal	Teater tradisional
12	KUA Etnika Komunitas Seni	Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	Musik tradisional dan kontemporer

No.	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
13	Lembaga Penelitian Seni Indonesia Yogyakarta	Jl. Parangtritis km 6,5 Telp. 379935 Fax. 371233	Lembaga	musik tradisional dan kontemporer, teater tradisional dan kontemporer, pedalangan, seni grafis dan seni kriya
14	Lembaga Rumah Dongeng Indonesia	Saman RT 4 RW 15, Bangunharjo Telp. 387292	Yayasan	Musik kontemporer, teater kontemporer, teater boneka kontemporer, teater anak (wayang kardus kontemporer), seni lukis kontemporer, fotografi, sastra, tradisi lisan, permainan dan maianan anak
15	Lembaga Studi Kajian Desain	Jl. Sonopakis Lor No. 15 Telp. 378276	Lembaga	Desain
16	Lembaga Studi Pengembangan Musik	Perumahan Sewon Indah A-15 Kode Pos 55188 Telp. 389522	Yayasan	musik klasik barat, musikologi
17	Ngudya Wirama Paguyuban	Gedongkuning RT 04 / 03 Kode Pos 55198	Org. informal	musik tradisional
18	Orkes Mahasiswa ISI Yogyakarta	ISI Yogyakarta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Org. informal	musik kontemporer dan klasik
19	Paguyuban Seni Kasanggit	Perum Perndowo Harjo Indah Jl. Nakula 14 Sewon	Org. informal	musik tradisional, teater boneka tradisional, teater kontemporer, tari tradisional
20	PAKRIYO (Paguyuban Kriyawan Indonesia)	Tirto Bangunjiwo Telp. 370542	Org. informal	seni kriya
21	Pardiman Acapella	Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	musik tradisional dan kontemporer
22	Petak Umpet Rancang Grafis	Sorowajan 316 RT 12 / 29 Panggunharjo	Org. informal	Desain, ilustrasi, animasi
23	Pracabaan Ki Pudjo	Gendeng RT 04 / 02 Bangunjiwo Kode Pos 55181	Org. informal	musik tradisional, teater boneka tradisional, wayang kulit purwa
24	Sanggar Kereta	Jeblog Rt 01 / 06 Ds. III Tirtonirmolo Kode Pos 55181	Lembaga	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, sastra, tradisi lisan
25	Sanggar/Balai Tari Wasana Nugraha	Dagaran, Jurug Bangunharjo RT 06 / 45 Sewon	Org. informal	musik tradisional, tari tradisional dan kontemporer, tradisi lisan etnomusikologi, etno tari
26	Sekolah Mengengah Musik Negeri 2 (SMKN 2 Kasihan)	Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374627, 380720	Instansi Pemerintah	musik universal
27	SENI : Jurnal Pengetahuan dan Pencapaian Seni	Jl. Parangtritis km 6 PO BOX 1210	Instansi Pemerintah	sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, estetika kritik seni
28	SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogyakarta)	Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374947	Lembaga	Seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi kriya kayu dan keramik
29	SMKN I Kasihan (SMKIN Yogyakarta)	Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374467	Instansi Pemerintah	Musik tradisional, teater tradisional, teater kontemporer, teater boneka tradisional, sastra, etnologi tari dan sejarah seni
30	Studio ISI	Jurusan Teater FSP ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis km 6,5 Perum Puspa Indah Sito, 18 - 20 Kasongan Kode Pos 375380	Yayasan	teater tradisional dan kontemporer

No.	Nama	Alamat	Bentuk Organisasi	Bidang
31	Study Sastar dan Teater Sila	Jotawang, Bangunharjo Sewon Kode Pos 55187 Telp. 387534	Lembaga	teater tradisional, kontemporer dan sastra
32	Teater Alam	Jl. Sawo No. 6 Perum Wirokerten Indah Telp. 377861	Org. informal	teater kontemporer
33	Teater Gandrik	Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105	Org. informal	teater kointemporer
34	Teater Garasi Yogyakarta	Jl. Bugisan Selatan Tegal Kenongo RT 01/08 No. 36A Telp. 415844	Lembaga	teater kontemporer, fotografi, film, video, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropogi, gagasan teater
35	Teater Gema	STIE Kerjasama Jl. Parangtritis km 3,5	Lemabaga	musik kontemporer, teater kontemporer, musik klasik, puisi, seni lukis kontemporer
36	Teater Pelopor	Panggung, Argomulyo Kode Pos 55752	Org. Informal	Teter kontemporer, sastra, sejarah seni, teater dan biografi
38	Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo	Kemabaran RT 04/21 No. 146 Tamantirto 55183 Telp. 376394	Yayasan	Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, sejarah seni
39	Yayasan Peduli Tekstil Tradisional Indonesia (PETTRII)	Karangnongko RT 10/42 Panggungharjo Telp/fax 415177	Yayasan	seni kerajinan tekstil, seni kriya tekstil, sastra, tradisi lisan, etnologi tari, sejarah seni, antropologi, sejarah tekstil tradisional

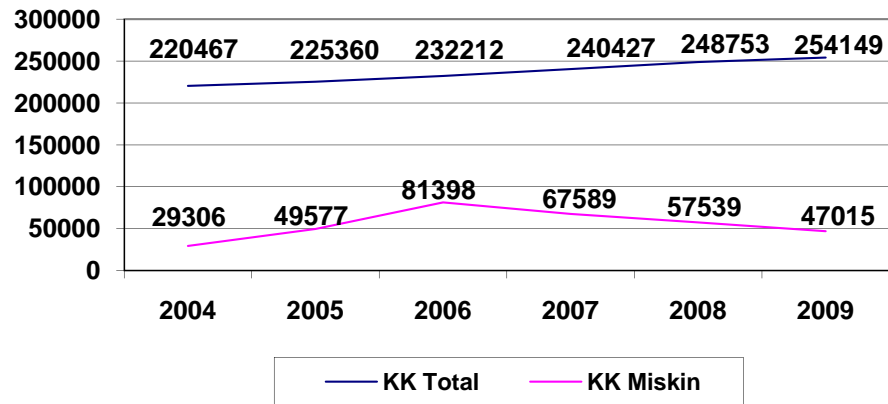
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

0.3.8. Pemberdayaan Masyarakat

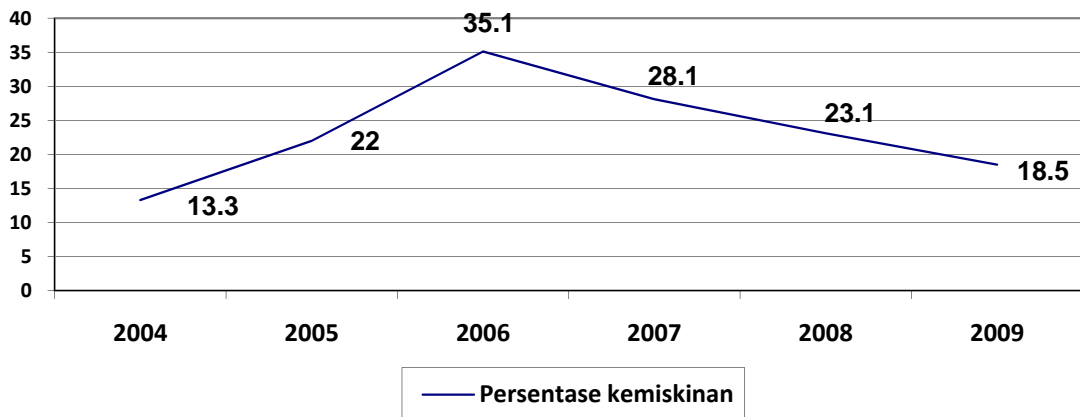
Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat.

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin kecilnya jumlah prosentase Kepala Keluarga (KK) miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama yaitu pada tahap awal program ini dilakukan memang belum menunjukkan keberhasilan, sehingga pada tahun 2005 tercatat jumlah prosentase KK miskin justru mengalami peningkatan dari 13,29% (tahun 2004) menjadi 21,99% (tahun 2005), dan 35,05% pada tahun 2006, hal ini dikarenakan kejadian gempa 27 Mei 2006. Namun untuk tahun-tahun berikutnya prosentase KK miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 35,05% pada tahun 2006 menjadi 28,11% (tahun 2007), 23,13% (tahun 2008) dan 18,05% (tahun 2009).

Grafik 5. Perkembangan Jumlah KK dan KK Miskin Kab. Bantul Tahun 2004 - 2009



Persentase KK Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2004 - 2009



Salah satu masalah dalam penanggulangan kemiskinan adalah lemahnya data base tentang KK atau penduduk miskin itu sendiri. Hal ini terlihat dari adanya selisih jumlah KK miskin berdasar data dari BKK PP dan KB dengan data dari BPS. Hal ini bisa terjadi karena metode pengambilan data yang berbeda dan indikator tentang kemiskinan yang berbeda. Walau demikian data dari BKK PP KB dan data dari BPS jumlah KK dan penduduk miskin pada tahun 2009 mengalami penurunan dibanding tahun 2008 (lihat tabel 60).

Tabel 60. Jumlah keluarga miskin Kab. Bantul tahun 2008-2009

No.	Kecamatan	Data BPS		Data BKK	
		Σ RTS 2008	Σ RTS 2009	Σ KKM 2008	Σ KKM 2009
1	Kretek	1.416	1.510	1.842	1.600
2	Sanden	2.211	2.489	1.454	1.337
3	Srandakan	1.765	1.892	2.025	1.790
4	Pandak	3.260	3.363	3.376	3.224
5	Bambanglipuro	2.352	2.512	2.685	2.158
6	Pundong	2.069	2.162	2.834	1.725
7	Imogiri	3.443	3.637	4.734	3.408
8	Dlingo	2.433	2.615	3.411	2.595
9	Jetis	2.654	2.725	3.654	2.982
10	Bantul	2.912	3.082	3.747	3.132
11	Pajangan	1.791	1.929	2.183	1.886
12	Sedayu	2.705	2.786	2.984	2.604
13	Kasih	4.292	4.437	4.845	4.427
14	Sewon	3.837	4.096	6.061	4.548
15	Piyungan	2.933	3.084	3.593	2.366
16	Pleret	2.860	2.933	2.838	2.270
17	Banguntapan	3.725	3.905	5.273	4.963
Jumlah		46.658	49.157	57.539	47.015

Sumber: BPS dan BKK PP dan KB Bantul (tahun 2009)

0.3.9. Pemuda dan Olahraga

Keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari banyaknya prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat propinsi maupun nasional. Jumlah prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 61. Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2009

Tahun	Jumlah Prestasi	
	Tingkat Propinsi	Tingkat Nasional
2005	11 cabang olahraga	5 cabang olahraga
2006	11 cabang olahraga	-
2007	11 cabang olahraga	5 cabang olahraga
2008	16 cabang olahraga	-
2009	15 cabang olahraga	-

Sumber: Kantor PORA Kabupaten Bantul, 2010 (diolah)

0.3.10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dilandasi semangat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mendorong tumbuhnya inovasi dan penerapan IPTEK di Kabupaten Bantul, pemerintah daerah mengembangkan regulasi yang lebih baik, meningkatkan ketrampilan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam melaksanakan pengembangan inovasi dan penerapan IPTEK, Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul.

Ditinjau dari pendidikan dan sumber daya manusia, keberadaan Perguruan Tinggi (Swasta) di Kabupaten Bantul sangat mempengaruhi perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kalangan masyarakat. Beberapa Perguruan tinggi dan jumlah dosen serta mahasiswa di Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 62. Jumlah PTS, Dosen dan Mahasiswa Aktif di Kabupaten Bantul

No	PTS - Perguruan Tinggi (Swasta)			
	Jenis	Jumlah	Dosen	Mahasiswa (Aktif)
1	Universitas	3	507	14.030
2	Institut			
3	Sekolah Tinggi	5	363	9.005
4	Akademi	11	87	1.366
5	Politeknik	1	19	180
	Jumlah	20	976	24.581

Sumber: Bantul dalam Angka 2008

Berkaitan dengan teknologi tepat guna, beberapa implemementasi program inovasi daerah yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat daya saing Kabupaten Bantul di era globalisasi dan sejalan dengan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta menumbuhkembangkan inovasi daerah adalah: Bantul *Seed Center* (program penangkaran dan produksi benih padi dengan kelompok tani, bibit pisang dan pakan ternak), Pengembangan desa mandiri energi, Laboratorium Geo Spasial, Pengembangan SMK (sekolah menengah kejuruan), Pengembangan Kawasan (antara lain GMT, KAJIGELEM), Sistem Resi Gudang, Kebun Buah Mangunan (diarahkan sebagai daerah agrowisata), Bank Sampah, Resi Gudang, Energi Bio (Bio gas, Bio Ethanol, Bio Diesel, Briket sampah), implementasi teknologi hybrid di Pandansimo.

Rencana pengembangan *energy hybrid* angin dan *solar cell* (energi panas matahari) di Pandansimo melibatkan kerjasama beberapa instansi terkait, seperti: Kementrian Ristek, LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional), Fakultas Teknik UGM. Adapun pemasangan panel surya yang direncanakan di atas atap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemasangan kincir angin sebanyak 50 unit di kawasan pantai Pandansimo sampai dengan Kwaru. Target program adalah tercapainya pemanfaatan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tani dan nelayan, dalam bentuk listrik antara lain untuk menggerakkan pompa bagi sumur renteng, *ice maker* untuk penyimpanan ikan laut, penerangan kandang ternak kelompok.

0.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH

0.4.1. Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bantul meliputi jaringan jalan, angkutan darat, dan terminal penumpang.

1) Jaringan Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Berdasarkan

statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Bantul lebih kurang 899,83 km meliputi 427 ruas, antara lain Jalan Klodran-Gose, Jalan Gose-Manding dan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2009, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 63.

Tabel 63. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2009

No	Jenis Permukaan	Kondisi (km)				Jumlah
		Mantap		Tidak Mantap		
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Aspal	314,21	252,52	25,85	18,60	611,18
2	Batu/Kerikil	1,70	28,65	41,80	16,10	88,25
3	Tanah	6,70	30,10	150,30	13,30	200,40
Panjang jalan						899,83

Sumber: DPU kabupaten Bantul, 2010

Di Kabupaten Bantul terdapat 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi, dengan panjang lebih kurang 130,506 km. Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya. Sedangkan panjang jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bantul lebih kurang 53,646 km antara lain Jalan Ring Road Selatan, Jalan Yogyakarta-Bantul, Jalan Yogyakarta-Batas Kulon Progo, dan lainnya. Berdasarkan pada fungsi jalan, jalan di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan.

a) Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer berfungsi menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jaringan jalan arteri primer meliputi antara lain sebagian ruas jalan lingkar (ring road) selatan, jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-Yogyakarta), dan jalan Yogyakarta – Batas Kulon Progo.

b) Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antar Pusat Kegiatan Wilayah(PKW), dan antara PKW dengan PKL. Jaringan jalan kolektor primer meliputi antara lain jalan Prambanan – Piyungan, jalan Yogyakarta – Piyungan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Palbapang – Barongan, jalan Sampakan – Singosaren, jalan Palbapang – Samas, jalan Srandakan – Kretek, jalan Klangon – Tempel, jalan Pemuda - jalan Kolonel Sugiyono - jalan Brigjen Katamso - jalan Panembahan Senopati, jalan Jodog – Srandakan, jalan Sedayu – Pandak, jalan Bantul – Klodran – Gaten – Manding - Bakulan, jalan Bakulan - Kretek, jalan Kota Yogyakarta – Bakulan, jalan Kretek - Parangtritis, jalan Yogyakarta – Bibal jalan Imogiri – Dodogan, dan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS).

c) Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi jalan Dawung – Makam Imogiri, dan jalan Rejowinangun - Ring Road Selatan.

d) Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi antara lain jalan Ganjuran – Paker, Panggang – Paker, Ngrowo – Samas, Ganjuran – Patalan, Bantul – Bejen, Sumberagung – Potrobayan, Pundong – Paker, Simpang Pundong – Potrobayan, Kretek – Depok, Jetis – Karang Semut.

e) Jalan Lingkungan

Jaringan jalan lingkungan berfungsi menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

2) Angkutan Darat Umum

Kondisi angkutan darat umum di Kabupaten Bantul saat ini kurang optimal. Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal yang dapat mengurangi beban lalu lintas masih sangat kurang, bahkan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Jumlah angkutan umum pada tahun 2007, 2008, dan 2009 semester I berturut-turut sebesar 168, 158, dan 125, atau mengalami penurunan rerata pertahun sebesar 16,36%. Data kendaraan angkutan umum (pedesaan/perbatasan) yang masih beroperasi disajikan pada Tabel 64.

Tabel 64. Trayek Angkutan Umum (Pedesaan/Perbatasan) yang Masih Beroperasi Tahun 2007 – 2009

Kelompok Kendaraan	Tahun					
	2007		2008		2009	
	Semester		Semester		Semester	
	I	II	I	II	I	II
Kopatek	30	30	30	21	28	28
RIAS	31	31	31	20	28	28
PPKS	18	17	18	12	15	15
PASA	8	6	7	4	5	6
PPAP	11	14	12	4	2	1
PPD	30	30	25	20	24	24
Mahardika	10	10	10	6	8	8
Karya Tamansari	28	24	23	16	15	14
Abadi	2	2	2	-	-	-
Jumlah	168	164	158	103	125	124

Sumber: Dinas Perhubungan, 2009

Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya; kemudahan memperoleh kendaraan pribadi (terutama sepeda motor), keterbatasan jalur angkutan umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul Tahun 2008 dan 2009 disajikan pada Tabel 65.

Tabel 65. Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Tahun	
		2008	2009
1	Roda 2	225,778	236,793
2	Roda 4	14,241	22,990
3	Roda 6	2,556	2,526
4	Diatas Roda 6		
JUMLAH		242,575	262,309

Sumber: Dinas Perhubungan, 2009

3) Terminal Penumpang

Terminal penumpang yang dibangun dan direncanakan di wilayah Kabupaten Bantul diarahkan untuk mendukung sistem jaringan jalan primer. Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (satu) tipe terminal penumpang, yaitu terminal penumpang tipe B. Terminal tipe B di wilayah Palbapang dan Imogiri. Sementara itu untuk melayani angkutan barang dan cargo, terminal barang di bangun di Argosari Sedayu dan Srimulyo Piyungan.

0.4.2. Sumberdaya Air

Sumber daya air utama di Kabupaten Bantul terdapat di wilayah sungai Progo – Sungai Opak – Sungai Oya yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo, Opak, dan Oya. Setiap DAS tersebut memiliki sub – DAS, luas, dan luas lahan diairi yang berbeda-beda.

Tabel 66. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No	Nama DAS	Nama Sub-DAS	Luas (Ha)	Luas lahan yang diairi (Ha)
1	Oya	Oya	57,00	15,00
2	Opak	Kali Gawe	178,00	178,00
		Kali Buntung	108,18	119,70
		Kali Tepus	68,14	74,10
		Kali Kuning	141,11	132,10
		Kali Mruwe	642,51	653,90
		Kali Kedung Semerengan	278,25	382,60
		Kali Code	277,96	865,40
		Kali Gajah Wong	287,00	246,80
		Kali Winongo	910,58	2.110,50
		Kali Bulus	185,30	96,30
		Kali Belik	133,82	117,40
		Kali Pliilan	97,58	97,34
3	Progo	Kali Bedog	1.454,40	1.528,44
	JUMLAH	14 Sub DAS	4.819,83	6.617,58

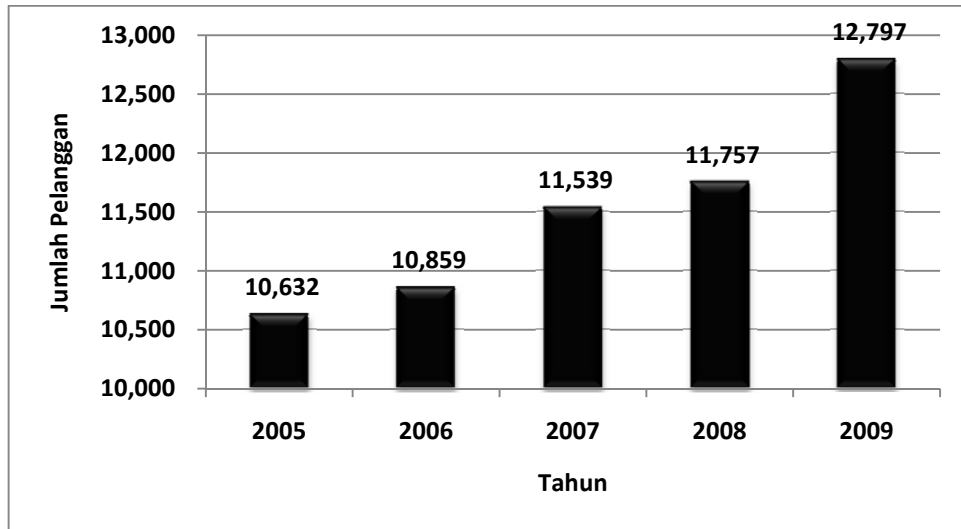
Sumber: Dinas SDA Kabupaten Bantul, 2010

Sampai saat ini sumber daya air tersebut diantaranya dimanfaatkan untuk irigasi. Saat ini, telah dibangun sebanyak 195 Daerah Irigasi (DI) terdiri dari 9 DI teknis, 113 DI semi teknis, dan 73 DI sederhana yang tercakup dalam 5 wilayah UPT Pengamatan Pengairan. Nama DAS, luas, serta luas lahan yang diairi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 68.

0.4.3. Air Minum/Air Bersih

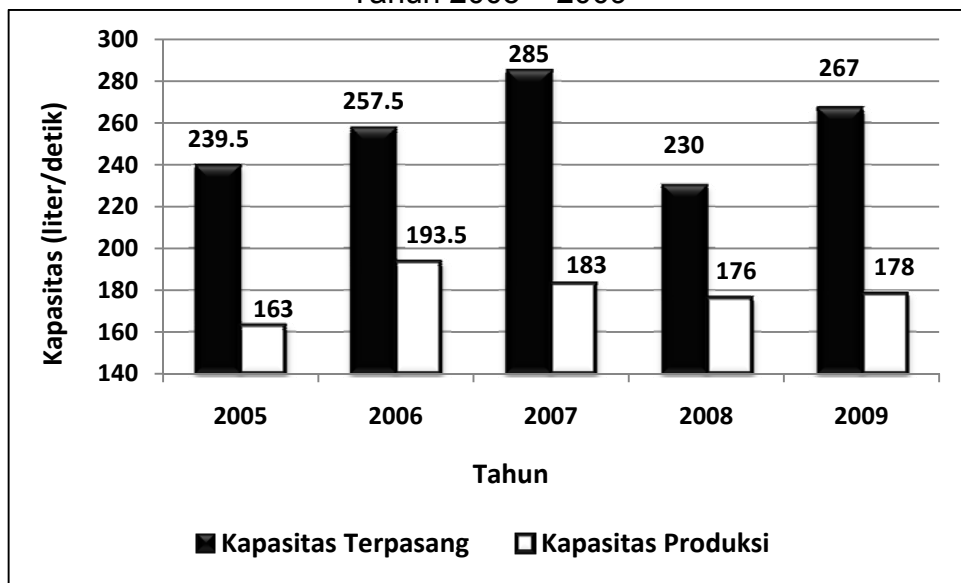
Penyediaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Perkembangan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009 serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Bantul tahun 2005 – 2009 disajikan masing – masing pada Grafik 6 dan Grafik 7.

Grafik 6. Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009



Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010

Grafik 7. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009



Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010 (diolah)

Perbedaan kapasitas terpasang dan kapasitas produksi (Grafik 7) menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih belum dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat. Ketersediaan air bersih pada tahun 2009 sebesar 267 liter/detik, sedangkan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 178 liter/detik. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air sebesar 87 liter/detik (33,33% dari jumlah yang tersedia) belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM pada tahun 2009 untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 67.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang belum terjangkau oleh layanan PDAM, yaitu Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, dan Pleret. Namun, Untuk penanganan di lokasi yang belum terjangkau jaringan PDAM dan daerahrawan kekeringan, selama 5 tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.

Tabel 67. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Sumber	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)
1	Srandakan	Sumur dangkal	10	7
2	Sanden	-	0	0
3	Kretek	-	0	0
4	Pundong	-	0	0
5	Bambanglipuro	-	0	0
6	Pandak	Sumur Dalam	10	5
7	Bantul	Sumur Dangkal	30	20
8	Jetis	Sumur Dangkal	10	7
9	Imogiri	Sumur Dalam	20	7
10	Dlingo	Mata Air & Air Permukaan Sungai	30	19
11	Pleret	Sumur Dalam	0	0
12	Piyungan	Sumur Dangkal	10	3
13	Banguntapan	Sumur Dalam	10	7
14	Sewon	Sumur Dalam	10	10
15	Kasih	Sumur Dangkal	62	47
16	Pajangan	Sumur Dalam	35	26
17	Sedayu	Air Permukaan Sungai	30	20
JUMLAH			267	178

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2011

0.4.4. Air Limbah/Sanitasi

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan domestik/rumah tangga maupun *home industry* saat ini masih dikelola secara individual/sendiri-sendiri (*on site sanitation*) yang dialirkan ke saluran pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Adapun jumlah air limbah yang dihasilkan adalah sekitar 80 – 90% dari jumlah penggunaan air domestik.

Sumber air limbah di Kabupaten Bantul juga berasal dari fasilitas umum dan industri. Pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Bantul di beberapa usaha industri sudah dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap pencemaran air, udara dan tanah. Pencemaran ini tentu saja perlu penanganan lebih lanjut termasuk juga pada limbah domestik dan *home industry*. Penetapan baku mutu dan pengelolaan, serta pengolahan air limbah sebelum dibuang merupakan alternatif terbaik yang menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Di Kabupaten Bantul terdapat pula industri-industri skala kecil, menengah dan skala besar yang dipertahankan sebagai salah satu sektor penunjang kegiatan ekonomi wilayah. Untuk itu selain pengolahan limbah sebelum dibuang, penyiapan jaringan limbah yang terencana perlu dilakukan terutama pada daerah-daerah yang dialokasikan sebagai wilayah industri. Beberapa upaya pengelolaan limbah berikut jenis usaha tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 68. Jenis usaha industri dan penanganan limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Jenis Usaha	Nama Usaha	Alamat	Sentra	Non Sentra	Kapasitas Rata-rata per Hari	Volume	Volume	Upaya Penanganan		Upaya Penanganan Air Limbah					
							Air Limbah	Limbah Padat	Limbah Padat		IPAL		Bak	Penanganan	Tanpa	
							Rata-rata/ Unit Usaha	Rata-rata/ Unit Usaha	Dibuang Langsung	Dimanfaatkan	Individual	Komunal	Pengendap	Lainnya	Penanganan	
1	Elektroplating	-	Jagalan, Banguntapan, Singosaren,	12		50 pcs/hari	25	0.5 ons/bulan	√			√ (10 unit)		√ (2 unit)		
			Banguntapan, Pringgolayan	10		30 pcs/hari	30	0.3 ons/bulan	√			√ (6 unit)		√ (4 unit)		
				14		20 pcs/hari	20	0.2 ons/bulan	√			√ (10 unit)	√ (10 unit)	√ (4 unit)		
2	Tekstil (ATBM)	Kurnia (ATBM) Padi Subur	Krapyak Wetan, Panggunharjo, Sewon		1	20 lb/hari	1 m3/hari					√				
			Jln. Wates, Km 13,5 Sedayu, Argosari, Sedayu		1	40 lb/hari	2 m3/hari					√				
				11		10 lb/hari	0,5 m3/hari					√ (5 unit)		√ (6 unit)		
3	Batik		Wijirejo, Pandak, Bantul		4	12 lb/hari	1 m3/hari					√				
4	Tapioka		Nangsri, Srihardono, Pundong	22		1 kwt/hari	150	30		Pakan ternak	√ (5 unit)			√ (7 unit)		
			Sayegan, Srihardono, Pundong	14		2 kwt/hari	300	60		Pakan ternak		√ (10 unit)		√ (4 unit)		
5	Tahu	Bu Hari	Greso, Trimurti, Srandakan		1	6 kwt/hari	400	120		Pakan ternak	√					
			KSM Sumber Rejeki	Greso, Trimurti, Srandakan	13		1 kwt/hari	1000	20		Pakan ternak					
			KSM Ngudi Lestari	Gunungsaren, Trimurti, Srandakan	54		1 kwt/hari	1000	20		Pakan ternak		√ (5 unit)		√ (54 unit)	
				Poncosari, Srandakan		20		1 kwt/hari	1000	15		Pakan ternak		√ (14 unit)		√ (6 unit)
				Ngoto, Bangunharjo, Sewon	17		75 kg/hari	750	15		Pakan ternak		√ (komunal)			
				Bogoran, Trirenggo, Bantul	15		75 kg/hari	750	15		Pakan ternak		√			
				Baturetno, Banguntapan		10		75 kg/hari	750	15		Pakan ternak		√ (7 unit)		√ (3 unit)
				Panggunharjo, Sewon		3		1,5 kwt/hari	1500	30		Pakan ternak		√ (1 unit)		√ (2 unit)
6	Tempe		Pendowoharjo, Sewon		25	50 kg/hari	750	5		Pakan ternak		√ (10 unit)		√ (15 unit)		
			Panggunharjo, Sewon		16	50 kg/hari	750	5		Pakan ternak		√ (6 unit)		√ (10 unit)		
			Poncosari, Srandakan		34	60 kg/hari	900	6		Pakan ternak		√ (16 unit)		√ (18 unit)		
			Cannden, Jetis		19	50 kg/hari	750	5		Pakan ternak		√ (10 unit)		√ (9 unit)		
7	Krecek		Segoroyoso, Pleret	35		40 kg/hari	1000	0,4	√			√ (20 unit)	√ (15 unit)			

Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010

Tabel 69. Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas Produksi	Volume Limbah	Keterangan
1	TPA – Piyungan	Pembuangan akhir sampah	150 m3/hari		Saluran irigasi S. Opak
2	IPAL – Sewon	Instalasi pengolahan limbah RT	15.500 m3/hari	9.000 m3/hari	S. Bedog
3	PT. Komitrando	Pelapisan logam/electroplating	10.000 pcs/hari	2 m3/hari	Saluran irigasi
4	PT. Samitex	Industri tekstil	27.811.800 m/tahun	160 - 180 m3/hari	S. Winongo
5	PG. Madukismo	Industri gula tebu	500.000 - 600.000 ton/tahun	2 - 5 m3/jam	S. Winongo Kecil
6	PS. Madukismo	Industri alkohol/spiritus	24.000 l/hari	5 - 7 m3/jam	S. Bedog
7	PT. Bintang Alam Semesta	Penyamaan kulit	1.000 - 2.000 lmb/hari	200 - 260 m3/bulan	S. Opak
8	PT. Adi Satria Abadi	Penyamaan kulit	500.000 feet/bulan	250 m3/hari	S. Opak
9	PT. Fajar Makmur	Penyamaan kulit			Saluran irigasi
10	PT. Digitone	Industri tinta			Saluran irigasi
11	PT. Pertamina UP IV	Depot BBM			
12	KRT. Daud Wiryo Hadinagoro	Batik	20 lmb/bulan		Disedot
13	Batik Indah Roro Jonggrang	Batik			
14	PT. Indo Hanzel Perkasa	Gas Asitelin	576.000 kg/tahun	282,6 m3/bulan	S. Semampir
15	Balai Besar Kulit Karet dan Plastik	Laboratorium dan Pelayanan Jasa Penyamaan Kulit			S. Opak
16	PS. Panembahan Senopati	Rumah Sakit	160 tempat tidur	40 m3/hari	Saluran drainase
17	RS. PKU Muhammadiyah	Rumah Sakit	108 tempat tidur	580 m3/bulan	S. Winongo Kecil
18	PT. Indokor Daya Mina	Cold Storage			S. Gadjahwong
19	PT. Indokor Bangun Desa	Tambak udang	7,2 ton/tahun		Pantai Pandansimo
20	RS. Rajawali Citra	Rumah Sakit	50 tempat tidur		Saluran irigasi
21	RS. Permata Husada	Rumah Sakit	30 tempat tidur		Saluran irigasi
22	RSKIA. Ummi Khasanah	Rumah Sakit	2 orang/hari		Saluran irigasi

Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 201

Jenis dan jumlah usaha industri sebagaimana yang disajikan pada Tabel 68, dimungkinkan banyak mengalami perubahan dalam hal jumlah maupun variasi jenis produksinya, namun hal ini terbatas pada pendataannya karena sebagian besar industri yang baru tumbuh bersifat *home industry* dan belum terkontrol oleh pemerintah daerah. Selain itu juga aspek regularitas masih belum mampu menunjukkan posisi dan keamanan jenis usaha yang berkelanjutan.

Ketersediaan sarana sanitasi rumah tangga berhubungan erat dengan kondisi kesehatan penduduk di Kabupaten Bantul serta menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan arti pentingnya kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Ketersediaan kebutuhan sanitasi penduduk di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada jumlah/kuantitas dari sarana jamban keluarga/rumah tangga yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 70. Ketersediaan Sarana Jamban di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Ketersediaan Jamban						Jumlah KK
		M		K		H		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Srandakan	847	9,59	1.859	21,05	4.242	48,02	8.833
2	Sanden	509	4,92	1.384	13,38	6.260	60,51	10.345
3	Kretek	1.126	13,86	1.856	22,84	4.514	55,54	8.127
4	Pundong	1.606	21,75	2.301	31,16	2.888	39,11	7.385
5	Bambanglipuro	887	7,85	1.447	12,81	8.548	75,68	11.295
6	Pandak	1.269	9,98	4.624	36,35	5.821	45,76	12.721
7	Bantul	2.071	13,25	1.547	9,90	10.157	65,00	15.627
8	Jetis	3.710	23,24	4.433	27,77	5.270	33,01	15.965
9	Imogiri	3.693	22,54	2.054	12,54	7.486	45,69	16.384
10	Dlingo	805	8,10	5.417	54,51	3.353	33,74	9.937
11	Pleret	3.795	29,41	1.233	9,56	4.878	37,81	12.902
12	Piyungan	4.198	34,92	625	5,20	8.263	68,73	12.022
13	Banguntapan	2.481	10,88	3.945	17,30	15.302	67,12	22.798
14	Sewon	1.848	6,94	604	2,27	19.355	72,69	26.626
15	Kasih	1.948	7,97	1.085	4,44	14.173	57,96	24.454
16	Pajangan	1.377	17,58	1.791	22,86	4.171	53,25	7.833
17	Sedayu	2.412	24,04	1.456	14,51	6.726	67,05	10.032
Jumlah/Rata-rata		34.582	15,70	37.661	18,73	131.407	54,51	233.286

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2008

Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa kondisi sanitasi penduduk di Kabupaten Bantul berdasarkan perbandingan jumlah dan kualitas kelayakan sarana sanitasi jamban keluarga, dalam 'kategori cukup'

memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Hal ini didasarkan bahwa prosentase rata-rata sarana jamban keluarga yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 15,70% dari keseluruhan jumlah KK pada tiap kecamatan; prosentase jumlah yang kurang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 18,73% dan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 54,51%. Selebihnya dari perhitungan dan pendataan tersebut diasumsikan belum memiliki jamban keluarga sendiri ataupun satu jenis sarana jamban digunakan untuk kebutuhan bersama-sama.

Kecamatan Piyungan merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kondisi sarana jamban tidak layak (tidak memenuhi standar kesehatan) paling banyak, yaitu sejumlah 4.198 buah; sedangkan jumlah yang paling sedikit dimiliki oleh keluarga di wilayah Kecamatan Sanden dengan 509 buah. Demikian juga halnya dengan perhitungan prosentasenya terhadap jumlah KK pada wilayah kecamatan yang bersangkutan, tampak kecenderungan dan posisi yang sama, yaitu Kecamatan Piyungan mempunyai prosentase jumlah jamban yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar terbesar (34,92%) dan Kecamatan Sanden 4,92% (terkecil).

0.4.5. Persampahan dan Drainase

Meningkatnya berbagai aktivitas dan semakin membaiknya taraf hidup masyarakat akan mempengaruhi jumlah dan ragam sampah yang ditimbulkan. Hal tersebut akan menyebabkan semakin tingginya derajat pencemaran lingkungan, seperti: timbulnya bau tidak sedap, gangguan lalat penyebar penyakit, dan sebagainya.

Berdasarkan Pedoman Teknik Analisis–Tata Cara dan Pedoman Teknik Baku Perencanaan Tata Ruang dimana rata-rata produksi sampah yang dihasilkan perorang/hari termasuk produksi sampah non rumah lainnya adalah 2 liter/orang/hari. Dilihat dari jenis kegiatan yang ada, sampah di wilayah Kabupaten Bantul berasal dari:

- Sampah yang berasal dari pusat-pusat perbelanjaan (pasar),
- Sampah yang berasal dari permukiman (rumah tangga),

- Sampah dari tempat aktivitas keramaian,
- Sampah dari industri.

Adapun kegiatan-kegiatan yang menghasilkan/sumber sampah adalah: permukiman, niaga, fasilitas umum, dan industri. Sampah industri dan fasilitas sosial diperhitungkan 20% dari sampah domestik. Sedangkan menurut jenisnya, sampah yang dihasilkan dapat dikelompokkan atas sampah: organik, kertas, plastik, logam, kaca, karet, tekstil, dan kayu.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dapat dibedakan atas:

1. Secara tradisional

Dilakukan dengan cara penumpukan/penimbunan, dan pembakaran sampah. Pengelolaan sampah dengan cara tradisional ini dapat dilakukan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah.

2. Mandiri oleh masyarakat

Dilakukan dengan cara penumpukan/penimbunan, dan pembakaran sampah. Pengelolaan sampah dengan komunal oleh masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

3. Secara komunal

Pengelolaan persampahan secara komunal di wilayah Kabupaten Bantul dilakukan pada beberapa TPS dan TPA. Jenis dan jumlah sarana persampahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71. Jenis dan jumlah sarana persampahan Kabupaten Bantul

No	Jenis Pelayanan Persampahan	Jumlah
1	Sampah pasar	20 TPS
2	Fasilitas umum	25 TPS
3	Perumahan, industri, took	29 TPS
4	TPA	1 buah

Sumber: Dinas PU Kabupaten Bantul, 2007

0.4.6. Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon dan pada akhir tahun 2010 akan

dibangun di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan. Sampai dengan tahun 2009 telah dibangun sebanyak dua *twin blok* (TB) atau sebanyak 196 unit. Rusunawa tersebut mulai dioperasikan pada akhir tahun 2009 dengan tingkat hunian telah mencapai 50%. Bangunan Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Bantul yang berpenghasilan rendah (MBR) terutama yang tinggal di kawasan kumuh.

Selain itu dilaksanakan program Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) sebanyak 300 unit bagi keluarga miskin. Program tersebut merupakan arisan rumah yang dipergunakan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru serta perbaikan lingkungan permukiman. Program BSP2S dan PKP di Kabupaten Bantul disalurkan oleh tiga Lembaga Keuangan Mikro (koperasi/BMT) yang terseleksi dan memiliki kinerja baik.

Untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata pasca bencana gempa bumi yang berbasis pengurangan risiko bencana, maka disusun dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) di seluruh desa di Kabupaten Bantul secara bertahap. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2010 semua desa telah memiliki dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP).

0.4.7. Listrik

Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Bantul telah mencapai 100%. Namun demikian berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) belum mencapai 100% khususnya di dusun yang terletak di lokasi terpencil. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan mengembangkan jaringan listrik dan inovasi sumber energi yang lain yaitu energi angin, energi surya, energi ombak, dan mikro hidro. Pada tahun 2009 jumlah sambungan listrik terpasang di seluruh Kabupaten Bantul sebanyak 137.215 sambungan.

0.4.8. Komunikasi dan Informasi

Sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul menindaklanjuti dan menjalankan Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*, sebagai tindak lanjut dari

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika. Beberapa sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul berbasis IPTEK adalah:

- 1) *Pemanfaatan Media Telematika*, seperti: SMS Center, Website daerah (www.bantulkab.go.id), Website tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), Telekompres (rapat komprehensif dan rapat muspida).
- 2) *Pemanfaatan Media Elektronika*, seperti: Siaran informasi dan komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projotamansari), dialog interaktif di Radio RRI dan Radio Bantul FM.
- 3) *Pemanfaatan Media Cetak*, seperti: Jurnal Riset Daerah, Bulletin serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap SKPD.

Selain itu, Kabupaten Bantul telah menerapkan pengembangan jaringan. Jumlah koneksi jaringan internet di seluruh bagian Pemerintah Kabupaten Bantul adalah :

- DPRD dan Sekretariat DPRD (2 jaringan/koneksi),
- Inspektorat (1 jaringan/koneksi),
- Bagian pemda (13 jaringan/koneksi),
- Dinas/SKPD (16 jaringan/koneksi),
- Badan (4 jaringan/koneksi),
- Kantor (8 jaringan/koneksi), dan
- Kecamatan (17 jaringan/koneksi).

Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh instansi pemerintah telah terhubung dengan koneksi internet.

0.5. PEMERINTAHAN UMUM

0.5.1. Pemerintahan

Dalam dimensi global, tidak ada negara ataupun daerah yang dapat melepaskan diri dari Negara atau daerah lain, mereka saling berkaitan. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semakin dinamis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, daerah

dituntut untuk mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dengan memanfaatkan posisi dan semua potensi yang dimilikinya.

Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini telah melakukan kerjasama baik kerjasama antar pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan organisasi non pemerintah. Peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 telah mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan jalinan kerjasama khususnya dengan lembaga swadaya masyarakat. Adapun jalinan kerjasama dalam kurun waktu 2005-2009 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 72. Jumlah Kerja Sama di Kabupaten Bantul
Tahun 2005 – 2009

No.	Jenis Kerjasama	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pemerintah	12	6	4	10	2
2	Swasta	5	16	8	5	7
3	BUMN	1	1	1	6	1
4	Perguruan Tinggi	2	-	2	5	2
5	LSM/ Ormas	2	21	8	6	-

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bantul, tahun 2010

Dalam rangka pengembangan kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan;

- 5) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Sementara itu, jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 tercatat sejumlah 12.938 orang PNS. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai negeri sipil berpendidikan S2 sejumlah 332 orang (2.55%), lulusan S1 sejumlah 5.457 orang (42.18%), D3/Akademi sejumlah 3.371 orang (26.05%), SMA/SMK sebanyak 3.168 orang (24.49%), lulusan SMP sejumlah 406 orang (3.14%), dan lulusan SD sejumlah 204 orang (1.58%). Kebijakan pemerintah dalam bidang kepegawaian adalah *zero growth*, dengan kata lain penambahan pegawai bukan didasarkan atas formasi namun dilakukan untuk mengganti pegawai yang telah pensiun. Namun demikian karena perekrutan pegawai tergantung oleh Kebijakan Pusat sehingga realisasi penggantian Pegawai Negeri Sipil yang pensiun tidak dapat terpenuhi semua. Agar pelayanan publik tidak terganggu, Pemerintah Daerah mendorong bekerjasama dengan swasta, misalnya di bidang kesehatan melalui dukungan dan fasilitasi dalam pembangunan pusat-pusat layanan kesehatan swasta.

Selanjutnya dalam hal tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) yang dikembangkan kearah tata kelola pemerintahan yang empatik (*emphatic governance*). Melalui tata kelola pemerintahan yang empatik yang berporos pada *emphatic bureaucracy*, pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *good governance*. Pelayanan dalam hal ini adalah pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU RI No. 25 tahun 2009 dengan ruang lingkup meliputi 3 kelompok pelayanan :

1. Pelayanan barang, antara lain pelayanan infrastruktur (jaringan, jalan, air bersih, listrik dan lain-lain)
2. Pelayanan jasa, antara lain pendidikan, kesehatan dan lain-lain
3. Pelayanan administrasi, antara lain KTP, Akte Kelahiran, IMB dan lain-lain

Pelayanan barang dan jasa pada dasarnya telah diuraikan dalam sub bab terdahulu. Adapun pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul antara lain :

1. Perijinan.

Guna meningkatkan pelayanan perijinan maka dilakukan reformasi di bidang perijinan, yaitu dengan pembentukan Dinas Perijinan. Adapun jenis pelayanan perijinan yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya ijin gangguan, IMB, ijin kerja perawat, ijin usaha industri, ijin tenaga medis, ijin usaha jasa konstruksi, tanda daftar gudang, tanda daftar industri dan lain-lain.

2. Kependudukan dan catatan sipil.

Bentuk pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain pemberian Nomor Induk Kependudukan, pengkoordinasian pendaftaran dan penertiban KTP, Pencatatan mutasi penduduk, pengelolaan data penduduk, pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, dan pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations*.

3. Ketentraman dan ketertiban umum

Pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum antara lain bimbingan dan kemitraan masyarakat dalam implementasi peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, operasi pengamanan, patroli wilayah dan piket, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan melalui pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE).

Berkaitan dengan pelayanan public pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul pada RPJMD tahun ke-2 (2012) melaksanakan pengadaan barang dan jasa menggunakan LPSE sesuai

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Adapun pelayanan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan desa meliputi administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.

Sementara itu terkait dengan status desa, berdasarkan hasil verifikasi dan updating data oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI melalui Badan Pusat Statistik bersama Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2009/2010, di Kabupaten Bantul terdapat 59 desa maju, 15 desa tertinggal, dan 1 desa yang berstatus sangat tertinggal. Penentuan kriteria desa tertinggal tersebut berdasarkan beberapa indikator, antara lain ditinjau dari lapangan usaha mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, kepadatan penduduk, dan keadaan sosial ekonomi penduduk suatu desa. Adapun desa-desa yang berstatus desa tertinggal adalah Desa Poncosari (kecamatan Srandakan); Desa Gadingsari (kecamatan Sanden); Desa Triharjo dan Desa Caturharjo (kecamatan Pandak); Desa Selopamioro (kecamatan Imogiri); Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Mangunan, dan Desa Jatimulyo (kecamatan Dlingo); Desa Segoroyoso, Desa Wonolelo, dan Desa Bawuran (kecamatan Pleret); Desa Triwidadi dan Desa Guwosari (kecamatan Pajangan); dan Desa Argosari (kecamatan Sedayu). Sedangkan desa yang termasuk dalam status desa sangat tertinggal adalah Desa Seloharjo (Kecamatan Pundong).

0.5.2. Pembentukan Peraturan, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum

Salah satu hal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berwibawa adalah aspek hukum sebagai salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini pembangunan di bidang hukum meliputi pembentukan peraturan, penegakan hukum dan budaya hukum.

Dalam pembangunan bidang hukum, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembentukan beberapa peraturan, baik penyusunan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah yang berpihak pada masyarakat.

Tabel 73. Produk Hukum Di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No	Produk Hukum	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Peraturan Bupati	21	42	79	108	71
2	Peraturan Daerah	15	7	22	33	20
3	Surat Keputusan Bupati	427	378	311	319	404
4	Instruksi	1	0	1	1	4
5	M O U	22	47	23	16	12
Jumlah		486	474	436	477	511

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, tahun 2010 (diolah)

Sedangkan dalam bidang penegakan hukum selama ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Sementara itu di bidang budaya hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih relatif rendah. Hal ini sebagai akibat dari lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum di masyarakat.

0.5.3. Partisipasi di Bidang Politik

Kondisi politik di Kabupaten Bantul tidak dapat lepas dari kondisi politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta kondisi politik Nasional. Dinamika politik di Kabupaten Bantul relatif baik, walaupun sering diwarnai oleh adanya demonstrasi sebagai bentuk sikap kritis masyarakat namun semua dapat berjalan dengan tertib dan damai. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kerjasama yang baik dan sinergis dari berbagai aktor baik pemerintah, partai politik, LSM, maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul. Di samping itu penyaluran aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung telah dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

Pesta demokrasi rakyat melalui Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pilkada 2010 telah dapat dilaksanakan secara tertib, aman, damai, dan dinamis. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada (lihat Tabel 74) menunjukkan daya kritis masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini juga berarti pendidikan politik di Kabupaten Bantul telah dapat dikatakan berhasil.

Tabel 74. Partisipasi Masyarakat dalam PILEG dan PILPRES 2009 di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Pileg	Pilpres
1	Pleret	75.06%	81.91%
2	Pajangan	80.14%	81.81%
3	Piyungan	76.83%	81.28%
4	Bantul	72.60%	81.21%
5	Sewon	78.11%	81.07%
6	Kasih	73.01%	79.89%
7	Dlingo	78.25%	79.59%
8	Banguntapan	73.12%	79.00%
9	Imogiri	74.77%	78.66%
10	Jetis	73.99%	78.61%
11	Pandak	70.60%	77.87%
12	Srandakan	76.10%	77.08%
13	Kretek	71.52%	76.22%
14	Sedayu	73.79%	75.90%
15	Bambang Lipuro	68.12%	75.40%
16	Pundong	72.41%	75.09%
17	Sanden	71.01%	74.24%
	Rerata Kab. Bantul	74.08%	78.52%

Sumber: KPU Kabupaten Bantul (2009)

0.6. LINGKUNGAN HIDUP

0.6.1. Dampak Pemanasan Global

Pemanasan global atau *global warming* diartikan dengan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan Bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia", melalui efek rumah kaca. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi.

Adanya fenomena *global warming* berpengaruh pada bencana kekeringan dan kekurangan air di musim kemarau serta peningkatan suhu harian yang sangat ekstrim sehingga bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Akibat nyata dari *global warming* di wilayah Kabupaten Bantul, adalah gangguan hasil pertanian, bencana kekeringan dan kekurangan persediaan air.

Daerah rawan tinggi kekeringan adalah di Piyungan, rawan sedang dapat terjadi di Pajangan, Dlingo, dan Imogiri.

0.6.2. Tata Ruang

Berkaitan dengan diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten akibat terjadinya bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang meliputi:

- 1) Pengembangan Struktur ruang melalui pemantapan, pengembangan hirarki system perkotaan, dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana ke seluruh Kabupaten Bantul.
- 2) Pengembangan pola ruang untuk kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis dengan memperhatikan antara lain:
 - a) Pemeliharaan, perwujudan kelestarian lingkungan hidup
 - b) Penetapan daerah rawan bencana alam dan pembatasan pembangunan di daerah rawan bencana
 - c) Perwujudan, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya
- 3) Pengembangan kawasan strategis dengan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai budaya serta pelestarian lingkungan hidup.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam mendukung kebijakan tersebut diatas adalah:

- 1) Penetapan pusat pertumbuhan wilayah secara berjenjang sesuai dengan potensi.
- 2) Pengembangan sistem transportasi secara terpadu
- 3) Pembentukan pola ruang dengan menempatkan kawasan lindung, dan kawasan budidaya sehingga terwujud tata ruang yang tertib, teratur, efisien, selaras serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Pengembangan kawasan bencana dengan membatasi pertumbuhan di daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana alam.

- 5) Penetapan kawasan strategis daerah dengan mengatur pola pemanfaatan ruang sehingga memberikan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0.6.3. Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2005 – 2009 adalah tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, banjir, angin topan/puting beliung, air pasang, dan kekeringan. Bencana alam tanah longsor terjadi di Kecamatan Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, dan Pandak. Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Kejadian kebakaran juga terjadi hampir di seluruh wilayah dengan frekuensi yang berbeda-beda. Daerah rawan banjir adalah beberapa wilayah di Kecamatan Srandakan, Sewon, dan Kasihan. Bencana angin topan/puting beliung yang cukup besar terjadi pada akhir tahun 2006 dan terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Bencana air pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

- 1) Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum.
- 2) Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko.
- 3) Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

- 1) Kekuatan
 - a. Kebijakan pemerintah daerah yang kondusif untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - b. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa secara seimbang;
 - c. Distribusi pendapatan yang relatif merata dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Kelemahan
 - a. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi makro;
 - b. Pertumbuhan sektor industri yang masih belum pulih akibat gempa.

- 3) Peluang
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung terus meningkat;
 - b. Permintaan atas produk kerajinan yang merupakan produk unggulan Kabupaten Bantul yang terus meningkat.

- 4) Tantangan
 - a. Pengaruh krisis finansial global pada pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan;
 - b. Pergeseran nilai budaya dan kearifan lokal akan menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi lokal.

- 5) Isu Strategis
 - a. Mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi atas terjadinya krisis finansial;
 - b. Mengembalikan kinerja pertumbuhan sektor industri kerajinan;

- c. Menjadikan produk dan jasa lokal sebagai pilihan bagi konsumen, untuk itu diperlukan inovasi pengembangan produk lokal juga inovasi dalam sarana dan prasarana ekonomi agar produk dan jasa lokal setidaknya menjadi alternatif pilihan bagi konsumen.

3.1.2 Investasi

1) Kekuatan

- a. Kegiatan investasi dari berbagai sektor (pemerintah, PMA, PMDN, masyarakat) yang terus tumbuh;
- b. Pertumbuhan investasi masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan investasi domestik.

2) Kelemahan

- a. Investasi sektor pemerintah yang masih dominan;
- b. Investasi domestik pertumbuhannya lambat;
- c. Iklim investasi yang masih kurang mendukung.

3) Peluang

- a. Dana investasi dari daerah lain yang membutuhkan ruang investasi.

4) Tantangan

- a. Persaingan dengan daerah lain dalam menarik minat investasi.

5) Isu Strategis

- a. Pertumbuhan investasi yang masih didominasi investasi pemerintah harus diarahkan pada investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta;
- b. Peningkatan kerjasama antar daerah maupun swasta untuk pengembangan investasi;
- c. Perwujudan investasi yang mengarah pada pengembangan keunggulan kompetitif produk lokal Kabupaten Bantul;

- d. Sistem pelayanan investasi yang transparan sehingga memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi.

3.1.3 Keuangan Daerah

1) Kekuatan

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil;
- b. Pertumbuhan sektor ekonomi yang dominan;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan pajak dan retribusi secara signifikan pada tahun 2009 dan 2010;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait;
- f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

2) Kelemahan

- a. Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah;
- b. Penurunan objek retribusi daerah ;
- c. Rendahnya kapasitas fiskal;
- d. Tingginya porsi belanja pegawai terhadap APBD;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- f. Predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan daerah belum tercapai;
- g. Rendahnya kesadaran wajib pajak.

3) Peluang

- a. Diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Optimalisasi objek pajak dan retribusi;
- c. Peningkatan SDM aparat pajak/retribusi daerah.

- 4) Tantangan
 - a. Ketidaksinkronan peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah pusat;
 - b. Dana transfer dari pemerintah pusat yang tidak tentu besarnya;
 - c. Peningkatan kebutuhan belanja untuk peningkatan pelayanan publik;
 - d. Menurunnya ketersediaan anggaran untuk belanja langsung;
 - e. Lingkungan ekonomi makro yang kurang kondusif;
 - f. Tingginya celah fiskal.

- 5) Isu-Isu Strategis yang perlu diatasi
 - a. Kapasitas fiskal daerah masih rendah;
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana;
 - d. Belum tercapainya predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan daerah;
 - e. Implementasi perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Peningkatan tata kelola aset daerah.

3.1.4 Industri, Perdagangan, dan Koperasi

- 1) Kekuatan
 - a. Kebijakan pemerintah daerah yang kondusif;
 - b. Desain produk industri kecil yang fleksibel;
 - c. Kabupaten Bantul terkenal sebagai tempat produksi kerajinan tangan;
 - d. Pelestarian lembaga perdagangan lokal seperti pasar tradisional;
 - e. Kesadaran masyarakat atas pentingnya berkoperasi untuk mengatasi masalah bersama;
 - f. Kemampuan ekspor yang lebih berkualitas.

2) Kelemahan

- a. Kualitas dan kuantitas bahan baku yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b. Harga bahan pembantu/penolong yang terus meningkat;
- c. Masalah klasik koperasi seperti pendirian koperasi dan kemampuan SDM yang belum memadai;
- d. Lemahnya koordinasi antar pelaku di sektor industri;
- e. Jiwa kewirausahaan pelaku industri yang lemah;
- f. Tidak ada penghargaan terhadap pengurus koperasi.

3) Peluang

- a. Permintaan terhadap produk industri kecil yang terus meningkat;
- b. Yogyakarta terkenal sebagai tujuan wisata;
- c. Adanya institut seni dan desain;
- d. Banyaknya embrio koperasi;
- e. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi.

4) Tantangan

- a. Krisis keuangan global menurunkan permintaan atas produk kerajinan;
- b. Pesaing dari daerah luar yang memproduksi barang sejenis;
- c. Prekondisi *Eco-labeling* dari pasar global;
- d. Negara tujuan ekspor dan komoditi yang semakin mengerucut;
- e. Era perdagangan bebas yang menyuburkan ideologi kapitalis.

5) Isu-isu strategis

- a. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Bantul sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh;
- b. Penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat.;
- c. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah, swasta dan pengrajin untuk peningkatan kualitas produk dan pemasaran;

- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat;
- e. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi;
- f. Peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.

3.1.5 Pertanian dan Peternakan

1) Kekuatan

- a. Ketersediaan lahan pertanian/peternakan yang cukup luas;
- b. Ketersediaan lahan kritis untuk pengembangan pertanian maupun peternakan;
- c. Sarana irigasi yang memadai;
- d. Keuletan petani/peternak yang cukup tinggi;
- e. Kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas petani/peternak;
- f. Ketersediaan tenaga kerja yang murah;
- g. Terbentuknya Bantul Seed Center dan kelompok penangkar benih;
- h. Tersedianya petugas lapangan di setiap desa;
- i. Tersedianya sarana prasarana penyuluhan di setiap kecamatan;
- j. Sebagian besar wilayah merupakan bentanglahan *fluvio-volcanic flood plain*, memiliki tingkat kesuburan lahan yang cukup tinggi;
- k. Komitmen Bupati mencegah keluarnya pupuk kandang dari Kabupaten Bantul;
- l. Terbentuknya kelompok pengolah hasil pertanian, produsen pestisida organik dan pupuk organik.

2) Kelemahan

- a. Kepemilikan lahan yang sempit;
- b. Kepemilikan modal rendah;
- c. Nilai tukar hasil pemasaran produk yang belum optimal;
- d. Biaya produksi tinggi;
- e. Implementasi inovasi teknologi baru belum optimal;

- f. Ketersediaan pakan kurang memadai.
- g. Letak geografis yang tidak menguntungkan karena berada di daerah hilir sangat terpengaruh dengan kondisi daerah hulu terutama dalam hal ketersediaan air;
- h. Makin berkurangnya tenaga kerja yang berminat dalam pertanian.

3) Peluang

- a. Ketersediaan teknologi untuk pengembangan pertanian/peternakan;
- b. Terbukanya kerjasama dengan pihak investor dan perguruan tinggi;
- c. Banyak hasil penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan pertanian yang dapat diimplementasikan;
- d. Tersedianya sumber daya alam (bahan pembuatan pupuk organik, pestisida organik);
- e. Adanya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. Distribusi pupuk tertutup;
- g. Adanya dukungan maksimal dari Departemen Pertanian untuk pengembangan sektor pertanian seluruh Indonesia;

4) Ancaman

- a. Terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian/peternakan;
- b. Berlakunya pasar bebas yang dapat mendorong masuknya komoditas pertanian dari luar negeri dengan harga yang lebih murah;
- c. Adanya perubahan iklim akibat pengaruh dari pemanasan global.

5) Isu-isu strategis

- a. Pengembangan agribisnis;
- b. Pengembangan teknologi budidaya pertanian/peternakan;
- c. Pengembangan Bantul Seed Center;

- d. Pengembangan budidaya lahan pantai;
- e. Pengembangan pertanian terpadu (*Integreted Farming*);
- f. Pengembalian kesuburan lahan;
- g. Pengendalian penyakit ternak;
- h. Optimalisasi pengendalian hama terpadu.

3.1.6 Ketahanan Pangan

1) Kekuatan

- a. Ketersediaan komoditas yang ditanam;
- b. Ketersediaan bahan pangan dan cadangan pangan;
- c. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- d. Memiliki daya dukung memadai terhadap perkembangan usaha budidaya pertanian pangan dan pembangunan industri;
- e. Sarana dan prasarana distribusi pangan yang cukup memadai;
- f. Tersedianya sarpras Sistem Resi Gudang;
- g. Kebijakan Bupati Bantul dalam SE Bupati No. 511/1400/19 April 2010 tentang penggunaan Bahan Pangan Lokal pada Jamuan pada Acara-Acara Resmi.

2) Kelemahan

- a. Kepemilikan modal rendah;
- b. Pemasaran hasil belum optimal;
- c. Ketergantungan pada bahan makanan beras;
- d. Masih terdapat desa rawan pangan;
- e. Sosialisasi Pola Pangan Harapan belum optimal;
- f. Daya beli petani rendah;
- g. Penyuluhan pertanian belum optimal;
- h. Generasi muda enggan untuk bekerja di bidang pertanian.

3) Peluang

- a. Ketersediaan teknologi untuk pengolahan hasil pertanian;
- b. Ketahanan pangan merupakan program prioritas pemerintah;

- c. Terbukanya kerjasama dengan pihak investor;
- d. Terbukanya kesadaran untuk diversifikasi bahan pangan terutama bahan pangan lokal.

4) Ancaman

- a. Terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian;
- b. Perubahan iklim akibat pengaruh dari pemanasan global yang dapat menurunkan produksi pangan;
- c. Peningkatan populasi penduduk;
- d. Harga bahan pangan yang naik.

5) Isu Strategis

- a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
- b. Pemasaran produk olahan berbahan baku lokal;
- c. Peningkatan mutu pangan;
- d. Pengendalian alih fungsi lahan.

3.1.7 Kehutanan dan Perkebunan

1) Kekuatan

- a. Ketersediaan lahan kehutanan dan perkebunan yang cukup luas;
- b. Iklim yang sesuai untuk pengembangan tanaman hutan dan perkebunan;
- c. Keuletan petani yang cukup tinggi;
- d. Petani mudah dalam menerima teknologi / inovasi;
- e. Ketersediaan tenaga kerja yang murah.

2) Kelemahan

- a. Kepemilikan lahan yang sempit;
- b. Kepemilikan modal rendah;
- c. Pemasaran hasil yang belum optimal;
- d. Terjadinya pencurian kayu akibat tekanan ekonomi.

3) Peluang

- a. Ketersediaan lahan kritis untuk pengembangan kehutanan dan perkebunan;
- b. Ketersediaan teknologi untuk pengembangan kehutanan dan perkebunan;
- c. Terbukanya kerjasama dengan pihak investor;
- d. Terbukanya kesadaran untuk gerakan penghijauan lahan.

4) Ancaman

- a. Terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian;
- b. Berlakunya pasar bebas yang dapat mendorong masuknya komoditas kehutanan dan perkebunan dari luar negeri dengan harga yang lebih murah;
- c. Perubahan iklim akibat pengaruh dari pemanasan global yang dapat menurunkan produksi tanaman hutan dan perkebunan;
- d. Gangguan organisme pengganggu tanaman yang akan mengurangi produktivitas;
- e. Bencana alam (longsor, banjir, dan kekeringan) yang dapat merusak ekosistem kehutanan dan perkebunan.

5) Isu Strategis

- a. Rehabilitasi lahan pantai dan lahan marginal;
- b. Budidaya tanaman obat di bawah tegakan;
- c. Diversifikasi produk kelapa;
- d. Efisiensi pengelolaan budidaya tebu.

3.1.8 Perikanan dan Kelautan

1) Kekuatan

- a. Ketersediaan sumber daya kelautan yang luas;
- b. Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar;
- c. Keuletan nelayan yang cukup tinggi;
- d. Sumber ikan laut yang melimpah.

2) Kelemahan

- a. Kepemilikan lahan untuk perikanan air tawar sempit;
- b. Kepemilikan modal rendah;
- c. Pemasaran hasil yang belum optimal;
- d. Ketersediaan bibit ikan air tawar terbatas;
- e. Kemampuan sumber daya manusia belum optimal;
- f. Belum tersedianya dermaga untuk perahu nelayan dengan kapasitas besar (selama ini yang beroperasi hanya berkapasitas 1 gross ton);
- g. Letak geografis yang tidak menguntungkan karena berada di daerah hilir sangat terpengaruh dengan kondisi daerah hulu terutama dalam hal kualitas air;
- h. Sarana dan prasarana penangkapan ikan belum memadai;
- i. Belum optimalnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, Kelompok Lembaga Adat, dan Kelompok P3MP (Pusat Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir).

3) Peluang

- a. Ketersediaan lahan kritis untuk pengembangan perikanan air tawar;
- b. Ketersediaan teknologi untuk pengembangan kelautan dan perikanan;
- c. Terbukanya kerjasama dengan pihak investor.
- d. Kebutuhan bahan pangan protein yang semakin meningkat;

4) Ancaman

- a. Berlakunya pasar bebas yang dapat mendorong masuknya komoditas ikan laut dan ikan tawar dari luar negeri dengan harga yang lebih murah;
- b. Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu aktivitas nelayan;
- c. Gangguan penyakit ikan yang dapat menurunkan produksi;
- d. Terjadi polusi air laut.

- 5) Isu Strategis
 - a. Pengembangan sarana prasarana nelayan;
 - b. Integrasi perikanan laut dengan pariwisata dan industri kecil;
 - c. Pengembangan kawasan budidaya air tawar;
 - d. Peningkatan konsumsi makan ikan.

3.1.9 Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Kekuatan
 - a. Potensi dan kandungan sumberdaya mineral maupun bahan tambang di Kabupaten Bantul yang belum semua terukur dan tereksplorasi;
 - b. Potensi bagi pengembangan sumber energi yang dapat memanfaatkan aliransungai;
 - c. Potensi untuk dikembangkannya Energi Baru Terbarukan Dan Konversi Energi (EBTKE) dengan memanfaatkan sumberdaya lokal antara lain energi air, angin, surya, gelombang, dan biomass;
 - d. Kelompok masyarakat peduli energi baru terbarukan.
- 2) Kelemahan
 - a. Rencana Umum Energi Daerah (RUED) belum ada;
 - b. Pemetaan potensi sumber energi baru terbarukan belum ada;
 - c. Pengembangan teknologi energi masih rendah;
 - d. Kapasitas sumber daya manusia belum memadai;
 - e. Kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah;
 - f. Belum ada perda tentang energi dan sumber daya mineral.
- 3) Peluang
 - a. MOU antara lain dengan Kementrian Ristek, UGM, LAPAN, LIPI, BPPT, dan Bakosurtanal;
 - b. Keputusan Menteri ESDM bahwa PLN wajib membeli listrik yang dihasilkan oleh masyarakat;

- c. Pengembangan energi hibrid di kawasan pantai selatan;
- d. Pengembangan desa mandiri energi.

4) Tantangan

- a. Masih maraknya penambangan liar antara lain pasir, tanah untuk batubata, dan tanah urug;
- b. Alih teknologi energi baru terbarukan masih rendah.

5) Isu-isu strategis

- a. Pengembangan potensi energi baru terbarukan
- b. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA
- c. Perlunya kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan
- d. Penyusunan RUED
- e. Penyusunan *mapping* potensi sumber energi baru terbarukan
- f. Penyusunan perda tentang energi dan sumberdaya mineral
- g. Kerjasama di bidang Ristek.

3.1.10 Pariwisata

1) Kekuatan

- a. Bantul merupakan bagian dari Provinsi DI Yogyakarta, sebagai destinasi wisata utama di Indonesia setelah Bali;
- b. Kabupaten Bantul dekat dengan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pintu gerbang daerah tujuan wisata Internasional;
- c. Keragaman dan variasi objek dan daya tarik wisata (alam, budaya, kerajinan) yang tersebar di hampir seluruh Kabupaten Bantul;
- d. Kawasan brand image “Parangtritis” dan “Kasongan” yang sudah relatif terkenal;
- e. Fasilitas pendukung pariwisata sudah tersedia;
- f. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia pelaku dan asosiasi bidang pariwisata.

2) Kelemahan

- a. Informasi mengenai destinasi wisata belum komprehensif;
- b. Belum seluruh destinasi wisata memiliki rencana pengembangan yang matang;
- c. Koordinasi antar *stakeholder* belum maksimal;
- d. Keterbatasan lahan dalam pengembangan destinasi wisata.

3) Peluang

- a. Akses jaringan informasi dan komunikasi baik nasional maupun internasional;
- b. Kemudahan akses (darat & udara) di DIY maupun Jawa Tengah;
- c. Keinginan investor (swasta) dalam berinvestasi di bidang pariwisata;
- d. Kuatnya komitmen pemerintah pusat terhadap pengembangan pariwisata;
- e. Kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan produk khas/unik;
- f. Rencana pengembangan jaringan jalan lintas selatan;
- g. Keberadaan Java Promo sebagai lembaga koordinasi dan promosi bersama dalam bidang pariwisata antara 15 kab/kota;

4) Tantangan

Jenis dan keragaman objek wisata yang dimiliki relatif sama dengan objek wisata yang dimiliki oleh daerah di sekitar (kompetisi);

5) Isu-isu strategis

- a. Pengembangan pariwisata melalui agrowisata dan ekowisata;
- b. Peningkatan jumlah wisatawan lama tinggal;
- c. Pengembangan desa wisata (*community based tourism*);
- d. Penganekaragaman tujuan wisata.

3.2. SOSIAL BUDAYA DAERAH

3.2.1 Kependudukan

- 1) Kekuatan
 - a. Komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program kependudukan;
 - b. Adanya kelembagaan yang menangani kependudukan.
- 2) Kelemahan
 - a. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung mengalami peningkatan;
 - b. Keterbatasan SDM yang menangani administrasi kependudukan;
 - c. Sarana dan prasarana belum optimal.
- 3) Peluang
 - a. Tersedianya SPM bidang kependudukan;
 - b. Peraturan pemerintah tentang SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- 4) Tantangan
 - a. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bidang kependudukan;
 - b. Pencatatan kependudukan ganda.
- 5) Isu Strategis
 - a. Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, murah, dan akuntabel;
 - b. Mempertahankan struktur demografi ideal.

3.2.2 Ketenagakerjaan

- 1) Kekuatan
 - a. Terdapat tenaga kerja yang terdidik;
 - b. Komitmen pemerintah untuk mengatasi pengangguran sangat tinggi;
 - c. Terdapat Balai Latihan Kerja.

- 2) Kelemahan
 - a. Jiwa kewirausahaan tenaga yang tersedia belum optimal;
 - b. Kesempatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja;
 - c. Belum terintegrasinya lulusan pendidikan dengan keinginan dunia usaha;

- 3) Peluang
 - a. Perkembangan sektor ekonomi dan peluang penyerapan tenaga kerja ;
 - b. Prioritas pembangunan nasional bertumpu pada pertumbuhan ekonomi.

- 4) Tantangan:
 - a. Jaminan perlindungan tenaga kerja masih kurang;
 - b. Permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian.

- 5) Isu Strategis
 - a. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang tersedia
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produktif
 - c. Perlindungan tenaga kerja

3.2.3 Transmigrasi

- 1) Kekuatan
 - a. Minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
 - b. Fasilitasi pemerintah terhadap transmigran cukup memadai.

- 2) Kelemahan
 - a. Transmigran belum optimal.

- 3) Peluang
 - a. Kerjasama pemerintah dan swasta yang semakin baik dalam program transmigrasi, terutama transmigrasi lokal;

- b. Adanya peraturan pemerintah tentang kerjasama antar daerah di bidang transmigrasi.

4) Tantangan

- a. Daerah tujuan transmigrasi yang semakin berkurang;
- b. Berkurangnya minat bertransmigrasi yang disebabkan oleh mudahnya usaha sektor informal;
- c. Penentuan kuota transmigrasi oleh Pemerintah Pusat.

5) Isu Strategis

- a. Penguatan program transmigrasi agar tidak semata program penyebaran penduduk tetapi program peningkatan kualitas hidup.
- b. Diperlukan jaminan dan perlindungan bagi peningkatan kualitas hidup transmigran

3.2.4 Kesejahteraan Sosial

1) Kekuatan

- a. Kinerja kesejahteraan terus membaik;
- b. Budaya masyarakat untuk saling menolong memberikan ruang gerak luas bagi pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2) Kelemahan

- a. Penyandang masalah kesejahteraan sosial bersifat spesifik sehingga diperlukan upaya spesifik untuk mengatasinya;
- b. Akurasi data dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial belum ada.

3) Peluang

- a. Kemampuan masyarakat untuk merespon kesulitan ekonomi dengan mengembangkan sektor informal;
- b. Pemberian ruang gerak dan peluang yang sama bagi sektor formal maupun informal;
- c. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

4) Tantangan

- a. Peningkatan akses masyarakat kepada sumber daya produktif;
- b. Menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan ketrampilan;
- c. Alih fungsi lahan yang dapat menjadi salah satu pemicu kemiskinan;
- d. Upah di sektor informal yang sangat rendah;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana publik terbatas.

5) Isu Strategis

- a. Penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Penurunan angka kemiskinan;
- c. Pencegah penyebaran penyakit.

3.2.5 Kesehatan

1) Kekuatan

- a. Kawasan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi;
- b. Posyandu masih tumbuh dan berkembang dengan baik;
- c. Program UKS di sebagian besar sekolah;
- d. Seluruh wilayah sudah terjangkau pelayanan kesehatan;
- e. Sebagian besar kota kecamatan sudah memiliki pelayanan farmasi;
- f. Terdapat potensi dan kelembagaan pengobat tradisional yang terlatih;
- g. Sebagian besar puskesmas telah memiliki rawat inap dan buka 24 jam;
- h. Peran Organisasi PKK dalam kegiatan pembangunan bidang kesehatan.

2) Kelemahan

- a. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk belum memadai;
- b. Sebagian besar tenaga puskesmas lebih terkonsentrasi pada kegiatan pelayanan dalam gedung;

- c. Mekanisme dan pelaksanaan SOP layanan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit belum optimal;
- d. Belum ada Sistem Pelayanan Emergency (*Emergency Support System*) secara terpadu;
- e. Regulasi dan standarisasi perijinan praktik tenaga dan fasilitas kesehatan belum optimal;
- f. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi;
- g. Standarisasi pelayanan kesehatan formal, informal, dan tradisional belum optimal;
- h. PNS kesehatan yang merangkap bekerja di layanan swasta dapat melemahkan pelayanan di fasilitas pemerintah.

3) Peluang

- a. Adanya program Corporate Social Responsibility (CSR);
- b. Peran masyarakat sebagai penggerak pembangunan bidang kesehatan;
- c. Adanya kontribusi lembaga pendidikan keahlian bidang kesehatan di luar Kabupaten Bantul;
- d. Peran lembaga kesehatan swasta dalam mewujudkan pelayanan unggulan di bidang kesehatan;
- e. Komitmen anggaran dari NGO.

4) Tantangan

- a. Peraturan perundang-undangan mensyaratkan besarnya anggaran sektor kesehatan sebesar 10% dari total APBD di luar gaji;
- b. Kompetensi kader sebagai promotor kesehatan belum memadai;
- c. Peran kepala desa dalam mengelola desa siaga belum optimal;
- d. Adanya aturan pemerintah yang mengizinkan rangkap tempat praktek yang berbeda;
- e. Penerapan sistem kerja berbasis *performance* belum memadai.

5) Isu Strategis

- a. Dibutuhkan kebijakan layanan rumah sakit yang berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. Penguatan fungsi dinas kesehatan dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
- c. Penguatan kontribusi SKPD dan *stakeholder* dalam pembangunan kesehatan;
- d. Komitmen politik dalam kebijakan desa bebas empat masalah kesehatan;
- e. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan bidang kesehatan;
- f. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan layanan medik.

3.2.6 Pendidikan

1) Kekuatan

- a. Tingkat kelulusan SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Bantul cukup tinggi;
- b. Nilai APS Kabupaten Bantul untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun melebihi nilai APS Propinsi DIY dan nilai APS nasional;
- c. Persentase melek huruf di Kabupaten Bantul dari tahun 2009 cukup tinggi;
- d. Rasio murid-guru, rasio murid-kelas, dan rasio murid-sekolah sudah optimal;
- e. Adanya kebijakan program wajib belajar 12 tahun;
- f. Tenaga pendidik yang menempuh pendidikan S2 cukup banyak.

2) Kelemahan

- a. Masih ada anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan;
- b. Guru yang telah bersertifikasi belum mampu memenuhi jam mengajar per minggu;

- c. Rendahnya minat guru dalam melakukan karya ilmiah;
- d. Kesejahteraan guru honorer masih kurang;
- e. Sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal;
- f. Muatan lokal masuk dalam kurikulum belum optimal.

3) Peluang

- a. Adanya ketentuan yang mensyaratkan APBN minimal 20% untuk sektor pendidikan.
- b. Adanya program sertifikasi guru.
- c. Banyaknya program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, NGO, dan perguruan tinggi

4) Tantangan

- a. Peraturan tentang standar BOS tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Peningkatan standar kelulusan siswa (UAN dan UASBN) dan jaminan penerimaan siswa baru di sekolah unggulan;
- c. Banyak daerah membuka kelas internasional untuk SLTP dan SLTA;
- d. Pembatasan kebijakan kuota tentang penerimaan siswa baru di Pemkab lain;
- e. Pendidikan bermutu bagi kaum miskin.

5) Isu Strategis

- a. Perbaikan sarana/prasarana pendidikan;
- b. Peningkatan kualitas pendidik;
- c. Peningkatan jumlah dan kelulusan terbaik;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing;
- e. Penyediaan anggaran beasiswa bagi warga miskin yang berprestasi;
- f. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang lebih optimal;

- g. Pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan muatan lokal, budi pekerti, kebanggaan warga negara, kepedulian lingkungan hidup, dan mitigasi bencana.

3.2.7 Kebudayaan

1) Kekuatan

- a. Keanekaragaman budaya;
- b. Event yang berhubungan dengan kebudayaan masyarakat lokal;
- c. Kebijakan yang mendukung dan mengembangkan kebudayaan lokal;
- d. Adanya berbagai lembaga budaya;
- e. Banyak budayawan.

2) Kelemahan

- a. Budaya lokal luntur akibat masuknya budaya luar;
- b. Pengelolaan terhadap aset budaya yang rendah;
- c. Promosi budaya lokal masih kurang;
- d. Minat generasi untuk mempelajari budaya lokal masih kurang.

3) Peluang

- a. Kebudayaan dijadikan sebagai prioritas RPJMD Provinsi DIY;
- b. DIY merupakan daerah tujuan wisata budaya setelah Pulau Dewata;
- c. Festival budaya nasional dan internasional;
- d. Minat orang asing terhadap budaya daerah.

4) Tantangan

- a. Kesamaan jenis budaya dengan daerah lain;
- b. Persaingan dengan daerah lain dalam mempromosikan budaya daerah.

5) Isu Strategis

- a. Melestarikan ketahanan budaya;
- b. Memasyarakatkan budaya tradisional.

3.2.8 Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kekuatan
 - a. Jumlah SDM yang diberdayakan;
 - b. Kelembagaan masyarakat yang diberdayakan
 - c. Adanya program pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang mendukung pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - d. Peran serta masyarakat (termasuk perempuan dan anak-anak) dalam menyukseskan program pemerintah.

- 2) Kelemahan
 - a. Sikap mental sebagian masyarakat yang masih bergantung pada bantuan dan fasilitasi pemerintah;
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana.

- 3) Peluang
 - a. Kohesifitas sosial yang kuat;
 - b. Terdapatnya kelompok masyarakat (pokmas) yang efektif;
 - c. Potensi sumberdaya masyarakat (termasuk perempuan dan anak-anak) yang cukup;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat;
 - e. Banyak NGO yang membantu masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan masyarakat;
 - f. Program CSR (*corporate social responsibility*) yang langsung menyentuh masyarakat sekitar.

- 4) Tantangan
 - a. Sikap mental dan persepsi yang keliru terhadap peran pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat, pemerintah masih dianggap sebagai pemberi;
 - b. Ketentuan pemerintah tentang *sharing* dan *clustering* yang membebani pelaksanaan program.

- 5) Isu-isu Strategis
 - a. Penanaman pengertian bahwa pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat;
 - b. Inovasi program pemberdayaan masyarakat;
 - c. Desain program bantuan masyarakat yang tidak membuat masyarakat menjadi malas dan apatis;
 - d. Sinergisitas antara pemerintah daerah, LSM/NGO dan swasta dalam merumuskan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat;
 - e. Peningkatan pengarusutamaan gender.

3.2.9 Pemuda dan Olahraga

- 1) Kekuatan
 - a. Peningkatan peran serta kepemudaan;
 - b. Kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
 - c. Tersedianya stadion olah raga;
 - d. Adanya lembaga kepemudaan dan cabang olah raga;
 - e. Adanya sistem model bapak angkat pada setiap cabang olah raga.
- 2) Kelemahan
 - a. Pengelolaan pemuda dan olah raga belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana bidang olah raga masih perlu ditingkatkan.
- 3) Peluang
 - a. Adanya kompetisi di berbagai cabang olah raga baik nasional maupun internasional;
 - b. Perhatian dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam mengembangkan olah raga nasional;
 - c. Adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi dalam bidang olah raga.

- 4) Tantangan
 - a. Persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh prestasi olahraga dengan daerah lain;
 - b. Permasalahan migrasi atlet antar daerah.

- 5) Isu Strategis
 - a. Menumbuhkan kebanggaan dan jiwa nasionalisme;
 - b. Mewujudkan prestasi di tingkat nasional dan internasional;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana.

3.2.10 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Kekuatan
 - a. Ketersediaan jaringan ISP (*internet service provider*) di Indonesia, DI Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul;
 - b. Sarana komunikasi (verbal dan data) tersedia relatif mudah dan murah;
 - c. Kemudahan mengakses internet dari berbagai tempat, rumah, kantor, sekolah, warnet, dan lain-lain;
 - d. Adanya berbagai sarana dan lembaga iptek;
 - e. Adanya kluster lokasi pengembangan energi hybrid.

- 2) Kelemahan
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) komunikasi belum merata di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. Penetrasi telepon tetap (*fixed wireline*) di Kabupaten Bantul masih lemah;
 - c. Tenaga fungsional peneliti belum ada;
 - d. Lembaga pengelola penelitian belum ada;
 - e. Belum seluruh masyarakat (termasuk pemerintah) “*melek*” teknologi.

- 3) Peluang
 - a. Dukungan kebijakan pemerintah daerah DIY melalui Pergub Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*.
 - b. Pertumbuhan penggunaan telepon seluler di DIY cukup tinggi.
 - c. Adanya berbagai event penganugrahan Iptek nasional dan internasional.

- 4) Tantangan
 - a. Investasi awal dalam pengadaan infrastruktur pendukung Iptek relatif mahal.
 - b. Adanya penyalahgunaan Iptek untuk penipuan
 - c. Persaingan global dalam Iptek
 - d. Adanya rencana pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

- 5) Isu Strategis
 - a. Pengembangan teknologi hybrid
 - b. Peningkatan inovasi yang memanfaatkan Iptek
 - c. Peningkatan sinergitas pengembangan Iptek melalui kerjasama dengan berbagai pihak

3.3. PRASARANA DAN SARANA DAERAH

3.2.1 Transportasi

- 1) Kekuatan
 - a. Jalan kabupaten sepanjang 566,75 km (92,73%) dalam kondisi mantap;
 - b. Seluruh ibu kota kecamatan telah terakses angkutan transportasi umum;
 - c. Seluruh desa yang terpisahkan oleh sungai sudah terhubung dengan jembatan;
 - d. Moda transportasi yang ada hanya angkutan darat.

2) Kelemahan

- a. Minimnya rambu-rambu lalu-lintas;
- b. Fungsi terminal belum optimal;
- c. Sistem manajemen transportasi belum ada;
- d. Tidak ada kombinasi moda transportasi;
- e. *Inland port* (pelabuhan peti kemas darat) Sedayu belum berfungsi.

3) Peluang

- a. Adanya jalan provinsi dan jalan negara dapat mempermudah hubungan kegiatan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah lokal;
- b. Ada rencana pembangunan terminal peti kemas di stasiun KA (kombinasi antara angkutan barang dengan angkutan kereta api);
- c. Adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

4) Tantangan

- a. Jumlah pemakaian kendaraan pribadi tinggi;
- b. Aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata serta masih banyak tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi;
- c. Sistem manajemen transportasi sebagai salah satu solusi pengurangan kemacetan;
- d. Pemahaman/kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas jalan yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan pergerakan lalu lintas jalan masih rendah;
- e. Usia kendaraan umum AKDP rata-rata di atas 10 tahun;
- f. Pengendalian emisi gas buang (CO₂) belum optimal.

5) Isu-isu Strategis

- a. Penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu dengan dukungan penuh terhadap kebijakan sistem manajemen transportasi;

- b. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya, dan wisata serta sentra-sentra industri.
- c. Optimalisasi sarana angkutan perintis;
- d. Peningkatan rambu-rambu lalu-lintas.

3.2.2 Sumberdaya Air

1) Kekuatan

- a. Terdapat DAS Opak, Oya, dan Progo;
- b. Adanya kelembagaan pengelola jaringan irigasi sampai tingkat tersier;
- c. Terdapat daerah/jaringan irigasi sampai ke tingkat usaha tani;
- d. Terdapat SKPD yang menangani sumber daya air;
- e. Adanya Perda Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

2) Kelemahan

- a. Efisiensi sarana dan prasarana irigasi belum tercapai;
- b. Sumber daya manusia pengelola jaringan belum sesuai dengan luas jaringan irigasi yang harus dikelola;
- c. Kondisi sebagian jaringan irigasi belum optimal;
- d. Posisi geografis di daerah hilir yang berpengaruh terhadap suplai dan ketersediaan air.

3) Peluang

- a. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Tingginya curah hujan;
- c. Adanya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Progo, Opak, dan Serang;
- d. Adanya Program Kali Bersih.

- 4) Tantangan
 - a. Penyusunan pola pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai belum mendasarkan pada data yang ada dalam Sistem Informasi SDA;
 - b. Kurangnya koordinasi antar wilayah dan sektor dalam pengelolaan SDA;
 - c. Tindakan-tindakan perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif khususnya berkaitan dengan penyediaan air, pencemaran air, termasuk kontrol yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan.

- 5) Isu-isu Strategis
 - a. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
 - b. Rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi;
 - c. Manajemen sumberdaya air yang profesional dan efektif;
 - d. Pengurangan bahaya banjir dan kekeringan.

3.2.3 Air Minum/Air Bersih

- 1) Kekuatan
 - a. Air minum dikelola oleh perusahaan daerah;
 - b. Ketersediaan sumber air bersih masih cukup melimpah;
 - c. Adanya regulasi tentang air minum.

- 2) Kelemahan
 - a. Belum semua kecamatan terjangkau oleh pelayanan PDAM;
 - b. Ketersediaan sumber air belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c. Kualitas pelayanan baik distribusi, manajemen operasional maupun kualitas dan kuantitas hasil produksi belum optimal.

- 3) Peluang
 - a. Adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan air minum/air bersih;
 - b. Adanya utilitas produksi dan jaringan air minum/air bersih.

- 4) Tantangan
 - a. Sumber-sumber air banyak dimanfaatkan oleh daerah hulu;
 - b. Biaya pemanfaatan air melalui PDAM dirasa belum sebanding dengan pemanfaatan air sumur;
 - c. Masih banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan air sumur.

- 5) Isu Strategis
 - a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih;
 - b. Peningkatan manajemen sumber air yang sudah ada;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi air tingkat rumah tangga;
 - d. Pengembangan sumur komunal;

3.2.4 Air Limbah/Sanitasi

- 1) Kekuatan
 - a. Ketersediaan jaringan limbah/sanitasi;
 - b. Terdapat regulasi pengelolaan air limbah;
 - c. Adanya laboratorium pengujian baku mutu air permukaan.

- 2) Kelemahan
 - a. Belum semua institusi pemerintah maupun swasta yang menghasilkan limbah berdampak pencemaran belum memiliki fasilitas pengolahan limbah;
 - b. Pengelolaan limbah yang ada belum optimal;
 - c. Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan perijinan yang mengharuskan adanya fasilitas pengolahan limbah belum optimal;
 - d. Infrastruktur pengelolaan air limbah belum mencakup seluruh wilayah.

- 3) Peluang
 - a. Adanya infrastruktur pengelolaan air limbah;
 - b. Terdapat jaringan pengelolaan limbah antar daerah;
 - c. Adanya regulasi pemerintah tentang pengelolaan limbah.

4) Tantangan

- a. Penurunan kualitas air dan tanah;
- b. Masih ada keluarga yang belum memiliki jamban;
- c. Kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman masih kurang;
- d. Masih ada anggota masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jamban.

5) Isu Strategis

- a. Optimalisasi pengelolaan alir limbah;
- b. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah;
- c. Kampanye kesehatan lingkungan;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap bangunan yang harus memiliki fasilitas pengolahan limbah.

3.2.5 Persampahan

1) Kekuatan

- a. Adanya tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- b. Terdapat lembaga pengelola sampah;
- c. Terdapat prasarana dan sarana pengangkutan sampah;
- d. Adanya alat pengolah sampah di beberapa pasar kabupaten.

2) Kelemahan

- a. Tempat penampungan sementara belum menyebar di semua wilayah;
- b. Jumlah sumber daya manusia petugas pengumpul sampah masih terbatas;
- c. Sarana dan prasarana yang belum optimal dan menjangkau seluruh wilayah;
- d. Belum ada *masterplan* persampahan.

- 3) Peluang
 - a. Kerjasama pengelolaan Persampahan;
 - b. Adanya jaringan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota di Provinsi DIY;
 - c. Adanya bank sampah;
 - d. Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - e. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah.

- 4) Tantangan
 - a. Peningkatan volume sampah;
 - b. Tempat pembuangan sampah ilegal;
 - c. Perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan;
 - d. Usia teknis peralatan pengolah sampah di TPA Piyungan sudah tidak layak;
 - e. Masuknya sampah ilegal dari luar daerah.

- 5) Isu Strategis
 - a. Penyusunan *masterplan* persampahan;
 - b. Penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengolahan sampah;
 - c. Pengelolaan sampah terpadu;
 - d. Memperpanjang umur teknis TPA Piyungan.

3.2.6 Perumahan, Permukiman, dan Drainase

- 1) Kekuatan
 - a. Ketersediaan kawasan khusus perumahan dan permukiman;
 - b. Tersedianya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. Adanya dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) yang berbasis mitigasi bencana di setiap desa;
 - d. Potensi sebagai pusat industri dan permukiman;
 - e. Adanya jaringan drainase di setiap perumahan dan permukiman.

- 2) Kelemahan
 - a. Secara geografis potensi rawan bencana;
 - b. Sebagian besar masyarakat menginginkan permukiman di pusat kota;
 - c. Sarana dan prasarana belum memadai;
 - d. Saluran drainase tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
 - e. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase masih kurang.

- 3) Peluang
 - a. Kebutuhan akan perumahan yang besar;
 - b. Adanya kebijakan pemerintah tentang penyediaan/peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan;
 - c. Adanya pembagian kewenangan penanganan drainase.

- 4) Tantangan
 - a. Melonjaknya harga bahan bangunan;
 - b. Terdapat *backlog* yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;

- 5) Isu Strategis
 - a. Pengembangan rusunawa/rusunami;
 - b. Penanganan daerah kumuh;
 - c. Konsep dan implementasi RPP;
 - d. Pengelolaan drainase antar wilayah ;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan drainase.

3.2.7 Listrik

- 1) Kekuatan
 - a. Sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi, seperti angin, matahari, ombak, air;
 - b. Adanya kerjasama dengan pemerintah pusat untuk penciptaan sumber energi listrik.

- 2) Kelemahan
 - a. Kurangnya implementasi sumber energi listrik terbarukan;
 - b. Inefisiensi pemakaian listrik.
 - c. Peluang
 - d. Inovasi masyarakat dalam pengembangan energi listrik berbasis energi baru terbarukan;
 - e. Adanya kebijakan pemerintah tentang diversifikasi energi.

- 3) Tantangan
 - a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap penggunaan energi secara mandiri;
 - b. Penciptaan teknologi untuk mengolah sumber energi belum optimal.

- 4) Isu Strategis
 - a. Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil;
 - b. Pengembangan energi listrik berbasis energi baru terbarukan;
 - c. Penghematan energi listrik;
 - d. Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan;
 - e. Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik;
 - f. Desa mandiri energi (listrik).

3.2.8 Komunikasi dan Informasi

- 1) Kekuatan
 - a. Terdapat beberapa sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berbasis IPTEK;
 - b. Sebagian besar instansi pemerintah telah terhubung dengan koneksi intranet dan internet.

- 2) Kelemahan
 - a. Belum adanya pelayanan kepada masyarakat secara *online*;
 - b. Ketersediaan data terbaru (*up to date*) masih kurang;
 - c. Penyediaan *one stop information service* masih terbatas.

- 3) Peluang
 - a. Keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi terkini
 - b. Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi daerah.
- 4) Tantangan
 - a. Biaya internet yang relatif masih mahal.
 - b. Belum adanya komunikasi lembaga sosial dan lembaga media tradisional menjadi lembaga komunikasi strategis
- 5) Isu Strategis
 - a. Pengembangan Digital Government Services/E-gov.
 - b. Pengembangan infrastruktur jaringan.
 - c. Pelayanan kepada masyarakat secara on line.
 - d. Pengembangan komunikasi melalui media elektronik dan cetak
 - e. Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu.
 - f. Pemberdayaan informasi masyarakat memanfaatkan sumberdaya komunikasi sosial dan lembaga media tradisional serta kelompok strategis lain.
 - g. Penyerapan aspirasi dan opini publik.

3.4. PEMERINTAHAN UMUM

3.4.1 Pemerintahan

- 1) Kekuatan
 - a. Adanya struktur organisasi yang sudah berorientasi pada urusan wajib yang dimiliki;
 - b. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur;
 - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - d. Adanya perda tentang organisasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Adanya perda Transparansi;
 - f. Kebijakan *empathic governance* telah tertuang dalam RPJPD.

2) Kelemahan

- a. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal;
- b. Kurangnya profesionalisme dan proporsi aparatur pemerintah daerah;
- c. Kualitas sarana dan prasarana publik yang belum memadai;
- d. Belum optimalnya penerapan e-government;
- e. Koordinasi antar lembaga pemerintahan yang belum optimal.

3) Peluang

- a. Desentralisasi manajemen pemerintahan yang semakin nyata;
- b. Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Komitmen yang kuat terhadap tumbuhnya *empathic governance*;
- d. Tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel;
- e. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik yang semakin baik;
- f. Ketersediaan sumberdaya aparatur yang telah mencukupi baik kualifikasi maupun kompetensi;
- g. Jaringan antar pemerintah daerah yang semakin mantap;
- h. Banyaknya lembaga donor yang memberi bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM;
- i. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. Adanya tawaran kerjasama/kemitraan dari pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri;
- k. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- l. Kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan tujuan wisata yang selaras dengan potensi wilayah Kabupaten Bantul;
- m. Keterbukaan akses pemerintah daerah pada luar negeri.

4) Tantangan

- a. Aspirasi yang berkembang di masyarakat membutuhkan wadah yang cukup;
- b. Adanya egoisme sektoral;
- c. Lemahnya koordinasi antar wilayah;
- d. Persaingan global, tenaga ahli, dan teknologi;
- e. Persaingan kebijakan pengembangan wilayah (perumahan, perkotaan, kelautan, jasa, dan perdagangan).

5) Isu-isu Strategis

- a. Dibutuhkannya tata kelola pemerintahan yang semakin mengarah pada *empathic governance*;
- b. Penguatan sumberdaya aparatur yang inovatif menuju pelayanan prima;
- c. Implementasi otonomi daerah yang semakin riil;
- d. Terukurnya penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur;
- f. Implementasi pembangunan melalui sinergi pusat dan daerah;
- g. Reformasi birokrasi;
- h. Penerapan *empathic governance*.

3.4.2 Pembentukan Peraturan, Penegakan hukum dan Budaya Hukum

1) Kekuatan

- a. Reputasi dan kredibilitas pemerintah daerah yang cukup baik di mata masyarakat;
- b. Adanya program-program yang berorientasi gender;
- c. Adanya program-program penegakan hukum .

2) Kelemahan

- a. Kelembagaan Kelompok Sadar Hukum belum optimal;
- b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;

- c. Sosialisasi tentang hak asasi manusia, perlindungan anak dan perempuan serta kelompok rentan masih kurang;
- d. Sosialisasi perda belum optimal;
- e. Upaya penegakan hukum belum optimal;
- f. SDM legal drafting belum memadai.

3) Peluang

- a. Sudah ada lembaga tata usaha negara;
- b. Lembaga dan konsultan hukum yang cukup banyak;
- c. Adanya kajian akademik dalam penyusunan peraturan daerah;
- d. Program Pemberantasan KKN merupakan program prioritas Pemerintah.

4) Tantangan

- a. Adanya beberapa lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang cenderung resisten terhadap kebijakan;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- c. Tersedianya ruang yang cukup luas untuk merumuskan regulasi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah;
- d. Adanya peraturan daerah yang bermasalah atau tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

5) Isu-isu Strategis

- a. Menumbuhkan budaya taat hukum bagi masyarakat dan aparatur;
- b. Peningkatan kualitas SDM bidang hukum;
- c. Penegakan hukum yang manusiawi.

3.4.3 Partisipasi di Bidang Politik

1) Kekuatan

- a. Terjalinnnya hubungan yang sinergis antara ulama dan umaro;
- b. Demokratisasi telah berjalan dengan baik;
- c. Kondisi kamtibmas yang mantap;

- d. Tidak ada gejolak politik yang berarti;
 - e. Hubungan antar lembaga sosial dan politik berjalan dengan harmonis;
 - f. Partisipasi politik masyarakat tinggi.
- 2) Kelemahan
- a. Pemahaman politik masyarakat belum optimal;
 - b. Representasi kepentingan golongan masyarakat belum ideal;
 - c. Sarana dan prasarana sosialisasi politik belum memadai.
- 3) Peluang
- a. Sudah ada aturan netralitas birokrasi publik dalam proses rekrutmen politik;
 - b. Stabilitas politik DIY mantap;
 - c. Partai politik yang semakin menampakkan peran dan fungsinya.
- 4) Tantangan
- a. Masyarakat semakin kritis dalam menyuarakan aspirasinya;
 - b. Terdapat beberapa lembaga pendamping masyarakat yang mempunyai kepedulian pada permasalahan politik;
 - c. Belum ada kepastian tentang status keistimewaan DIY.
- 5) Isu-isu Strategis
- a. Pengelolaan penjangkaran aspirasi masyarakat yang kapabel;
 - b. Tata kelola pemerintahan yang demokratis;
 - c. Adanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik;
 - d. Kebijakan publik yang bermutu dan untuk kesejahteraan sebagian besar masyarakat.

3.5 LINGKUNGAN HIDUP

1) Kekuatan

- a. Adanya fenomena langka gumuk pasir;
- b. Persentase vegetasi masih cukup tinggi;
- c. Memiliki variasi ketinggian tanah beragam;
- d. Memiliki pantai yang cukup luas dengan vegetasi yang memadai;
- e. Ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
- f. Adanya kelembagaan yang menangani lingkungan hidup.

2) Kelemahan

- a. Sumber daya manusia yang menangani lingkungan hidup masih terbatas;
- b. Sarana dan prasarana penunjang kelestarian lingkungan masih terbatas;
- c. Penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup belum optimal;
- d. Belum memiliki sistem informasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam serta kebencanaan yang baik;
- e. Monitoring dan evaluasi pembangunan berwawasan lingkungan masih belum optimal;
- f. Rawan terhadap bencana alam (gempa, banjir, longsor, dll.).

3) Peluang

- a. Adanya organisasi kemasyarakatan pelestari lingkungan hidup;
- b. Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Adanya program *green and clean*;
- d. Dunia internasional menaruh perhatian khusus untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup dalam upaya menghambat akselerasi pemanasan global (*global warming*).

4) Tantangan

- a. Kesadaran hukum masyarakat kurang dan supremasi hukum lingkungan masih lemah;
- b. Perkembangan perundang-undangan nasional dan internasional tidak selalu sinergi dengan kepentingan daerah;
- c. Belum optimalnya budaya cinta lingkungan;
- d. Disiplin dan kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga kelestarian sumberdaya alam seperti air, lahan dan hutan masih rendah.

5) Isu-isu strategis

- a. Peningkatan kualitas lingkungan;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan;
- c. Pengendalian pencemaran udara;
- d. Upaya konservasi sumberdaya air tanah;
- e. Memasyarakatkan budaya cinta kebersihan dan lingkungan;
- f. *Sustainable development*.

3.6 TATA RUANG

1) Kekuatan

- a. Adanya regulasi tentang penataan ruang;
- b. Telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- c. Terkoordinirnya antar sektor dalam pengendalian tata ruang;
- d. Adanya dokumen perencanaan penataan ruang.

2) Kelemahan

- a. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan penataan ruang dan produk dokumen perencanaan;
- b. Belum semua wilayah kecamatan memiliki dokumen rencana detail tata ruang;

- c. Minimnya sumber daya manusia yang menguasai masalah penataan ruang;
- d. Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang belum optimal;
- e. Keyakinan masyarakat terhadap hak milik mutlak.

3) Peluang

- a. Terdapat undang-undang tentang penataan ruang;
- b. Adanya perda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi DIY;
- c. Adanya program-program pemerintah terkait penataan ruang.

4) Tantangan

- a. Semakin tingginya investasi yang membutuhkan lahan;
- b. Adanya undang-undang tanaman pangan berkelanjutan.

5) Isu-isu strategis

- a. Pemantapan aksesibilitas wilayah dengan kawasan luar;
- b. Pemantapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan;
- c. Pengembangan dan pemantapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan kondisi dan pola ruang yang telah ada;
- d. Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan;
- e. Pengembangan ruang yang diperkaya dengan konsep pengembangan kawasan strategis;
- f. Peningkatan pemahaman tentang tata ruang.

3.7 PENANGGULANGAN BENCANA

1) Kekuatan

- a. Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan bencana;
- b. Karakteristik masyarakat yang berkaitan dengan budaya gotong royong;
- c. Adanya Perda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- d. Adanya dokumen perencanaan yang berbasis mitigasi bencana.

2) Kelemahan

- a. Kabupaten Bantul berada pada kawasan rawan bencana;
- b. Sosialisasi tentang mitigasi bencana belum optimal;
- c. Sistem peringatan dini terhadap bencana belum optimal;
- d. Keterbatasan SDM yang menangani kebencanaan;
- e. Keterbatasan sarana prasarana.

3) Peluang

- a. Kabupaten Bantul mempunyai akses ke dunia internasional pasca bencana gempa bumi;
- b. Banyaknya teknologi tentang peringatan dini bencana.

4) Tantangan

- a. Bantul dilewati oleh sesar opak;
- b. Banyaknya daerah di sekitar yang potensial terkena bencana.

5) Isu Strategis

- a. Sistem manajemen mitigasi bencana;
- b. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani bencana;
- c. Pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”. Visi ini dirasakan sebagai masih tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, visi pembangunan Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu “**Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis**”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya dapat memproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. **Profesional** dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang dilerantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara

pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan *kerasan*, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreativitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

4.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

4.3.1. Tujuan MISI 1

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik

Dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah;
 - b. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;
 - c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat serta mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memenuhi syarat Sistem Manajemen Mutu Dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - b. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin;
 - c. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan;
 - d. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Dengan sasaran:
- a. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
 - b. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
- 4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah Dengan sasaran:
- a. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum.

4.3.2. Tujuan MISI 2

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri);
 - b. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.

- 3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Dengan sasaran:
 - a. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
- 4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
 - b. Meningkatnya kualitas perpustakaan;
 - c. Meningkatnya sekolah berkualitas.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal.
- 6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif;
 - b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan professional.
- 7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor;
 - b. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - c. Tersedianya informasi melalui media massa;
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna;
 - e. Pengembangan sistem inovasi daerah;
 - f. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
- 8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah(DBKS), Keluarga Sakinah Teladan (KST) dan Pondok Pesantren)PPS);

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.

4.3.3. Tujuan MISI 3

- 1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan.
- 2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan Pangan
Dengan sasaran:
 - a. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan;
 - b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan.
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani
Dengan sasaran:
 - a. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian;
 - b. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan
Dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Dengan sasaran:

- a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian;
 - b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata;
 - c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.
- 7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis
- Dengan sasaran:
- a. Berkembangnya kawasan KPY, BKM, pantai selatan, GMT dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kabupaten Bantul.
- 8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
- Dengan sasaran :
- a. Meningkatnya keterampilan pencaker;
 - b. Meningkatnya lapangan pekerjaan;
 - c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja;
 - d. Terjaminnya hak-hak pekerja;
 - e. Terciptanya penempatan transmigran.
- 9) Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
- Dengan sasaran :
- a. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
- 10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu
- Dengan sasaran:
- a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu;
 - b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;
 - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;
 - d. Meningkatnya kualitas keluarga.

4.3.4. Tujuan MISI 4

- 1) Memantapkan program penanggulangan bencana
Dengan sasaran:
 - a. Mantapnya pengurangan resiko mitigasi bencana;
 - b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik.
- 2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam
Dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati;
 - b. Terkelolanya sumberdaya hutan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

5.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

5.1.1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah;
- (11) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5.1.2. Organisasi Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, bahwa organisasi kelembagaan pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan amanat pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai amanat Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 bahwa implementasi pelaksanaan Perda BPHTB dan Perda Pajak Daerah akan dilaksanakan pengelolaan oleh pemerintah daerah mulai tahun 2011 dan untuk PBB Pedesaan dan Perkotaan paling lambat Januari 2014. Dalam rangka implementasi pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan paling lambat Januari 2014, beban kerja akan semakin bertambah sehingga perlu dilaksanakan evaluasi kembali organisasi kelembagaan pengelolaan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

- 1) Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Mengikuti pelatihan dan *workshop* mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
- 4) Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis;
- 5) Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung-jawabnya.
- 6) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang terintegrasi.
- 7) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).Terbentuknya BLUD ini diharapkan dapat menjadi langkah

awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sector public, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

5.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi:
 - 1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- 2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi:
 - a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - b. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;
 - c. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB dan BPHTB yang akan didaerahkan.
 2. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.
 3. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil perpajakan melalui kerjasama pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat, Kabupaten Bantul menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk obyek-obyek pungut

tertentu. Dari hal ini diharapkan akan mampu memberi kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah masih merupakan sumber PAD yang utama di Kabupaten Bantul tahun 2007-2010 karena mampu memberikan kontribusi tertinggi pada PAD. Mulai 1 Januari tahun 2010 diberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Dengan diberlakukannya Undang-undang ini terdapat penambahan jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.

Tabel 75: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2009 dan Target Tahun 2010
Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010*
I	PENDAPATAN DAERAH	599,619,650,884.62	727,836,911,979.62	1,023,590,207,758.85	882,149,788,429.75	876,204,469,555.28
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44,005,310,869.67	57,229,726,493.62	69,800,761,508.85	88,691,362,690.38	90,238,879,583.48
1.1.1	Pajak Daerah	9,836,299,528.00	10,191,535,467.00	12,070,898,846.00	14,108,451,478.99	16,489,578,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	22,412,839,917.00	30,808,408,803.00	37,171,638,611.00	58,205,951,445.00	56,377,938,662.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang dipisahkan	100,000,000.00	181,478,076.87	26,623,886.66	1,126,585,441.99	1,573,000,000.00
1.1.4	Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	2,479,134,676.79	2,833,168,049.11	3,423,291,081.92	6,386,252,752.83	7,000,000,000.00
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	9,177,036,747.88	13,215,136,097.64	17,108,309,083.27	8,864,121,571.57	8,798,362,921.48
1.2	DANA PERIMBANGAN	526,753,134,017.00	602,943,019,186.00	679,250,090,167.00	668,488,989,539.37	683,081,409,250.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak	21,713,126,417.00	28,902,601,269.00	38,491,760,765.00	44,254,423,902.37	45,491,210,000.00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	303,007,600.00	2,038,417,917.00	140,978,402.00	97,422,637.00	3,512,362,250.00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	470,847,000,000.00	524,293,000,000.00	583,169,351,000.00	568,502,143,000.00	573,512,337,000.00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	33,890,000,000.00	47,709,000,000.00	57,448,000,000.00	55,635,000,000.00	60,565,500,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28,861,205,997.95	67,664,166,300.00	274,539,356,083.00	124,969,436,200.00	102,884,180,721.80
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	450,250,000.00	185,337,360,000.00	68,100,000.00	25,088,280,000.00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	6,690,000,000.00	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	26,519,533,097.95	32,704,154,000.00	41,982,752,900.00	39,137,058,900.00	39,163,787,791.80
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	22,142,804,400.00	13,626,129,999.00	48,172,499,300.00	24,655,685,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya	2,341,672,900.00	12,366,957,900.00	21,997,973,984.00	18,071,678,000.00	13,976,427,930.00
1.3.6	Tunjangan Kependidikan	-	-	4,905,139,200.00	19,520,100,000.00	-

Sumber : Realisasi APBD Kab. Bantul Tahun 2006-2009, DPKAD Kab. Bantul
Ket : *) Target APBD Kab. Bantul Tahun 2010

Komponen retribusi daerah termasuk sumber utama PAD dan mengalami peningkatan yang signifikan sehingga kebijakan yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Sedangkan komponen pajak daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah/bagian laba BUMD masih memerlukan upaya peningkatan yang besar dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru dan meningkatkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya dari sumber penerimaan yang ada. Peningkatan kapasitas fiskal juga dapat dilakukan melalui pengembangan usaha-usaha daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam Kabupaten Bantul melalui kerjasama dengan investor.

5.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan konsekuensi logis bagi tiap-tiap daerah kabupaten/kota untuk segera menyusun Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 bersifat *close list* sehingga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang disebutkan dalam Undang-undang tidak boleh dipungut. Hal ini tentu akan mengakibatkan struktur pendapatan mengalami perubahan.

Implementasi pelaksanaan Perda BPHTB dan Perda Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 akan dilaksanakan mulai tahun 2011, demikian pula dengan Perda Retribusi Daerah yang terbagi menjadi tiga yaitu Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Dengan pelimpahan kewenangan pemungutan pajak yang semula merupakan pajak pusat (BPHTB dan PBB Pedesaan Perkotaan) kepada pemerintah daerah maka PAD akan

meningkat seiring dengan penambahan kedua jenis objek pajak ini. Untuk BPHTB akan mulai dilaksanakan pemungutan oleh pemerintah daerah mulai

tahun 2011 dan untuk PBB Pedesaan dan Perkotaan paling lambat Januari 2014.

Dalam rangka persiapan pengalihan kedua jenis objek pajak ini Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan antara lain peraturan/regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SOP), sarana prasarana, kerjasama dengan instansi terkait, penyiapan SDM yang menangani dan penganggaran pemungutan.

Tabel 76:Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	PREDIKSI TH 2011	PREDIKSI TH 2012	PREDIKSI TH 2013	PREDIKSI TH 2014	PREDIKSI TH 2015
A	<u>PENDAPATAN</u>	878,012,053,000.00	943,096,041,000.00	1,004,757,471,000.00	1,036,663,061,000.00	1,099,782,492,000.00
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97,611,740,475.00	105,010,500,000.00	110,261,025,000.00	139,391,178,637.75	148,360,737,569.64
	- Pajak Daerah	24,741,578,000.00	26,340,906,900.00	27,657,952,245.00	52,657,952,245.00	57,290,849,857.25
	- Retribusi Daerah	63,534,117,475.00	66,710,823,348.75	70,046,364,516.19	73,548,682,742.00	77,226,116,879.10
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,471,045,000.00	7,844,597,250.00	8,236,827,112.50	8,648,668,468.13	9,081,101,891.53
	- Lain-lain PAD	1,865,000,000.00	4,114,172,501.25	4,319,881,126.31	4,535,875,182.63	4,762,668,941.76
II.	DANA PERIMBANGAN	685,016,129,560.40	736,302,731,303.55	787,249,497,000.00	784,287,585,327.94	832,413,244,476.40
	- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	36,158,923,741.00	39,774,816,115.10	43,752,297,726.61	23,127,527,499.27	24,283,903,874.23
	- Dana Alokasi Umum	586,635,080,319.40	634,305,789,688.45	681,275,073,000.00	698,937,932,328.67	745,907,215,102.16
	- Dana Alokasi Khusus	62,222,125,500.00	62,222,125,500.00	62,222,125,500.00	62,222,125,500.00	62,222,125,500.00
	- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya	-	-	-	-	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	95,384,181,000.00	101,782,806,000.00	107,246,946,000.00	112,984,293,000.00	119,008,508,000.00
	- Pendapatan Hibah	17,588,280,000.00	20,097,108,000.00	21,476,964,000.00	22,925,812,000.00	24,447,103,000.00
	- Dana Darurat	-	-	-	-	-
	- Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi & Pemda Lainnya	39,163,787,791.80	41,121,977,181.39	43,178,076,040.46	45,336,979,842.48	47,603,828,834.61
	- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	13,976,427,930.00	14,675,249,326.50	15,409,011,792.83	16,179,462,382.47	16,988,435,501.59
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24,655,685,000.00	25,888,469,250.00	27,182,892,712.50	28,542,037,348.13	29,969,139,215.53
	- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya	-	-	-	-	-
	- Dana Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-	-

Sumber : Realisasi APBD Kab. Bantul Tahun 2006-2009, DPKAD Kab. Bantul

Kebijakan keuangan daerah dapat dilihat dari komponen pendapatan daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD bruto yang bermakna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah;
- 3) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- 4) Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 6) Pendataan potensi PAD pada setiap sumber pendapatan meliputi sektor pajak maupun retribusi.

5.3. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebutuhan belanja daerah diarahkandengan memperbesar belanja langsung yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi layanan publik meliputi penyediaan

layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi. Kebutuhan fiskal daerah dalam melaksanakan fungsi layanan publik tersebut tercermin dalam rencana anggaran belanja yang meliputi belanja pembangunan/modal atau belanja

langsung dan belanja administrasi umum atau belanja tidak langsung.

Kabupaten Bantul telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan masih adanya beban belanja aparatur yang masih tinggi. Untuk itu perlu adanya kebijakan alokasi belanja yang mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga tidak semua belanja program/kegiatan yang telah direncanakan dapat untuk dibiayai pada tahun anggaran yang bersangkutan.

5.3.1. Kondisi Belanja Daerah Tahun 2006-2010

Belanja Daerah tahun 2006 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003, dimana belanja daerah dibagi atas Belanja Pelayanan Publik dan Belanja Aparatur Daerah. Belanja Pelayanan Publik meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, modal, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Belanja Aparatur Daerah meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan dan belanja modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008, bahwa belanja daerah dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari

- 1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

- 2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Realisasi belanja daerah Kab. Bantul tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 77: Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2006

No	Uraian Belanja	Tahun 2006
2	BELANJA DAERAH	545,132,135,933.38
2.1	Pelayanan Publik	426,793,361,322.79
2.1.1	Belanja Pegawai	253,446,674,000.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23,816,544,145.00
2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	564,798,630.00
2.1.4	Belanja Pemeliharaan	7,312,603,102.59
2.1.5	Belanja Modal	57,572,370,060.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan	43,404,030,124.00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	40,676,341,261.20
2.2	Aparatur Daerah	118,338,774,610.59
2.2.1	Belanja Pegawai	89,828,692,268.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,717,823,067.59
2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	2,728,285,670.00
2.2.4	Belanja Pemeliharaan	3,033,566,444.00
2.2.5	Belanja Modal	8,030,407,161.00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2006 (Berdasarkan Kepmendagri 29/2003), DPKAD Kabupaten Bantul

Pada tabel 80 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2010, belanja langsung masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Tingkat ketergantungan Kabupaten Bantul dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terhadap bantuan Pemerintah masih cukup besar yaitu

rata-rata 77,19%. Sedangkan derajat desentralisasi masih terlalu kecil yaitu rata-rata 10,56%, walaupun cenderung sedikit meningkat yang berarti ada upaya untuk mengurangi ketergantungan dengan Pemerintah.

Tabel 78: Realisasi Belanja APBD Tahun 2007-2009 dan Target Belanja APBD Tahun 2010 Kabupaten Bantul (Rupiah)

No	Uraian Belanja	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010*
1	Belanja Tidak Langsung	451,495,661,530.06	598,167,227,346.78	634,893,132,281.01	685,712,895,007.34
1.1	Belanja Pegawai	382,526,154,685.00	468,562,523,987.00	518,029,497,999.00	557,144,591,621.00
1.2	Biaya Bunga	106,417,530.06	92,934,340.61	78,962,221.01	120,145,200.00
1.3	Belanja Hibah	-	11,190,000,000.00	29,718,902,000.00	65,566,864,038.00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	42,957,998,215.00	65,973,535,442.00	57,854,122,121.00	27,845,408,000.00
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	1,455,546,600.00	1,822,216,600.00	3,962,829,300.00	1,952,010,200.00
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	23,903,052,500.00	47,104,875,180.00	24,816,860,000.00	31,466,830,700.00
1.7	Belanja Tidak Terduga	546,492,000.00	3,421,141,797.17	431,958,640.00	1,617,045,248.34
2	Belanja Langsung	225,339,820,093.00	447,256,076,181.00	268,873,868,148.00	229,378,122,825.00
2.1	Belanja Pegawai	40,477,937,642.00	42,306,374,948.00	42,800,698,491.00	34,916,256,360.00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,397,675,863.00	102,189,334,334.00	118,719,979,086.00	126,910,316,045.00
2.3	Belanja Modal	105,464,206,588.00	302,760,366,899.00	107,353,190,571.00	67,551,550,420.00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bantul Tahun 2007-2009 (Berdasarkan Kepmendagri 29/2003), DPKAD Kabupaten Bantul.

Ket *) : Target Belanja APBD Tahun 2010, DPKAD Kabupaten Bantul

5.3.2. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 1) Prioritas penggunaan dana perimbangan
 - a) Dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
 - b) Dana alokasi umum: untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c) Dana alokasi khusus: untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dll.) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

2) Penggunaan Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2010 Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan meliputi 12 (dua belas) Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (P2TPD), Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Pengembangan Agrobisnis, Peningkatan Kesejahteraan petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan total dana sebesar Rp. 39.025.286.000,-

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan yang didanai dari APBD.

3) Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga)

Dalam pengelolaan anggaran, belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas komponen belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dengan rincian kebijakan penggunaan sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan lainnya (gaji PNS) dan accres sebesar 2,5%, kebutuhan kekurangan kenaikan tunjangan tenaga kependidikan, adanya pengadaan CPNS baik dari tenaga honorer maupun dari umum, dan gaji sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS; tambahan penghasilan PNS sesuai dengan Peraturan Bupati; penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan; belanja DPRD yang dianggarkan untuk pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk untuk pemberian jasa pengabdian bagi pimpinan dan anggota DPRD; belanja gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah; uang perangsang PBB; kesejahteraan karyawan RSUD Panembahan Senopati; gaji pamong desa Jagalan dan Trimurti; dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;

- b) Belanja bunga ditujukan untuk membayar bunga pinjaman;
 - c) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya;
 - d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada desa untuk pemerataan kemampuan keuangan;
 - e) Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya darurat seperti adanya bencana alam, bencana sosial dan mendesak untuk dilaksanakan.
- 4) Belanja langsung terdiri atas komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya, dan aset tetap lainnya.

Tabel 79:Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	PREDIKSI TH 2011	PREDIKSI TH 2012	PREDIKSI TH 2013	PREDIKSI TH 2014	PREDIKSI TH 2015
B.	BELANJA	911,524,780,400.00	979,320,917,400.00	1,042,211,689,400.00	1,075,399,106,400.00	1,139,704,051,400.00
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	656,107,685,400.00	725,776,296,400.00	790,383,164,400.00	825,122,483,400.00	880,806,924,400.00
	- Belanja Pegawai	596,311,257,000.00	666,979,038,000.00	732,052,736,000.00	766,792,055,000.00	822,476,496,000.00
	- Belanja Bunga	120,145,200.00	120,145,200.00	120,145,200.00	120,145,200.00	120,145,200.00
	- Belanja Subsidi					
	- Belanja Hibah	462,865,000.00	462,865,000.00	462,865,000.00	462,865,000.00	462,865,000.00
	- Belanja Bantuan Sosial	25,795,408,000.00	25,795,408,000.00	25,795,408,000.00	25,795,408,000.00	25,795,408,000.00
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	1,952,010,200.00	1,952,010,200.00	1,952,010,200.00	1,952,010,200.00	1,952,010,200.00
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/Des					
	- a	29,466,000,000.00	28,466,830,000.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
	- Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
II	Belanja Langsung	255,417,095,000.00	253,544,621,000.00	251,828,525,000.00	250,276,623,000.00	258,897,127,000.00
	- Belanja Pegawai	36,662,070,000.00	38,495,173,000.00	40,419,932,000.00	42,440,928,000.00	44,562,975,000.00
	- Belanja Barang dan Jasa	121,000,000,000.00	116,000,000,000.00	111,000,000,000.00	106,000,000,000.00	111,000,000,000.00
	- Belanja Modal	97,755,025,000.00	99,049,448,000.00	100,408,593,000.00	101,835,695,000.00	103,334,152,000.00

Sumber: DPKAD dan Bappeda tahun 2010, diolah

***) Defisit akan ditutup dengan kenaikan DAU, DAK dan DPDF dan PPD/Adhoc serta bantuan Provinsi

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam pengelolaan belanja daerah yaitu :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran RPJMD Tahun 2010-2015;
- 2) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut, pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi. Namun dengan adanya prediksi kenaikan gaji pegawai sebesar 5% setiap tahun maka hal ini akan mempengaruhi pula prediksi kenaikan belanja tidak langsung. Secara umum kebijakan belanja daerah harus diarahkan berdasarkan prinsi-prinsip sebagai berikut:

a) Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran diharapkan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal.

b) Ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sektor-sektor yang memiliki daya dukung tinggi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

c) Target pencapaian kinerja program

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran.

5.4. Kebijakan Pembiayaan

Berdasarkan data-data proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2011-2015, maka dapat disusun perkiraan APBD seperti pada Tabel 82. Dari hasil proyeksi komponen pendapatan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan terutama dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dimana implementasi pelaksanaan Perda BPHTB dan Perda Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 akan dilaksanakan mulai tahun 2011, demikian pula dengan Perda Retribusi Daerah. Hal ini akan mengakibatkan prediksi total pendapatan juga naik. Sedangkan kebutuhan Belanja Daerah diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar sebagai akibat dari kenaikan gaji pegawai negeri dan kebutuhan belanja lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja daerah lebih besar dari perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD diperkirakan akan mengalami defisit. Secara garis besar proyeksi defisit anggaran dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 80:Komponen APBD Tahun 2011-2015 (Rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	PENDAPATAN	878,012,053,000.00	943,096,041,000.00	1,004,757,471,000.00	1,036,663,061,000.00	1,099,782,492,000.00
I	Pendapatan Asli Daerah					
II	Dana Perimbangan	97,611,741,000.00	105,010,502,000.00	110,261,028,000.00	139,391,181,000.00	148,360,738,000.00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	685,016,131,000.00	736,302,733,000.00	787,249,497,000.00	784,287,587,000.00	832,413,246,000.00
B	BELANJA	911,524,780,400.00	979,320,917,400.00	1,042,211,689,400.00	1,075,399,106,400.00	1,139,704,051,400.00
I	Belanja Tidak Langsung	656,107,685,400.00	725,776,296,400.00	790,383,164,400.00	825,122,483,400.00	880,806,924,400.00
II	Belanja Langsung	255,417,095,000.00	253,544,621,000.00	251,828,525,000.00	250,276,623,000.00	258,897,127,000.00
	Surplus (Defisit) (A-B)	(33,512,727,400.00)	(36,224,876,400.00)	(37,454,218,400.00)	(38,736,045,400.00)	(39,921,559,400.00)
C	PEMBIAYAAN					
I	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38,627,958,400.00	41,340,107,400.00	42,569,449,400.00	43,851,276,400.00	45,036,790,400.00
II	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,115,231,000.00	5,115,231,000.00	5,115,231,000.00	5,115,231,000.00	5,115,231,000.00
III	Pembiayaan netto	33,512,727,400.00	36,224,876,400.00	37,454,218,400.00	38,736,045,400.00	39,921,559,400.00
	Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan lebih	-	-	-	-	-

Sumber: DPKAD(diolah) Kab. Bantul 2010

Secara umum APBD Kabupaten Bantul pada periode 2011-2013 akan mengalami kenaikan defisit, namun pada tahun 2014 akan mengalami penurunan defisit akibat dari kenaikan pendapatan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang bersumber dari pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan). Pada tahun 2015 defisit akan mengalami sedikit kenaikan yang disebabkan karena belanja tidak langsung yang semakin naik. Kondisi ini tentu harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus ada kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan sekaligus melakukan efisiensi tata kelola belanja daerah. Inovasi menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah merupakan salah satu terobosan yang harus dilakukan untuk menutup defisit anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006, dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan defisit anggaran bisa bersumber dari pinjaman daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Namun demikian, untuk merealisasikan pinjaman ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada *debt service coverage ratio* (DSCR) saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek prediksi kondisi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Dalam perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul selama ini dan pada periode tahun 2006-2010, kebijakan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada lima tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran

karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan defisit anggaran justru diharapkan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (hasil efisiensi dan penghematan), hasil penjualan aset daerah yang tidak produktif atau tidak memiliki kemanfaatan ekonomis, serta penerimaan pinjaman sejauh mungkin diarahkan untuk kepentingan yang mendesak/urgen dan bersifat investasi.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk dana cadangan, penyertaan modal, dana bergulir, serta pengembalian atas pinjaman dan sisa lebih tahun berjalan sebagai potensi penerimaan tahun berikutnya.

5.5. Kebijakan Umum Anggaran

Arah kebijakan anggaran Kabupaten Bantul difokuskan untuk mendukung program-program untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul tahun 2010-2015, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan berupa DAU dan DAK, sehingga diperlukan berbagai kebijakan ekspansi fiskal melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru, antara lain: pengembangan kawasan industri, pengembangan kawasan wisata, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sektor perdagangan,

kawasan reklame, dan kawasan pertambangan. Belanja daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantul dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar tersebut dijabarkan ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

- Asas tahunan;
- Asas universalitas;
- Asas kesatuan;
- Asas spesialisasi;
- Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- Profesionalitas;
- Proporsionalitas;
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; dan
- Pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

- 1) Partisipasi Masyarakat;
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
- 3) Disiplin Anggaran;
- 4) Keadilan Anggaran;
- 5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

5.6. Kebijakan Umum Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

Pengelolaan aset daerah di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemkab Bantul, Dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab. Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 80% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya. Penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah :

1. Kebanyakan Pengelola Aset di daerah (sesuai istilah dalam Permendagri 17/2007), belum memahami perbedaan definisi aset/barang daerah dengan barang inventaris. Hal ini menyebabkan salah saji aset daerah dalam neraca.
2. Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak (misalnya tidak pernah dilakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik).
3. Konsepsi penyajian aset/barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang inventaris. Biasanya nilai yang dicantumkan dalam Neraca bukan nilai perolehan tetapi nilai pasar/taksiran. Sementara menurut kaidah akuntansi sesuai PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar/taksiran hanya saat menyusun neraca awal saja (khususnya untuk aset yang lama).
4. Pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam memberikan kode rekening atas Belanja Modal (BM). Seharusnya setiap BM harus menambah aset tetap, namun karena belanja barang yang dilakukan tidak digunakan/dimiliki untuk operasional oleh pemerintah daerah sendiri namun

disumbangkan/dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga BM tersebut tidak menambah jumlah aset daerah.

Kebijakan yang dilakukan Pemkab dalam mengoptimalkan pengelolaan barang daerah adalah:

- 1) Melakukan kegiatan penataan aset;
- 2) Melakukan penghapusan barang daerah;
- 3) Melakukan instalasi program SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) di SKPD;
- 4) Mengikutsertakan pengelola aset dalam diklat aset daerah;
- 5) Menaikkan insentif pengurus barang daerah;
- 6) Melakukan inventarisasi dan klarifikasi aset daerah sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK.
- 7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bantul tahun 2005-2009 yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi serta membaiknya ekonomi dunia, maka prospek perekonomian pada tahun 2011-2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2009 mencapai 4,18% diharapkan meningkat menjadi 5,66% pada tahun 2011-2015. Seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi domestik, proses rekonstruksi gempa yang telah selesai, dan dampak pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah;
- (2) Rata-rata inflasi dalam satu dasawarsa terakhir sebesar 6,22% selanjutnya diharapkan pada tahun 2011-2015 sebesar 5-6%. Kondisi ini diasumsikan tidak terjadi peristiwa yang memicu pertumbuhan inflasi, gejolak politik yang tidak mengganggu kegiatan ekonomi dan kondisi ketersediaan maupun permintaan barang/jasa akan stabil;
- (3) Indeks Gini diharapkan membaik dari 0,2458% pada tahun 2011 menjadi 0,2454% pada tahun 2015;
- (4) Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebesar 910.572 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1,55% per tahun. Melalui intervensi berbagai program, Pemerintah daerah Kabupaten Bantul mengharapkan pertumbuhan penduduk di tahun 2011 sebesar 1,37% dan pada tahun 2015 sebesar 1,3%. Dengan asumsi tersebut, maka prediksi jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 983.201 jiwa;
- (5) Jumlah penduduk miskin diprediksi menjadi 33.039 KK pada tahun 2011 dan 24.144 KK pada tahun 2015;
- (6) Tingkat Pengangguran diharapkan akan mengalami penurunan menjadi 6,5% pada tahun 2011 selanjutnya diharapkan dengan peningkatan lapangan kerja baru akan mampu menurunkan angka pengangguran menjadi 6% pada tahun 2015;

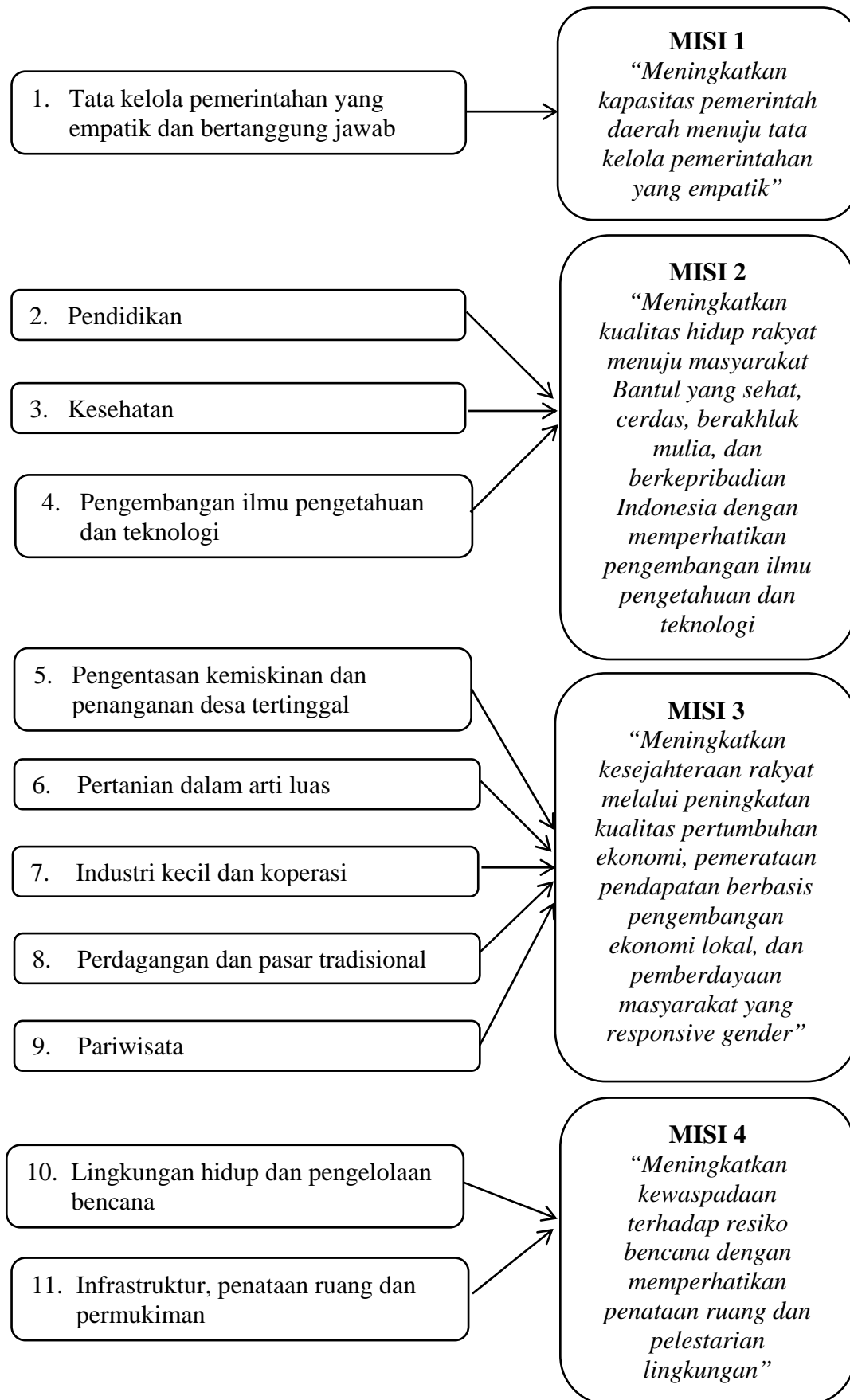
(7) Pada tahun 2011 diharapkan akan tercapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) sebesar 73,50 selanjutnya pada tahun 2015 diharapkan tercapai nilai IPM sebesar 74,50. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan meningkat.

Prospek perekonomian secara makro tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai mengacu visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2015.

Selanjutnya agar tahapan rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan jelas maka perlu ditetapkan dan dijabarkan tentang tematik tahunan, strategi, arah kebijakan, indicator dan program yang disertai indikasi kebutuhan pendanaannya. Tema pembangunan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 adalah :

2011	2012	2013	2014	2015
Menguatkan Kualitas SDM, memanfaatkan SDA, mengkaji dan mengembangkan inovasi IPTEK berwawasan lingkungan serta memperdayakan Ekonomi Lokal, berbasis penanggulangan bencana	Mengembangkan Kualitas SDM dan IPTEK, mengoptimalkan SDA berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing Ekonomi Lokal, berbasis penanggulangan bencana.	Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.	Memantapkan Kualitas SDM, mendayagunakan SDA dan IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.	Mewujudkan kualitas SDM dan IPTEK yang unggul serta pengelolaan SDA dalam rangka mencapai daya saing daerah yang tangguh, berbasis penanggulangan bencana.

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Bantul meliputi 11 program. Berikut program-program prioritas beserta korelasinya terhadap misi kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015.



Strategi, arah kebijakan, program, dan indikator dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Adapun prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut

6.1 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Pertama

“Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik”

➔ Strategi

1. Peningkatan kinerja & profesionalisme aparatur & lembaga pemerintah.
2. Fasilitasi & pelatihan aparatur pemerintahan desa.
3. Pemberian pelayanan prima bagi kunjungan tamu.
4. Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah bersama dinas/instansi terkait secara periodik & berkelanjutan.
5. Pelaksanaan bimtek implementasi perundang-undangan.
6. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
7. Peningkatan ketersediaan informasi publik.
8. Peningkatan sistem distribusi informasi & komunikasi.
9. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
10. Peningkatan pengelolaan keuangan & aset.
11. Peningkatan efisiensi & efektifitas pelayanan.
12. Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur.
13. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara.
14. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih.
15. Pelaksanaan pengadaan tanah.

➔ Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
3. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian.

4. Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien.
5. Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS.
6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah.
7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah.
8. Penjelasan tentang aturan & pelaksanaannya kepada lurah&pamong desa.
9. Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tamu, koordinasi dg instansi terkait.
10. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
11. Penyelenggaraan bimtek bagi aparat kecamatan dlm penyusunan buku administrasi kecamatan.
12. Mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi pembangunan daerah.
13. Menjalin kerjasama dengan pihak III.
14. Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang ke-PR-an.
15. Pemberdayaan KID dan PPID Kabupaten Bantul.
16. Penggalan sumber-sumber pendapatan baru.
17. Inventarisasi, klarifikasi, dan penataan aset.
18. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan.
19. Penegakan hukum.
20. Peningkatan kapasitas aparatur badan hukum.
21. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
22. Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat.
23. Kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah secara musyawarah yang didasarkan pada harga NJOP dan harga pasar.

Program

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS.
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
8. Program pendidikan kedinasan.
9. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemeritahan.
11. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
12. Program perencanaan pembangunan daerah.
13. Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH.
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
16. Program pemberdayaan jasa konstruksi.
17. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
18. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
19. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
20. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
21. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
22. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
23. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.
24. Program kerjasama Informasi dan media massa
25. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
26. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
27. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
28. Program pengelolaan barang daerah.
29. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
30. Program peningkatan pengelolaan perijinan.
31. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
32. Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan.

33. Program kerjasama pembangunan.
34. Program penataan administrasi kependudukan.
35. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
36. Program penataan peraturan perundang-undangan.
37. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
38. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
39. Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
40. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
41. Program pendidikan politik masyarakat.
42. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
43. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
44. Program penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan.
45. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah.
46. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Indikator

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat pendidikan aparat (D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)	%	55	58	58	58	59
2	Pemenuhan kebutuhan pegawai	%	15	15	17	17	20
3	PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :	Orang	667	779	795	865	885
4	Pelaksanaan sertifikat pendidik	Orang	1400	1500	1750	1800	2000
5	Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan	%	46	50	48	50	64
6	Peningkatan disiplin kerja	%	100	100	100	100	100
7	Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
8	Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian	%	100	100	100	100	100
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan	%	100	100	100	100	100

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
10	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	kali	27	27	27	27	27
11	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	80	85	90	95	100
12	Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	Desa	75	75	75	75	75
13	Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain	Kali	202	212	223	235	247
14	Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan	LHP	218	228	238	238	238
15	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD : Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	5	15	25	35	45
16	temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
17	temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
18	SKPD yg telah melaksanakan tata kearsipan	SKPD	56	56	56	56	56
19	Ketersediaan arsiparis pada SKPD	SKPD	56	56	56	56	56
20	Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD	Orang	70	70	70	70	70
21	Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan	Kali	1	2	2	2	2
22	Hasil analisa berita media massa (Fokus media, Kliping berita)	%	100	100	100	100	100
23	Dokumentasi (foto&video) kegiatan pemerintahan&pembangunan Kab. Bantul	%	100	100	100	100	100
24	Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan	%	100	100	100	100	100
25	Liflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi	%	100	100	100	100	100

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
26	Siaran taman gabusan di TVRI Jogja	%	100	100	100	100	100
27	Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta	%	100	100	100	100	100
28	Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa	%	100	100	100	100	100
29	Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun	Kali	24	24	24	24	24
30	Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa	%	100	100	100	100	100
31	Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo	Kali	1	1	1	1	1
32	Siaran Gerbang Projomansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI	%	100	100	100	100	100
33	Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani	%	100	100	100	100	100
34	Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD	%	90	90	95	100	100
35	Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	21.15	5.41	5.00	29.17	6.58
36	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	%	11.12	11.13	10.97	13.45	13.49
37	Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD	%	10.71	10.72	10.58	12.96	13.02
38	Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali	%	1.91	3.92	3.92	3.25	3.21
39	Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah	Buku	3	3	3	3	3
40	Jumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 th	Buku	6	6	6	6	6
41	Rasio pertumbuhan belanja modal	%	44.71	1.32	1.37	1.42	1.47
42	Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan	%	100	100	100	100	100
43	Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu	%	45	55	75	90	100
44	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	%	40	74	74	74	74
45	Penyusunan indeks pengaduan masyarakat	%	14	20	26	32	38
46	SKPD yang menerapkan SPM	%	100	100	100	100	100

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
47	Cakupan penerbitan KTP ber-NIK	%	100	100	100	100	100
48	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th	%	100	100	100	100	100
49	Penyelesaian ijin rata-rata per tahun	Ijin	9,215	9,790	10,370	10,945	11,520
50	Penyelesaian pengaduan	pengadu	25	20	16	13	10
51	Keberhasilan pelayanan	nilai angka	75.57	75.6	75.62	75.65	75.67
52	Jumlah Raperda yang menjadi Perda	Buah	25	25	25	25	25
53	Capaian konsistensi peraturan daerah	%	100	100	100	100	100
54	Menurunnya penyakit masyarakat	%	15	15	20	20	25
55	Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum	Kasus	10	10	13	13	13
56	Menurunnya pelanggaran perda	%	10	10	15	15	15
57	Penurunan pelanggaran hukum	%	10	10	15	15	15
58	Capaian penyelesaian hukum	%	100	100	100	100	100
59	Peningkatan partisipasi pemilu legislatif	%	-	-	-	80	-
60	Peningkatan partisipasi pemilu presiden	%	-	-	-	80	-
61	Peningkatan partisipasi pemilu kada	%	-	-	-	-	80
62	Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah	%	90	90	90	90	90
63	Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	%	90	90	90	90	90
64	Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam	%	90	90	90	90	90
65	Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum	Orang	200	200	200	200	200
67	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara	Orang	60	120	120	120	120
68	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM	Orang	200	200	200	200	200
69	Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	Orang	100	100	100	100	100
70	Luas tanah yang dibebaskan	m ²	12,084	24,574	28,137	12,691	9,289

6.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Kedua

“Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

➤ Strategi

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS.
2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat.
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
4. Penggerakan & pemberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kemitraan Pemerintah, Swasta, dunia usaha, dan dunia pendidikan.
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta).
7. Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan.
8. Peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan.
9. Meningkatkan mutu pendidikan & kualitas sarpras.
10. Penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, manajemen yang handal, dan peningkatan sarpras serta pembiayaan yang merata.
11. Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga.
12. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi sertasarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi.
13. Peningkatan sinergitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
14. Pengembangan energi baru terbarukan.
15. Meningkatkan nilai-nilai religius & berakhlak mulia.
16. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
17. Peningkatan penyelesaian masalah sosial.
18. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin.
19. Advokasi KIE.
20. Peningkatan kualitas tenaga pendamping dalam pengelolaan tumbuh kembang balita.

➔ **Kebijakan**

1. Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan.
2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat.
3. Mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular.
4. Meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan kapasitas masyarakat.
5. Meningkatkan DB4MK Plus.
6. Advokasi pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan & peran aktif masyarakat di bidang pendidikan.
8. Meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Bantul.
9. Meningkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan.
10. Meningkatkan peran serta lembaga pendidikan & masyarakat.
11. Mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda dan olahraga.
12. Menyelenggarakan Manajemen Pemerintah Pembangunan Daerah yang handal, bersifat proaktif, bermoral dan berbudaya serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menuju "Bantul Online" untuk mewujudkan e-Government di Kabupaten Bantul.
13. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK.
14. Pengembangan IPTEK di segala bidang.
15. Pengembangan teknologi hibrid.
16. Penetapan DBKS.
17. Penetapan KST.
18. Sertifikasi Ponpes.
19. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa.
20. Meningkatkan peran serta pemerintah & masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
21. Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lain.
22. Pendataan keluarga dan keluarga miskin.
23. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

24. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
25. Pola pengasuhan Balita yang ramah anak.
26. Keterpaduan program BKB Posyandu PAUD.

 **Program**

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
2. Program obat dan perbekalan kesehatan.
3. Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya.
4. Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
5. Program pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
6. Program upaya kesehatan masyarakat.
7. Program perbaikan gizi masyarakat.
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
12. Program perencanaan sosial budaya.
13. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Program pengembangan lingkungan sehat.
15. Program pengawasan obat dan makanan.
16. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
17. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
18. Program lingkungan sehat perumahan.
19. Program penyediaan dan pengolahan air baku.
20. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
21. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
22. Program penanganan persampahan.
23. Program perluasan jaminan kesehatan bagi semua penduduk.

24. Program pendidikan anak usia dini.
25. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
26. Program pendidikan menengah.
27. Program manajemen pelayanan pendidikan.
28. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
29. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
30. Program pendidikan non formal .
31. Program pendidikan luar biasa.
32. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
33. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
34. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
35. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
36. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
37. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.
38. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
39. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
40. Program kerjasama informasi dengan mass media.
41. Program pengembangan data/informasi.
42. Program pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.
43. Program potensi energi.
44. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
45. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
46. Program Pengembangan wawasan kebangsaan.
47. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

 **Indikator**

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	95	95	95	95	95
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95	95	95	100	100
4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	%	85	86	87	90	95
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan kunjungan bayi	%	85	86	87	90	95
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	65	75	80	85	90
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	95	95	100	100	100
12	Cakupan peserta KB Aktif	%	8	80	85	85	85
13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:						
	a. Penemuan AFP	%	100	100	100	100	100
	b. Penemuan penderita pneumonia balita	%	15	20	25	30	35
	c. Penemuan baru TB BTA positif	%	70	70	70	70	70
	d. Penderita DBD yang ditangani	%	100	100	100	100	100
	e. Penemuan penderita diare	%	16	16	17	18	20
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100	100	100
18	Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM	%	30	45	60	90	100
19	Akreditasi RS	%	50	60	70	80	100
12	Rata-rata kecukupan fasilitas medis	%	100	100	100	100	100
13	Rasio penanganan pasien rujukan	%	100	100	100	100	100
14	Bed Occupation Rate (BOR)	%	75-85	75-85	75-85	75-85	75-85
15	Length of Stay	hari	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
16	Bed Turn Over	kali	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
17	Turn Over Internal	hari	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
18	Rasio dokter per pasien	orang/TT	1/(4-7)	1/(4-7)	1/(4-7)	1/(4-7)	1/(4-7)
19	Rasio paramedis per pasien	orang/TT	(3-4)/2	(3-4)/2	(3-4)/2	(3-4)/2	(3-4)/2
20	Usia harapan hidup	th	71.25	71.30	71.35	71.40	71.50
21	AKB	/1000 KH	10	9	8	7.5	7
22	AKI	/100rb KH	100	90	80	75	70
23	Angka gizi buruk	%	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28
24	KEP total balita	%	9.5	9	8.5	8	7.5
25	Angka kesakitan DBD	/100rb	54	53	52	51	50
26	Angka kematian DBD	%	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
27	Penemuan kasus TB	%	55	60	65	70	70
28	Penyembuhan kasus TB	%	86	87	88	89	90
29	KIE kelompok kunci (HIV)	%	40	50	60	70	80
30	KIE kelompok rentan (HIV)	%	40	50	60	70	80
31	VCT kelompok kunci (HIV)	%	35	40	45	50	60
32	Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	%	-	10	20	30	40
33	Jamban sehat	%	65	70	75	80	85
34	Air bersih	%	75	78	81	85	90
35	Rumah sehat	%	65	70	75	80	85
36	Persentase peningkatan lingkungan sehat	%	10	10	10	10	10

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
	perumahan						
37	Pengembangan IPAL Komunal	Unit	2	2	2	2	2
38	Penanganan kawasan kumuh	kawasan	0	1	1	1	1
39	Persentase penduduk berakses air bersih	%	55	65	70	75	80
40	Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY	%	2	4	6	8	11.5
41	Pengembangan saluran drainase permukiman	m	500	500	500	500	500
42	Penanganan persampahan	kec.	16	16	17	17	17
43	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	40	55	70	85	100
44	Angka melek huruf	%	89.94	90.34	90.74	91.14	91.54
45	APK						
	a. PAUD	%	55.00	56.50	58.00	59.00	60.00
	b. SD/MI	%	105	105.05	105.15	105.2	105.3
	c. SMP/MTs	%	98.49	98.85	99	99.5	99.75
	d. SMA/SMK	%	83.00	83.50	84.00	84.50	85.00
46	APM						
	a. SD/MI	%	94.42	94.75	95.35	95.5	96.25
	b. SMP/MTs	%	79.82	81.5	83.5	86.5	90.25
	c. SMA/SMK	%	64.00	65.00	66.00	67.00	68.00
47	Tingkat kelulusan						
	a. SD/MI	%	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99
	b. SMP/MTs	%	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5
	c. SMA/SMK	%	98.10	98.20	98.25	98.30	98.35
48	Nilai NEM rata-rata						
	a. SD/MI	%	7.20	7.25	7.30	7.35	7.40
	b. SMP/MTs	%	7.10	7.15	7.20	7.25	7.30
	c. SMA/SMK	%	7.06	7.31	7.31	7.56	7.56
49	Angka putus sekolah						
	a. SD/MI	%	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	b. SMP/MTs	%	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05
	c. SMA/SMK	%	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70
50	Angka rata2 lama sekolah						
	a. SD/MI	tahun	6.26	6.24	6.22	6.20	6.18

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
	b. SMP/MTs	tahun	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
	c. SMA/SMK	tahun	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
51	Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk Perpustakaan Keliling)	orang	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000
52	Jumlah koleksi buku di perpustakaan	buku	44,000	47,000	50,000	52,000	56,000
53	Jumlah pengelola perpustakaan	orang	500	600	700	800	900
54	Jumlah sekolah bersertifikat ISO						
	a. SMA/SMK	Buah	6	7	8	9	10
55	Jumlah SSN						
	a. SD/MI	Buah	17	19	23	26	30
	b. SMP/MTs	Buah	28	33	38	42	48
	c. SMA/SMK	Buah	17	18	20	22	24
56	Jumlah RSBI						
	a. SD/MI	Buah	1	1	2	3	4
	b. SMP/MTs	Buah	2	2	4	5	6
	c. SMA/SMK	Buah	4	4	4	4	4
57	Jumlah SBI						
	a. SD/MI	Buah	0	0	0	0	1
	b. SMP/MTs	Buah	0	0	0	0	2
	c. SMA/SMK	Buah	0	0	0	0	2
58	Rasio ruang kelas - siswa						
	a. SD/MI	siswa	30	30	28	28	28
	b. SMP/MTs	siswa	33	30	28	28	28
	c. SMA/SMK	siswa	34	32	32	32	32
59	Rasio guru - siswa						
	a. SD/MI	orang	13.8	13.6	12.9	12.7	12.5
	b. SMP/MTs	orang	19.25	19.2	19.1	18.9	18.5
	c. SMA/SMK	orang	9	9	9	9	9
60	Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan	Buah	33	35	37	40	40
61	Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan	Buah	1	1	2	2	2
62	Jumlah prestasi olahraga						
	a. Tk Internasional	Jml Atlit	1	1	1	1	1
	b. Tk Nasional	Jml cab OR	10	10	10	10	10

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
	c. Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali (PORPROP)	Jml Emas	125		130		135
	d. Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi (POPDA) tiap tahun	jml emas	48	49	49	49	50
63	Jumlah Prestasi pemuda (non Olahraga)						
	a. Paskibraka	orang	8	8	8	8	8
	b. Pemuda pelopor	orang	2	2	2	2	2
	c. Pemuda wirausaha	orang	1	1	1	1	1
	d. MTQ tingkat pelajar umum	jml emas	15	16	18	19	20
64	Presentasi cbg OR yg menjalankan kompetisi scr teratur		15	20	22	23	25
65	Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor	%	-	25	50	75	85
66	Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi	%	50	100	-	-	-
67	Prosentase pembangunan pusat data	%	10	50	75	100	100
68	Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa	%	0	25	50	75	90
69	Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk	%	-	50	75	90	90
70	Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati	%	25	40	60	80	90
71	Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	5	40	60	80	90
72	jumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan	unit	9	15	25	35	40
73	Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat	unit	9	15	25	35	40
74	Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK	jml	4	5	6	7	8
75	Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK	jml	3	4	5	6	7

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
76	Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi	jml	4	5	6	7	8
77	Jumlah desa mandiri energi	jml	1	2	3	4	5
78	Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan	kec.	3	7	10	14	17
79	Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan	unit	5	5	5	5	5
80	Jumlah DBKS	desa	45	48	51	54	57
81	Jumlah KST	KK	30	33	36	39	42
82	Jumlah PPS	pondok	96	97	98	99	100
83	Jumlah da'l dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama	orang	6000	6050	6100	6150	6200
84	Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan	lembaga	35	35	35	36	37
85	Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	%	90	90	90	90	90

6.3 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ketiga

“Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender”

➤ Strategi

1. Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi.
2. Peningkatan produksi dan daya beli.
3. Peningkatan pemerataan akses sarana distribusi dan sarpras produksi.
4. Peningkatan produksi serta pengembangan agribisnis dan agropolitan.

5. Pembatasan alih fungsi lahan produktif.
6. Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani.
7. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi.
8. Pemberdayaan IKM, koperasi dan perdagangan.
9. Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
10. Pelestarian aset seni budaya daerah.
11. Perbaikan mutu kawasan.
12. Peningkatan SDM.
13. Memperluas lapangan pekerjaan.
14. Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja.
15. Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
16. Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak.

Kebijakan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan.
3. Peningkatan SDM.
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
5. Optimalisasi tata guna air.
6. Optimalisasi perikanan budidaya dan tangkap.
7. Penanganan desa rawan pangan.
8. Pemantapan ketersediaan pangan nabati dan hewani.
9. Meningkatkan produktivitas dan perluasan areal.
10. Mengembangkan pusat perbenihan agribisnis dan agropolitan.
11. Perbaikan struktur lahan.
12. Penanggulangan penyakit ternak.
13. Meningkatkan pengelolaan lahan marginal menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
14. Pemberian insentif.

15. Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran.
16. Optimalisasi fungsi penyuluh.
17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas saran/prasarana pendukung perekonomian daerah.
18. Meningkatkan kualitas produk industri kecil yang berbasis potensi lokal
19. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal
20. Mempermudah informasi dan akses permodalan.
21. Meningkatkan kualitas SDM/pengrajin.
22. Meningkatkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri.
23. Perbaiki sarpras.
24. Optimalisasi kelembagaan.
25. Pengembangan diversifikasi objek wisata.
26. Optimalisasi seni budaya daerah.
27. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur.
28. Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta.
29. Perbaiki mutu tenaga kerja.
30. Menciptakan wirausaha baru.
31. Meningkatkan peran serta masyarakat & swasta dalam menciptakan lapangan kerja.
32. Mempermudah perijinan.
33. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
34. Mengoptimalkan pelayanan perpindahan.
35. Fasilitasi permodalan.
36. Penyelesaian dampak kekerasan.
37. Pemberdayaan perempuan.
38. Pemberdayaan gender.

🔻 Program

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
4. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

5. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
6. Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa.
7. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
8. Program penataan perundang-undangan.
9. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
10. Program kerjasama pembangunan.
11. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
12. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
14. Program pengembangan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya.
15. Program pembangunan turap/talud/brojong.
16. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
17. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
18. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
19. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
20. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
21. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar.
22. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
23. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
24. Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
25. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
26. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
27. Program Kesejahteraan Petani.
28. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
29. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
30. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

31. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian.
32. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan.
33. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
34. Program pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan.
35. Program pembangunan infrastruktur pedesaan.
36. Program pembangunan jalan dan jembatan.
37. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
38. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan.
39. Program tanggap darurat jalan dan jembatan.
40. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan.
41. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
42. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
43. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
44. Program peningkatan pelayanan angkutan.
45. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
46. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
47. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
48. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
49. Program pembangunan infrastruktur pasar tradisional.
50. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
51. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
52. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
53. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
54. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
55. Program pengembangan industri kecil&menengah.
56. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
57. Program penataan struktur industri.
58. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

59. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
60. Program pengembangan infrastruktur perdagangan.
61. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
62. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
63. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
64. Program pengembangan destinasi wisata.
65. Program pengembangan pemasaran wisata.
66. Program pengembangan kemitraan.
67. Program pengembangan nilai budaya.
68. Program pengelolaan kekayaan budaya.
69. Program pengelolaan keragaman budaya.
70. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
71. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh.
72. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
73. Program pengembangan kampung GMT.
74. Program peningkatan kesempatan kerja.
75. Program perluasan kerja.
76. Program penempatan tenaga kerja.
77. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
78. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagaakerjaan.
79. Program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
80. Program transmigrasi umum.
81. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
82. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
83. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
84. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
85. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

86. Program pemberdayaan perempuan.
87. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
88. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
89. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
90. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.
91. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya.
92. Program pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial.
93. Program pembinaan anak terlantar.
94. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya).
95. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
96. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah.
97. Program keluarga berencana.
98. Program kesehatan reproduksi remaja.
99. Program pelayanan kontrasepsi.
100. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
101. Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
102. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
103. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
104. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
105. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

➤ **Indikator**

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan PDRB (ekonomi)	%	5.18	5.42	5.66	5.9	6.14
2	PDRB						
	a. Atas dasar harga konstan	Rp	4,09 trilyun	4,25 trilyun	4,42 trilyun	4,60 trilyun	4,78 trilyun
	b. Atas dasar harga berlaku	Rp	10,02 trilyun	11,22 trilyun	12,57 trilyun	14,08 trilyun	15,77 trilyun
3	PDRB perkapita						
	a. Atas dasar harga konstan	Rp	4,35 juta	4,48 juta	4,61 juta	4,75 juta	4,89 juta
	b. Atas dasar harga berlaku	Rp	9,55 juta	10,02 juta	10,53 juta	11,05 juta	11,61 juta
4	Penerimaan daerah	rupiah	894,612,050,757.20	961,796,035,061.44	987,016,756,347.28	1,056,473,055,108.76	1,119,982,487,746.26
5	Pertumbuhan investasi						
	a. PMA	Rp	544,528,874,528.46	555,205,911,283.92	565,882,948,039.00	576,559,984,794.84	587,237,021,550.30
	b. PMDN	Rp	176,906,863,020.00	180,445,600,020.00	183,983,137,541.00	187,521,274,801.00	191,059,412,062.00
	b. Masyarakat	Rp	36,474,641,996	39,027,866,936	41,759,817,622	44,313,042,561	47,414,955,541
	c. Pemerintah	Rp	97,755,024,202.50	99,049,447,665.00	100,408,592,300.63	101,835,694,168.03	103,334,151,128.81
6	Inflasi	%	5	4.85	4.7	4.56	4.42
7	Kajian peraturan perundang-undangan daerah thd peraturan perundang-undangan baru yg lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	perda	1	1	1	2	2
8	Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi	orang	20	20	20	20	20

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
9	Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi	orang	34	34	34	34	34
10	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	unit	1	1	1	1	1
11	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	badan hukum	6	10	15	15	15
12	Kajian kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah	FGD	-	4	4	-	-
13	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bid. Ekonomi	MOU	4	4	4	5	5
14	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah	MOU	5	5	5	8	8
15	Ketersediaan pangan	gr/Kap/hr	3650	3650	3650	3650	3650
16	Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)	unit	13	16	19	22	25
17	Desa Mandiri Pangan	%	8	10	12	14	16
18	Akses Pangan	%	5	6	7	9	13
19	PPH	%	89	89.5	90	90.3	90.5
20	Konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/th	21.36	22.43	23.55	24.73	25.96
21	Pengolah hasil perikanan	orang	50	70	80	90	100

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
22	Saluran irigasi dalam kondisi baik	%	81.50	82.50	83.25	83.75	84.00
23	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	%	78	80	82	84	84
24	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	kegiatan	4	4	4	4	4
25	Kecukupan air irigasi	Ha	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
26	Pengembangan Bantul Seed Center	komoditas	4	4	5	5	5
27	Pengembangan pupuk organik	Ha	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000
28	Pengadaan alat mesin pertanian	Unit	50	60	70	90	100
29	Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu	ha	1,008	1,152	1,296	1,440	1,584
30	Peningkatan produksi pestisida nabati/hayati	liter	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
31	Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	dosis	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000
32	Unit Pengolahan pakan ternak (konsentrat)	unit	5	7	7	9	10
33	Pengembangan hijauan pakan ternak	ha	15	18	20	22	24
34	Penanganan harga jual hasil pertanian (program pasca panen)	komoditas	6	6	6	6	6
35	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	24,257	43,491	51,282	55,630	57,630
36	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1,377	1,614	1,643	1,742	1,792
37	Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya)	kelompok	375	390	410	425	450

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
38	Unit pembibitan rakyat (UPR)	unit	50	60	70	80	100
39	Armada Perikanan Tangkap						
	a. PMT (Perahu Motor Tempel)	unit	70	65	60	56	50
	b. KM 5-10 GT	unit	4	5	5	5	5
	c. KM 10-30 GT	unit	3	6	8	10	12
	d. KM 30-50 GT	unit	3	5	8	15	17
	e. KM>50 GT	unit	0	0	8	10	12
40	Jumlah nelayan	orang	508	569	613	834	900
41	Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI)	unit	4	4	5	5	5
42	Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)	kw/ha	75.00	76.00	76.50	77.00	77.50
43	Produktivitas jagung (pipil kering)	kw/ha	53.19	53.25	53.45	53.60	53.80
44	Produktivitas kedelai (wose)	kw/ha	15.00	15.20	15.50	15.80	16.00
45	Produktivitas kacang tanah (wose)	kw/ha	10.18	10.24	10.30	10.36	10.48
46	Produktivitas ubi kayu (ubi basah)	kw/ha	126.00	126.76	127.51	128.27	129.78
47	Produktivitas bawang merah	ton/ha	10.15	10.19	10.24	10.30	10.35
48	Produktivitas cabe merah	ton/ha	8.04	8.10	8.16	8.20	8.24
49	Produktivitas pisang	kg/pohon	25.00	25.20	25.50	25.75	30.00
50	Produktivitas jamur tiram	kg/m ²	12.00	12.10	12.15	12.17	12.20
51	Produktivitas temulawak	ton/ha	18.65	18.70	18.74	18.80	18.85
52	Produktivitas tebu (hablor gula)	kw/ha	49.88	50.26	50.72	51.20	51.36
53	Produktivitas kelapa (Kopra)	kw/ha	19.50	20.00	20.00	20.50	20.50
54	Produktivitas tembakau (Rajang kering)	kw/ha	6.26	6.43	6.66	6.67	6.75
55	Produktivitas jambu mete (Glondong mete)	kw/ha	3.30	3.57	3.82	4.22	4.35

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
56	Produktivitas kakao (Biji Kering)	kw/ha	2.38	2.48	2.72	2.80	3.10
57	Penanaman tebu sebagai bahan baku gula	ha	1,500	1,500	1,550	1,600	1,600
58	Optimasi dan reklamasi kawasan pantai	ha	140	200	250	300	360
59	Terwujudnya Agropolitan	Unit (Kecamtn)	3	3	3	3	3
60	Produksi daging (sapi, kambing, domba dan unggas)	kg	10,655,498	11,002,497	11,414,739	11,852,671	12,276,330
61	Produksi telur (ayam dan itik)	kg	5,865,111	6,275,047	6,717,258	7,194,318	7,734,459
62	Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)	liter	250,000	270,000	300,000	320,000	330,000
63	Populasi sapi potong	ekor	54,281	56,258	56,252	57,265	58,301
64	Populasi sapi perah	ekor	165	190	225	270	300
65	Populasi kambing	ekor	57,668	61,849	66,333	71,142	76,300
66	Populasi domba	ekor	30,840	33,076	35,474	38,046	40,804
67	Populasi ayam buras	ekor	561,939	561,939	548,215	548,215	558,138
68	Populasi ayam ras petelur	ekor	651,994	704,806	761,895	823,609	890,321
69	Populasi ayam ras pedaging	ekor	724,956	740,905	757,204	773,863	790,888
70	Populasi itik	ekor	184,603	208,990	236,599	267,855	272,703
71	Pengembangan biogas	unit	15	25	35	45	55
72	Pengembangan rumah kompos	unit	12	20	30	35	40
73	Pembibitan ayam buras	ekor/DO C	360,000	380,000	400,000	420,000	440,000
74	Pembibitan itik	ekor/DO D	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000
75	Pengolahan telur asin	butir	400,000	410,000	420,000	430,000	440,000
76	Penanganan kasus penyakit ternak	kasus	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
77	Penanganan gangguan reproduksi ternak	ekor	750	1,000	1,250	1,500	1,750
78	Penanganan kasus Brucellosis	kasus	100	100	100	100	100
79	Penanganan kasus Tuberkulinsi	sampel	100	100	100	100	100
80	Optimalisasi RPH	unit	2	2	2	2	2
81	Optimalisasi RPU	unit	17	20	20	20	20
82	Vaksinasi unggas ND	dosis	450,000	500,000	550,000	600,000	650,000
83	Vaksinasi unggas AI	dosis	450,000	500,000	550,000	600,000	650,000
84	Vaksinasi rabies	dosis	500	550	600	650	700
85	Pengendalian penyakit hewan	kali	15	15	15	15	15
86	Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post mortem	petugas	375	400	425	450	500
87	Konversi lahan	%	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05
88	Luas potensi lahan yang dimanfaatkan	Ha	15,259	15,198	15,137	15,076	15,015
89	Peningkatan aktifitas kelembagaan petani	kelompok	16	21	26	31	36
90	Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain	orang	145	145	145	145	145
91	Peningkatan kualitas penyuluh	orang	73	73	73	73	73
92	Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil pertanian	kelompok / pelaku usaha	500	550	600	650	700
93	Aktifitas kelembagaan	unit	1	1	1	1	1

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
	Asosiasi Pengusaha Produk Olahan Pertanian						
94	Jumlah kelompok penangkar benih padi	kelompok	22	23	24	25	26
95	Peningkatan kelembagaan kelompok tani	kelompok	725	725	725	725	725
96	Peningkatan kelembagaan kelompok tani kehutanan	kelompok	203	203	203	203	203
97	Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)	kelompok	16	16	17	18	18
98	Jumlah kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa dalam, tembakau varietas sili siluk)	kelompok	15	18	20	24	27
99	Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci)	kelompok	356	364	373	391	410
101	Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi	kelompok	292	292	292	292	292
102	Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik	%	90	91	92	93	94
103	Penanganan jalan Kabupaten	km	11	12	12	13	13

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
104	Persentase peningkatan penyediaan simpul transportasi	%	-	50	25	25	-
105	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	%	20	20	20	20	20
106	Daya angkut angkutan umum	seat/orang	1,763,022	1,763,022	1,763,022	1,763,022	1,763,022
107	Load faktor penumpang angkutan umum	%	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
108	V/C ratio kendaraan yang melintas di kota	ratio	0.36	0.32	0.3	0.27	0.24
109	Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah	%	15	20	25	30	35
110	Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill	jumlah	1	1	1	1	1
111	Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik	%	31.25	50	68.75	87.5	100
112	Penanganan sanitasi dan higienitas pasar khususnya kios/los penjualan daging (ayam, sapi)	unit	5	6	7	8	9
113	Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDI	unit usaha	38	45	50	55	60
114	Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-IUI	unit usaha	12	15	18	20	22
115	Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-SIUP	unit usaha	12	15	18	20	22
116	Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDP	unit usaha	12	15	18	20	22
118	Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDG	unit usaha	12	15	18	20	22

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
119	Peningkatan kapasitas SDM UKM	orang	240	250	270	285	300
120	Fasilitasi peningkatan IRT	unit usaha	60	70	80	90	100
121	Fasilitasi peningkatan koperasi ber-BH	unit	8	10	11	12	13
122	Peningkatan penyerapan modal koperasi	unit	87	90	92	95	100
123	Peningkatan promosi melalui pameran	kali	8	8	8	8	8
124	Peningkatan keterampilan pelaku usaha ekspor/pemasok produk ekspor	unit usaha	30	40	50	60	70
125	Peningkatan kualitas pasar tradisional	unit	1	2	3	4	5
126	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	kegiatan	3	3	3	3	3
127	Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM	kegiatan	4	4	4	4	4
128	Pengembangan database informasi potensi unggulan	kec.	17	17	17	17	17
129	Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil menengah (Fasilitasi pengembangan UKM)	UMKM	50	50	50	50	50
130	Kajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam	kegiatan	0	4	4	4	4
131	Jumlah desa wisata	desa	18	20	22	24	26

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
132	Jumlah desa budaya	desa	6	7	8	9	10
133	Jumlah peristiwa budaya	event budaya	127	130	132	135	137
134	Jumlah penghargaan budaya	penghargaan	12	14	16	18	20
135	Jumlah kelompok kesenian	kelompok	701	708	715	722	729
136	Jumlah wistawan	orang	1,511,223	1,586,784	1,666,123	1,749,430	1,836,901
	a. Wisnus	orang	1,496,111	1,570,916	1,649,462	1,731,935	1,818,532
	b. Wisman	orang	15,112	15,868	16,661	17,494	18,369
137	Naiknya PAD pariwisata	rupiah	4,221,457,301	4,432,530,166	4,654,156,675	4,886,864,508	5,131,207,734
138	Promosi pariwisata di dalam dan di luar DIY	kegiatan	10	20	35	60	80
139	Jumlah usaha pariwisata	unit	5	10	15	20	25
140	Pengembangan kawasan KPY	paket	3	4	5	6	7
141	Pengembangan kawasan BKM	paket	2	2	3	3	4
142	Pengembangan kaw Pantai Selatan	paket	4	4	5	5	5
143	Pengembangan kaw GMT & Kajigelem	paket	2	2	3	3	3
144	Pengembangan kaw Industri Sedayu & Piyungan	paket	1	1	2	2	3
145	Pengembangan kaw Agrowst & Agropltn	paket	3	3	4	4	5
146	Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts	paket	1	1	1	1	2
147	Pelatihan bagi pencaker	Orang	720	800	960	1120	1120
148	Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil	orang	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
149	Prediksi angkatan kerja	orang	480,500	485,000	489,500	494,000	498,500

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
150	Kesempatan kerja						
151	a. Penempatan tenaga kerja	orang	2,000	2,200	2,500	2,700	3,000
	b. Perluasan kerja	orang	300	300	400	400	400
	Tingkat pengangguran	%	6.5	6.3	6.1	6	6
152	Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th	orang	11,073	11,573	12,073	12,573	13,073
153	Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja	%	93.50	93.50	93.90	94.00	94.00
154	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69.90	70.10	70.15	70.50	70.70
155	Jumlah SP	Pershaan	50	52	55	57	60
156	Jumlah PP	Pershaan	163	168	173	178	183
157	Jumlah PKB	Pershaan	47	50	52	55	57
158	Jumlah LK Bipartit	Pershaan	60	65	70	75	80
159	Angka sengketa pekerja per Tahun		75	75	75	75	75
160	Kepesertaan JAMSOSTEK	Orang	19,000	19,700	20,400	21,100	21,800
161	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	100	100	100	100	100
162	Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	%	64.00	65.00	66.00	67.00	68.00
163	Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI)	%	70.50	71.00	71.50	72.00	72.50
164	Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan	%	5.00	6.00	6.30	7.00	8.00
165	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang	%	8.90	10.20	12.00	12.50	13.00

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
167	Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan	desa	75	75	75	75	75
168	Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	kali	90	90	90	90	90
169	Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD	desa	75	75	75	75	75
170	Peningkatan penanganan PMKS						
	a. Lansia	orang	190	190	190	190	190
	b. Penyandang Cacat	orang	428	428	428	428	428
	c. Perlindungan anak	orang	260	260	260	260	260
171	Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng	orang	200	200	200	200	200
172	Peningkatan penyuluhan P4GN	orang	250	250	250	250	250
173	Peningkatan program bantuan pendidikan bagi kel. Miskin dan berprestasi	orang	7500	7600	7700	7800	7900
174	Peningkatan program bantuan YANKES	jiwa	2500	2500	2500	2500	2500
175	Peningkatan program BSK	orang/kelompok	3000	3000	3000	3000	3000
176	Peningkatan keterampilan bagi PMKS	orang	25	25	25	25	25

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
177	Fasilitasi pembinaan anak yatim	orang	1500	1500	1500	2000	2000
178	Tingkat kemiskinan turun	%	13	12	11	10	9.5
179	Peningkatan jumlah KUBE	kelompok	100	100	100	100	100
180	Membbaiknya indeks gini	%	0.2507	0.2505	0.2458	0.2458	0.2454
181	Database keluarga dan keluarga miskin	buku	51	51	51	51	51
182	Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3	%	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
183	Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi	%	77.60	77.69	78.30	79.00	79.40
184	Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga	%	31.8	30.44	29.16	27.97	27.09

6.4 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Keempat

“Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan”

➤ Strategi

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana publik.
3. Pengelolaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan penataan lingkungan.
5. Pengelolaan dan pemantauan sumberdaya hutan secara optimal.

➤ **Kebijakan**

1. Menetapkan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana.
2. Meningkatkan kegiatan pencegahan bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi), tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan.
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat.
6. Perbaiki kualitas fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Mengupayakan penyelamatan flora dan fauna dilindungi dan konservasi kawasan lindung.
8. Mengupayakan pengurangan dampak emisi karbon.
9. Mengupayakan konservasi kawasan lindung. sempadan pantai dan mangrove.
10. Mengupayakan pengembalian kualitas lahan bekas galian C.
11. Mengupayakan kualitas dan kuantitas hasil hutan kayu rakyat.
12. Menngupayakan terjaganya air tanah dan kesuburan tanah.
13. Mengembangkan sumberdaya hutan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan.
14. Mengembangkan pengelolaan hutan rakyat.
15. Mengupayakan peningkatan produksi aneka usaha hasil hutan bukan kayu.
16. Mengupayakan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
17. Mengupayakan tersedianya data statistik kehutanan sebagai dasar acuan penentuan kebijakan bidangkehutanan.
18. Mengupayakan pembinaan dan ketertiban administrasi industri kayu.
19. Mengupayakan penertiban administrasi peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan.

➤ **Program**

1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
2. Program perencanaan tata ruang.
3. Program pemanfaatan ruang.
4. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
5. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut.
6. Program pengendalian banjir.
7. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.
8. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
9. Program Pencegahan Dini dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam.
10. Program pengembangan perumahan.
11. Program pemberdayaan komunitas perumahan.
12. Program pengelolaan areal pemakaman.
13. Program pembangunan jalan jalur evakuasi.
14. Program pembangunan prasarana umum.
15. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
16. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
17. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
18. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
19. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.
20. Program peningkatan pengendalian polusi.
21. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
22. Program penyusunan analisa dampak lingkungan.
23. Program rehabilitasi hutan dan lahan.
24. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.
26. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

27. Program Pengembangan. Pengelolaan. dan Konservasi Sungai. Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
28. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
29. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
30. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.
31. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
32. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.
33. Program pemanfaatan hutan industri.
34. Program pembinaan dan penertiban hasil hutan.
35. Program perencanaan dan pengembangan hutan.

Indikator

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Terwujudnya implementasi RPP kawasan berbasis mitigasi bencana	%	30	50	55	60	65
2	Peningkatan Relokasi lokasi tanah longsor	rumah	5	5	5	5	5
3	Penambahan pusat penanggulangan bencana:						
	a. Pos Penanggulangan Bencana Alam (PBA/TRC) di Kabupaten	Unit	0	1	0	0	0
	b. POS Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) di Kabupaten	Unit	0	5	0	0	0
	c. Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Kecamatan	Unit	2	3	3	5	4
	d. Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Desa	Unit	15	15	15	15	15
4	Penambahan dan pemeliharaan sarana/prasarana dan peralatan evakuasi	%	10	20	20	20	30
5	Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai, dan togorEWS	Unit	5	5	6	6	6
6	Peningkatan kualitas SDM	orang	115	100	50	50	200
7	Pemetaan demografi, monografi, dan update data base setiap tahun	%	100	100	100	100	100
8	Jumlah tempat perawatan mencucikan jenazah	unit	0	1	0	0	0
9	Tingkat ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100
10	Peningkatan jalan jalur evakuasi	km	2	2	2	2	2
11	Jumlah sarana evakuasi	unit	1	1	1	1	1

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
12	Konservasi lahan, flora, fauna:						
	a. Penyelamatan penyu	unit	1	1	1	1	1
	b. Penanaman sempadan mata air	unit	3	3	3	3	3
	c. Penanaman sempadan sungai	ha	3	3	3	3	3
13	Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun	ha	7	6	5	4	3
14	Reklamasi lahan bekas galian C (mineral dan batu bara)	ha	2	2	2	2	2
15	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	60	70	80	90	100
16	Evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan	dokumen	12	14	17	18	20
17	Informasi status kerusakan lahan	%	30	35	40	45	50
18	Prosentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R	%	25	30	35	40	45
19	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	%	60	65	75	85	100
20	Pencegahan pencemaran air	%	40	60	70	85	100
21	Ruang terbuka hijau (RTH)						
	a. Penanaman turus jalan	km	4	4	4	4	4
	b. Penanaman dan pemeliharaan hutan kota	ha		0,25	0,25	0,25	0,25
	c. Penghijauan lingkungan	btg	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	d. Pembuatan taman hijau di kawasan perkantoran baru	lokasi	1				
	e. Pembuatan pagar perkantoran	lokasi	1				
	f. Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah	%	25	30	35	40	40
21	Konservasi tanah dan air						
	a. Pemb. sumur resapan	unit	10	15	15	20	20
	b. Pemb. Biopori	unit	100	100	100	100	100
	b. Pemb. Embung air	unit	2	2	2	2	2
	c. Pemb. Gully plug	unit	5	5	5	5	5
	d. Rehab teras dan SPA	ha	10	10	10	10	10
22	Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan	kecamatan	17	17	17	17	17
23	Penyusunan data statistik kehutanan	paket	1	1	1	1	1
24	Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan kayu hilir	tahun	1	1	1	1	1
25	Pengendalian bahan baku dan alat mesin industri pengolahan kayu hilir	unit	21	21	21	21	21

INDIKATOR		SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
26	Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan	kecamatan	7	7	7	7	7
27	Pelayanan tata usaha hasil hutan kayu rakyat	tahun	1	1	1	1	1
28	Pengembangan hasil hutan bukan kayu						
	a. Pemanfaatan lahan bawah tegakan (dengan garut)	ha	6	6	6	6	6
	b. Budidaya lebah madu	unit	1	1	1	1	1
29	Rehabilitasi lahan kritis						
	a. Penanaman sempadan pantai (hutan pantai)	ha	3	3	3	3	3
	b. Penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove	ha	1	1	1	1	1
	c. Penanaman dan pengkayaan hutan rakyat	ha	20	20	20	20	20
30	Bimbingan teknis pengendalian hutan	kelompok	13	13	13	13	13

MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PAGU INDIKATIF RPJMD 2011 - 2015

VISI
"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis

MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015					2011	2012	2013	2014	2015			
					4	5	6	7	8					9	10	14	15	16			17
1	Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik	1 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	1 Tingkat pendidikan aparat (D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)	%	55	58	58	58	59	59	1 Peningkatan kinerja & profesionalisme aparatur & lembaga pemerintah	1 Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur	x xx xx 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	38.600	42.460	46.706	51.377	56.514	APDB	Semua SKPD
			2 Pemenuhan kebutuhan pegawai	%	15	15	17	17	20	20		2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan	x xx xx 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.843	17.427	19.170	21.087	23.196	APBD	Semua SKPD
			3 PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :	orang	667	779	795	865	885	3.991	2 Fasilitasi&pelatihan aparatur pemerintahan desa	3 Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian	x xx xx 03	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	597	657	722	795	874	APBD	Semua SKPD
			4 Pelaksanaan sertifikat pendidik	orang	1400	1500	1750	1800	2000	8450		4 Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien	x xx xx 04	4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	81	81	81	81	81	APBD	Semua SKPD
			5 Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan	%	46	50	48	50	64	100% (50 SKPD)	3 Pemberian pelayanan prima bagi kunjungan tamu	5 Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian	x xx xx 05	5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	971	1.068	1.174	1.292	1.421	APBD	Semua SKPD
			6 Peningkatan disiplin kerja	%	100	100	100	100	100	100	4 Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah bersama dinas/instansi terkait secara periodik & berkelanjutan	6 Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien	x xx xx 06	6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	731	804	884	973	1.070	APBD	Semua SKPD
			7 Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	5 Pelaksanaan bimtek implementasi perundang-undangan	7 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah	1 20 xx 34	7 Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.048	1.153	1.268	1.395	1.534	APBD	BKD
			8 Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100		8 Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS	1 20 xx 32	8 Program pendidikan kedinasan	455	676	897	1.118	1.339	APBD	BKD
			9 Peningkatan kapasitas kelembagaan	%	100	100	100	100	100	100		9 Meningkatkan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS	1 01 xx 20	9 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	907	998	1.098	1.208	1.328	APBD	Dikdas,Dikmen
			10 Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	kali	30	30	30	30	30	30		6 Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah	1 20 xx 28	10 Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan	528	581	639	703	773	APBD	BAPPEDA,Pemdes,Org anisasi
			11 Meningkatnya tertib administrasi keuangan	%	80	85	90	95	100	100		7 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah	1 20 xx 15	11 Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	7.738	7.938	8.138	8.338	8.538	APBD	SETWAN, Tapem
			12 Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	desa	75	75	75	75	75	75		8 Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah	1 06 xx 21	12 Program Perencanaan Pembangunan daerah	707	743	780	819	925	APBD	BAPPEDA
			13 Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain	kali	202	212	223	235	247	1119		9 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah	1 20 xx 16	13 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan KDH	693	762	839	923	1.015	APBD	Dishub, Tapem, Umum, Protokol
												14 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 20 xx 33	14 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.261	1.469	1.678	1.888	2.098	APBD	BKD,Bappeda,PU,Pem des,Humas
												8 Penjelasan ttg aturan & pelaksanaannya kpd lurah&pamong desa	1 20 xx 20	15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.993	2.993	3.292	3.622	3.984	APBD	Inspektorat, Tapem, AP
												9 Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tamu, koordinasi dg instansi terkait	1 03 xx 32	16 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	50	60	65	70	75	APBD	Bag. AP
												10 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 22 xx 18	17 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	100	100	100	130	140	APBD	Pemdes
												11 Penyelenggaraan bimtek bagi aparat kecamatan dlm penyusunan buku administrasi kecamatan									
		2 Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi	1 Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan	LHP	218	228	238	238	238	1160	1 Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan	1 Mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi pembangunan daerah	1 20 xx 21	1 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan pembangunan daerah	0	11	23	34	45	APBD	
			2 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD : Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	5	15	25	35	45	45	2 Peningkatan ketersediaan informasi publik	2 Menjalin kerjasama dengan pihak III	1 24 xx 15	2 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.	32	725	1.087	1.630	2.445	APBD	Kantor Arsip
			3 temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	3 Peningkatan sistem distribusi informasi &	3 Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang ke-PR-an	1 24 xx 16	3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	231	346	519	778	1.167	APBD	Kantor Arsip

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
			INDIKATOR											2011	2012	2013	2014	2015		
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	4	4	4	63	94	141	211	316	APBD	Kantor Arsip
			6	SKPD yg telah melaksanakan tata kearsipan	SKPD	56	56	56	56	56		5	5	88	132	198	297	445	APBD	Kantor Arsip
			7	Ketersediaan arsiparis pada SKPD	SKPD	56	56	56	56	56		6	6	181	182	184	186	188	APBD	Bag. Humas
			8	Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD	orang	70	70	70	70	70		7	7	2.129	2.342	2.576	2.834	3.118	APBD	Bag. Humas
			9	Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan	kali	1	2	2	2	2		8	8	52	48	53	58	64	APBD	Bag. Humas
			10	Hasil analisa berita media massa (Fokus media, Kliping berita)	%	100	100	100	100	100		9	9							
			11	Dokumentasi (foto&video) kegiatan pemerintahan&pembangunan Kab. Bantul	%	100	100	100	100	100		10	10							
			12	Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan	%	100	100	100	100	100		11	11							
			13	Liflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi	%	100	100	100	100	100		12	12							
			14	Siaran taman gabusan di TVRI Jogja	%	100	100	100	100	100		13	13							
			15	Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta	%	100	100	100	100	100		14	14							
			16	Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa	%	100	100	100	100	100		15	15							
			17	Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun	kali	24	24	24	24	24		16	16							
			18	Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa	%	100	100	100	100	100		17	17							
			19	Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo	kali	1	1	1	1	1		18	18							
			20	Siaran Gerbang Projotamansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI	%	100	100	100	100	100		19	19							
			21	Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani	%	100	100	100	100	100		20	20							
			22	Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD	%	90	90	95	100	100		21	21							
	3	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1	Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	%	21,15	5,41	5,00	29,17	6,58	1	1	1	3.691	4.060	4.466	4.913	5.404	APBD	SETWAN,DPKAD,Pengelolaan Pasar
			2	Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	%	11,12	11,13	10,97	13,45	13,49		2	2	49	56	63	70	77	APBD	DPKAD
			3	Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD	%	10,71	10,72	10,58	12,96	13,02		3	3	475	633	790	890	990	APBD	DPKAD
			4	Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali	%	1,91	3,92	3,92	3,25	3,21		4	4	194	243	292	341	390	APBD	Pemdes
			5	Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah	buku	3	3	3	3	3		5	5							

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	
			INDIKATOR											2011	2012	2013	2014	2015			
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			6 Jumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 th	buku	6	6	6	6	6	30											
			7 Rasio pertumbuhan belanja modal	%	44,71	1,32	1,37	1,42	1,47												
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan (penyingkatan waktu), prosedur, dan biaya pemberian ijin dan non ijin. (permen 24/2006)	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	1 Peningkatan efisiensi & efektifitas pelayanan	1 Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan	1 20 xx 31 1 20 xx 24	1 Program peningkatan pengelolaan perijinan 2 Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat	433 8	533 9	633 10	733 11	833 12	APBD APBD	Dinas Perijinan
			2 Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu	%	45	55	75	90	100	100% (48 SKPD)			1 20 xx 29	3 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan	83	91	100	110	121	APBD	Bag. Organisasi
			5 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	%	40	74	74	74	74	74% (44 SKPD)			1 06 xx 16 1 10 xx 15	4 Program kerjasama pembangunan 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan	145 2.066	245 2.166	345 2.266	445 2.366	545 2.466	APBD APBD	Bappeda,KPPD Dispendukcapil
			6 Penyusunan indeks pengaduan masyarakat	%	14	20	26	32	38	38% (19 SKPD)			1 20 xx 23	6 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	63	70	76	84	93	APBD	Dinas perijinan
			7 SKPD yang menerapkan SPM	%	100	100	100	100	100	100											
			8 Cakupan penerbitan KTP ber NIK	%	100	100	100	100	100	100											
			9 Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th	%	100	100	100	100	100	100											
		2 Penyingkatan waktu penyelesaian ijin	1 Penyelesaian ijin rata-rata per tahun	ijin	9.215	9.790	10.370	10.945	11.520	51.840											
		3 Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan	1 Penyelesaian pengaduan	pengadu	25	20	16	13	10	tiap tahun semakin menurun											
		4 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1 Keberhasilan pelayanan	nilai angka	75,57	75,6	75,62	75,65	75,67	75,67											
3	Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat	1 Jumlah Raperda yang menjadi Perda	buah	25	25	25	25	25	125	1 Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur	1 Penegakan hukum	1 20 xx 26	1 Program penataan peraturan perundang-undangan	1.642	1.724	1.811	1.901	1.996	APBD	SETWAN,DPKAD,Perijinan,Hukum
			2 Capaian konsistensi peraturan daerah	%	100	100	100	100	100	100		2 Peningkatan kapasitas aparatur badan hukum	1 19 xx 15	2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	19	69	119	169	219	APBD	Satpol PP, Kecamatan
			3 Menurunnya penyakit masyarakat	%	15	15	20	20	25	25	2 Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara	1 19 xx 16	3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	924	974	1.024	1.074	1.124	APBD	Satpol PP	
			4 Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum	kasus	10	10	13	13	13	59			1 20 xx 35	4 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	225	250	300	350	400	APBD	Satpol PP
			6 Menurunnya pelanggaran perda	%	10	10	15	15	15	15											
			7 Penurunan pelanggaran hukum	%	10	10	15	15	15	15											
			8 Capaian penyelesaian hukum	%	100	100	100	100	100	100											
		2 Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM	1 Peningkatan partisipasi pemilu legislatif	%	-	-	-	80	-	80	1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih	1 Meningkatkan sosialisasi kpd masyarakat	1 19 xx 17	1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	130	230	330	430	530	APBD	Kantor Kesbangpolinmas
			2 Peningkatan partisipasi pemilu presiden	%	-	-	-	80	-	80		2 Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat	1 19 xx 21	2 Program Pendidikan Politik Masyarakat	31	46	61	76	91	APBD	Trantib
			3 Peningkatan partisipasi pemilu kada	%	-	-	-	-	80	80			1 19 xx 20	3 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	60	70	80	90	100	APBD	Kantor Kesbangpolinmas
			4 Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah	%	90	90	90	90	90	90			1 19 xx 19	4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	44	74	104	134	164	APBD	Kesbangpolinmas,Pol PP
			5 Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	%	90	90	90	90	90	90			1 20 xx 26	5 Program penataan peraturan perundang-undangan	1.642	1.724	1.811	1.901	1.996	APBD	SETWAN,DPKAD,Perijinan,Hukum
			6 Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam	%	90	90	90	90	90	90											
			7 Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum	orang	200	200	200	200	200	1000											
			8 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara	orang	60	120	120	120	120	540											
			9 Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM	orang	200	200	200	200	200	1000											

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015					2011	2012	2013	2014	2015			
					4	5	6	7	8					9	10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			10 Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	orang	100	100	100	100	100	500											
4	Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah	1 Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda	1 Luas tanah yang dibebaskan	m ²	12.084	24.574	28.137	12.691	9.289	86.775	1 Pelaksanaan pengadaan tanah	1 Kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah secara musyawarah yang didasarkan pada harga NJOP dan harga pasar	1 09 xx 16 1 09 xx 15 1 09 xx 17	1 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan 2 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 3 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.853 1 20	6.790 2 22	11.502 3 24	3.254 4 26	4.494 5 29	APBD APBD APBD	Bag. Tapem Kecamatan Tapem, Kecamatan

NO	TUJUAN	SASARAN								Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PRORAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM			
		URAIAN	INDIKATOR					2011	2012					2013	2014	2015	2011	2012			2013	2014	2015
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			perah dan kambing PE)																				
			33 Populasi sapi potong	ekor	54.281	56.258	56.252	57.265	58.301	58.301													
			34 Populasi sapi perah	ekor	165	190	225	270	300	300													
			35 Populasi kambing	ekor	57.668	61.849	66.333	71.142	76.300	76.300													
			36 Populasi domba	ekor	30.840	33.076	35.474	38.046	40.804	40.804													
			37 Populasi ayam buras	ekor	561.939	561.939	548.215	548.215	558.138	558.138													
			38 Populasi ayam ras petelur	ekor	651.994	704.806	761.895	823.609	890.321	890.321													
			39 Populasi ayam ras pedaging	ekor	724.956	740.905	757.204	773.863	790.888	790.888													
			40 Populasi itik	ekor	184.603	208.990	236.599	267.855	272.703	272.703													
			41 Pengembangan biogas	unit	15	25	35	45	55	55													
			42 Pengembangan rumah kompos	unit	12	20	30	35	40	40													
			43 Pembibitan ayam buras	ekor/DOC	360.000	380.000	400.000	420.000	440.000	440.000													
			44 Pembibitan itik	ekor/DOD	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000													
			45 Pengolahan telur asin	butir	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000	440.000													
			46 Penanganan kasus penyakit ternak	kasus	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500													
			47 Penanganan gangguan reproduksi ternak	ekor	750	1.000	1.250	1.500	1.750	1.750													
			48 Penanganan kasus Brucellosis	kasus	100	100	100	100	100	100													
			49 Penanganan kasus Tuberkulosis	sampel	100	100	100	100	100	100													
			50 Optimalisasi RPH	unit	2	2	2	2	2	2													
			51 Optimalisasi RPU	unit	17	20	20	20	20	20													
			52 Vaksinasi unggas ND	dosis	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	650.000													
			53 Vaksinasi unggas AI	dosis	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	650.000													
			54 Vaksinasi rabies	dosis	500	550	600	650	700	700													
			55 Pengendalian penyakit hewan	kali	15	15	15	15	15	75													
			56 Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post	petugas	375	400	425	450	500	500													
3	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani	1 Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian	1 Konversi lahan	%	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	1,05	1	Pembatasan alih fungsi lahan produktif	1 Meningkatkan pengelolaan lahan marjinal menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian	2 01 xx 18	1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian)	2.976	2.981	2.986	2.991	2.996	APBN,APBD	Dipertahut dan Badan Ketapang	
			2 Luas potensi lahan yang dimanfaatkan	Ha	15.259	15.198	15.137	15.076	15.015	15015			2 Pemberian insentif										
		2 Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh	1 Peningkatan aktifitas kelembagaan petani	kelompok	16	21	26	31	36	37	1	Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani	1 Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran	2 01 xx 19	1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	23	25	28	31	34	APBD	Badan Ketapang	
			2 Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain	orang	145	145	145	145	145	725			2 Optimalisasi fungsi penyuluh	2 05 xx 22	2 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	0	2	3	5	6	APBD	DKP dan Badan Ketapang	
			3 Peningkatan kualitas penyuluh	orang	73	73	73	73	73	74													
			4 Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil	kelompok/ pelaku usaha	500	550	600	650	700	700													
			5 Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan	unit	1	1	1	1	1	1													
			6 Jumlah kelompok penangkar benih padi	kelompok	22	23	24	25	26	26													
			7 Peningkatan kelembagaan kelompok tani	kelompok	725	725	725	725	725	725													
			8 Peningkatan kelembagaan kelompok tani kehutanan	kelompok	203	203	203	203	203	203													
			9 Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)	kelompok	16	16	17	18	18	18													
			10 Jumlah kelompok penangkar benih tanaman perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa)	kelompok	15	18	20	24	27	27													
			11 Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci)	kelompok	356	364	373	391	410	410													
			12 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam	kelompok	292	292	292	292	292	292													
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana	1 Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi	1 Persentase panjang jaringan jalan beraspal	%	90	91	92	93	94	94	1	Peningkatan dan pengembangan sarana	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas	1 03 xx 30	1 Program pembangunan infrastruktur pedesaan	12.278	13.506	14.856	16.342	17.976	APBN,APBD,DAK	Dinas PU	

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PRORAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015					2011	2012	2013	2014	2015			
					4	5	6	7	8					9	10	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
											pemerataan kesejahteraan rakyat										
9	Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1 Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan	1 Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	%	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00	1 Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak	1 Fasilitasi permodalan	1 11 xx 15	1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	150	160	175	200	225	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
			2 Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI)	%	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50		2 Penyelesaian dampak kekerasan	1 11 xx 16	2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	75	110	164	227	290	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
			3 Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan	%	5,00	6,00	6,30	7,00	8,00	8,00		3 Pemberdayaan perempuan	1 11 xx 17	3 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	152	185	219	252	286	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
			4 Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang	%	8,90	10,20	12,00	12,50	13,00	13,00		4 Pemberdayaan gender	1 11 xx 18	4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	138	195	253	310	368	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
												1 11 xx 19	5 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	350	360	375	400	450	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD	
												1 11 xx 20	6 Program pemberdayaan perempuan	350	360	375	400	450	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD	
10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu	1 Meningkatkan partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu	1 Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan	desa	75	75	75	75	75	75	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa	1 22 xx 15	1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	141	155	171	188	207	APBD	Bappeda,PMD
			2 Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	kali	90	90	90	90	90	90			1 22 xx 16	2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	215	283	350	417	485	APBN,APBD	PMD
			3 Jmlh desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD	desa	75	75	75	75	75	75			1 22 xx 17	3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.992	2.191	2.410	2.651	2.916	APBN,APBD, TP	PU,PMD
													1 22 xx 19	4 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	32	39	47	55	62	APBN,APBD	PMD
			2 Meningkatkan kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut								1 Peningkatan penyelesaian masalah sosial	1 Meningkatkan peran serta pemerintah & masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya	1 13 xx 15	1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah	382	420	462	508	559	APBN,APBD	Dinsos
			a. Lansia	orang	190	190	190	190	190	950			1 13 xx 16	2 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan	665	732	805	885	974	APBN,APBD	Bappeda,Dinsos
			b. Penyandang Cacat	orang	428	428	428	428	428	2140			1 13 xx 17	3 Program pembinaan anak terlantar	31	31	31	31	31	APBD	Dinsos
			c. Perlindungan anak	orang	260	260	260	260	260	1300			1 13 xx 20	4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	150	173	195	218	240	APBD,DEKON	Dinsos
			2 Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng	orang	200	200	200	200	200	1000			1 13 xx 18	5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan	20	24	27	31	35	APBD	Dinsos
			3 Peningkatan penyuluhan P4GN	orang	250	250	250	250	250	1250											
			4 Peningkatan program bantuan pendidikan bagi kel. Miskin dan berprestasi	orang	7500	7600	7700	7800	7900	7900											
			5 Peningkatan program bantuan YANKES	jiwa	2500	2500	2500	2500	2500	12500											
			6 Peningkatan program BSK	orang/kelompok	3000	3000	3000	3000	3000	15000											
			7 Peningkatan keterampilan bagi PMKS	orang	25	25	25	25	25	125											
			8 Fasilitasi pembinaan anak yatim	orang	1500	1500	1500	2000	2000	8500											
			3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin								1 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin	1 Pendataan keluarga dan keluarga miskin	1 13 xx 15	1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	382	420	462	508	559	APBN,APBD	Dinsos
			1 Tingkat kemiskinan turun	%	13	12	11	10	9,5	9,5			1 13 xx 21	2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	13	63	113	163	212	APBD	Dinsos
			2 Peningkatan jumlah KUBE	kelompok	100	100	100	100	100	500			1 23 xx 15	3 Program pengembangan data/informasi/ statistik	847	1.108	1.369	1.630	1.891		Pemdes,DPKAD
			3 Membbaiknya indeks gini	%	0,2507	0,2505	0,2458	0,2458	0,2454												
			4 Database keluarga dan keluarga miskin	buku	51	51	51	51	51	51											
			4 Meningkatkan Kualitas keluarga								1 Advokasi KIE	1 Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1 12 xx 15	1 Program keluarga berencana	839	923	1.015	1.117	1.229	APBD (DAK)	BKK PP & KB
			1 Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3	%	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2			1 12 xx 16	2 Program kesehatan reproduksi remaja	8	16	23	31	38	APBD	BKK PP & KB
			2 Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi	%	77,60	77,69	78,30	79,00	79,40	79,40			1 12 xx 17	3 Program pelayanan kontrasepsi	58	73	88	104	119	APBN,APBD	BKK PP & KB
												1 12 xx 18	4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	12	16	20	24	28	APBD	BKK PP & KB	
												1 12 xx 19	5 Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di	19	21	23	25	27	APBD	BKK PP & KB	
												1 12 xx 20	6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan	49	71	93	115	137	APBD	BKK PP & KB	
												1 12 xx 22	7 Program Pengembangan	0	8	15	23	30	APBD	BKK PP & KB	

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PRORAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM			
			INDIKATOR					2011	2012					2013	2014	2015	2011	2012			2013	2014	2015
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
													1 12 xx 23 8	Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	124	182	241	299	357	APBD	BKK PP & KB		
													1 12 xx 24 9	Program Pengembangan Model Operasional BKB-	115	141	168	194	220	APBD	BKK PP & KB		

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PRORAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM		
			URAIAN		INDIKATOR									2011	2012	2013	2014	2015				
			4	5	6	7	8	9	10					14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			perah dan kambing PE)																			
			33 Populasi sapi potong	ekor	54.281	56.258	56.252	57.265	58.301	58.301												
			34 Populasi sapi perah	ekor	165	190	225	270	300	300												
			35 Populasi kambing	ekor	57.668	61.849	66.333	71.142	76.300	76.300												
			36 Populasi domba	ekor	30.840	33.076	35.474	38.046	40.804	40.804												
			37 Populasi ayam buras	ekor	561.939	561.939	548.215	548.215	558.138	558.138												
			38 Populasi ayam ras petelur	ekor	651.994	704.806	761.895	823.609	890.321	890.321												
			39 Populasi ayam ras pedaging	ekor	724.956	740.905	757.204	773.863	790.888	790.888												
			40 Populasi itik	ekor	184.603	208.990	236.599	267.855	272.703	272.703												
			41 Pengembangan biogas	unit	15	25	35	45	55	55												
			42 Pengembangan rumah kompos	unit	12	20	30	35	40	40												
			43 Pembibitan ayam buras	ekor/DOC	360.000	380.000	400.000	420.000	440.000	440.000												
			44 Pembibitan itik	ekor/DOD	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000												
			45 Pengolahan telur asin	butir	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000	440.000												
			46 Penanganan kasus penyakit ternak	kasus	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	7.500												
			47 Penanganan gangguan reproduksi ternak	ekor	750	1.000	1.250	1.500	1.750	1.750												
			48 Penanganan kasus Brucellosis	kasus	100	100	100	100	100	100												
			49 Penanganan kasus Tuberkulosis	sampel	100	100	100	100	100	100												
			50 Optimalisasi RPH	unit	2	2	2	2	2	2												
			51 Optimalisasi RPU	unit	17	20	20	20	20	20												
			52 Vaksinasi unggas ND	dosis	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	650.000												
			53 Vaksinasi unggas AI	dosis	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	650.000												
			54 Vaksinasi rabies	dosis	500	550	600	650	700	700												
			55 Pengendalian penyakit hewan	kali	15	15	15	15	15	75												
			56 Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post	petugas	375	400	425	450	500	500												
3	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani	1 Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian	1 Konversi lahan	%	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	1,05	1	Pembatasan alih fungsi lahan produktif	1 Meningkatkan pengelolaan lahan marginal menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian	2 01 xx 18	1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian)	2.976	2.981	2.986	2.991	2.996	APBN,APBD	Dipertahut dan Badan Ketapang
			2 Luas potensi lahan yang dimanfaatkan	Ha	15.259	15.198	15.137	15.076	15.015	15015			2 Pemberian insentif									
		2 Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh	1 Peningkatan aktifitas kelembagaan petani	kelompok	16	21	26	31	36	37	1	Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani	1 Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran	2 01 xx 19	1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	23	25	28	31	34	APBD	Badan Ketapang
			2 Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain	orang	145	145	145	145	145	725			2 Optimalisasi fungsi penyuluh	2 05 xx 22	2 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	0	2	3	5	6	APBD	DKP dan Badan Ketapang
			3 Peningkatan kualitas penyuluh	orang	73	73	73	73	73	74					3 Program pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan	3.267	3.398	3.536	3.787	3.995	APBN,APBD	Dinas Pertahut
			4 Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil	kelompok/ pelaku usaha	500	550	600	650	700	700												
			5 Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan	unit	1	1	1	1	1	1												
			6 Jumlah kelompok penangkar benih padi	kelompok	22	23	24	25	26	26												
			7 Peningkatan kelembagaan kelompok tani	kelompok	725	725	725	725	725	725												
			8 Peningkatan kelembagaan kelompok tani kehutanan	kelompok	203	203	203	203	203	203												
			9 Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)	kelompok	16	16	17	18	18	18												
			10 Jumlah kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa)	kelompok	15	18	20	24	27	27												
			11 Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci)	kelompok	356	364	373	391	410	410												
			12 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam	kelompok	292	292	292	292	292	292												
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana	1 Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi	1 Persentase panjang jaringan jalan beraspal	%	90	91	92	93	94	94	1	Peningkatan dan pengembangan sarana	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas	1 03 xx 30	1 Program pembangunan infrastruktur pedesaan	12.278	13.506	14.856	16.342	17.976	APBN,APBD, AK	Dinas PU

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PRORAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015					2011	2012	2013	2014	2015			
					4	5	6	7	8					9	10	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
											pemerataan kesejahteraan rakyat										
9	Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1 Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan	1 Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)	%	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00	1 Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak	1 Fasilitasi permodalan	1 11 xx 15	1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	150	160	175	200	225	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
			2 Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI)	%	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50		2 Penyelesaian dampak kekerasan	1 11 xx 16	2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	75	110	164	227	290	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
			3 Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan	%	5,00	6,00	6,30	7,00	8,00	8,00		3 Pemberdayaan perempuan	1 11 xx 17	3 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	152	185	219	252	286	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
			4 Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang	%	8,90	10,20	12,00	12,50	13,00	13,00		4 Pemberdayaan gender	1 11 xx 18	4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	138	195	253	310	368	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD
												1 11 xx 19	5 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	350	360	375	400	450	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD	
												1 11 xx 20	6 Program pemberdayaan perempuan	350	360	375	400	450	APBD	BKK PP & KB, Kantor PMD	
10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu	1 Meningkatkan partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu	1 Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan	desa	75	75	75	75	75	75	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa	1 22 xx 15	1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	141	155	171	188	207	APBD	Bappeda,PMD
			2 Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	kali	90	90	90	90	90	90			1 22 xx 16	2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	215	283	350	417	485	APBN,APBD	PMD
			3 Jmlh desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD	desa	75	75	75	75	75	75			1 22 xx 17	3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.992	2.191	2.410	2.651	2.916	APBN,APBD, TP	PU,PMD
													1 22 xx 19	4 Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	32	39	47	55	62	APBN,APBD	PMD
			2 Meningkatkan kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut								1 Peningkatan penyelesaian masalah sosial	1 Meningkatkan peran serta pemerintah & masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya	1 13 xx 15	1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah	382	420	462	508	559	APBN,APBD	Dinsos
			a. Lansia	orang	190	190	190	190	190	950			1 13 xx 16	2 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan	665	732	805	885	974	APBN,APBD	Bappeda,Dinsos
			b. Penyandang Cacat	orang	428	428	428	428	428	2140			1 13 xx 17	3 Program pembinaan anak terlantar	31	31	31	31	31	APBD	Dinsos
			c. Perlindungan anak	orang	260	260	260	260	260	1300			1 13 xx 20	4 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	150	173	195	218	240	APBD,DEKON	Dinsos
			2 Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng	orang	200	200	200	200	200	1000			1 13 xx 18	5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan	20	24	27	31	35	APBD	Dinsos
			3 Peningkatan penyuluhan P4GN	orang	250	250	250	250	250	1250											
			4 Peningkatan program bantuan pendidikan bagi kel. Miskin dan berprestasi	orang	7500	7600	7700	7800	7900	7900											
			5 Peningkatan program bantuan YANKES	jiwa	2500	2500	2500	2500	2500	12500											
			6 Peningkatan program BSK	orang/kelompok	3000	3000	3000	3000	3000	15000											
			7 Peningkatan keterampilan bagi PMKS	orang	25	25	25	25	25	125											
			8 Fasilitasi pembinaan anak yatim	orang	1500	1500	1500	2000	2000	8500											
			3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin								1 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin	1 Pendataan keluarga dan keluarga miskin	1 13 xx 15	1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	382	420	462	508	559	APBN,APBD	Dinsos
			1 Tingkat kemiskinan turun	%	13	12	11	10	9,5	9,5			1 13 xx 21	2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	13	63	113	163	212	APBD	Dinsos
			2 Peningkatan jumlah KUBE	kelompok	100	100	100	100	100	500			1 23 xx 15	3 Program pengembangan data/informasi/ statistik	847	1.108	1.369	1.630	1.891		Pemdes,DPKAD
			3 Membbaiknya indeks gini	%	0,2507	0,2505	0,2458	0,2458	0,2454												
			4 Database keluarga dan keluarga miskin	buku	51	51	51	51	51	51											
			4 Meningkatkan Kualitas keluarga								1 Advokasi KIE	1 Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1 12 xx 15	1 Program keluarga berencana	839	923	1.015	1.117	1.229	APBD (DAK)	BKK PP & KB
			1 Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3	%	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2			1 12 xx 16	2 Program kesehatan reproduksi remaja	8	16	23	31	38	APBD	BKK PP & KB
			2 Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi	%	77,60	77,69	78,30	79,00	79,40	79,40			1 12 xx 17	3 Program pelayanan kontrasepsi	58	73	88	104	119	APBN,APBD	BKK PP & KB
												1 12 xx 18	4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	12	16	20	24	28	APBD	BKK PP & KB	
												1 12 xx 19	5 Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di	19	21	23	25	27	APBD	BKK PP & KB	
												1 12 xx 20	6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan	49	71	93	115	137	APBD	BKK PP & KB	
												1 12 xx 22	7 Program Pengembangan	0	8	15	23	30	APBD	BKK PP & KB	

NO	TUJUAN	URAIAN	SASARAN							Kumulatif capaian s.d th 2015	STRATEGI	KEBIJAKAN	PRORAM	PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)					SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM			
			INDIKATOR					2011	2012					2013	2014	2015	2011	2012			2013	2014	2015
			URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
													1 12 xx 23 8	Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	124	182	241	299	357	APBD	BKK PP & KB		
													1 12 xx 24 9	Program Pengembangan Model Operasional BKB-	115	141	168	194	220	APBD	BKK PP & KB		

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bantul, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien,efektivitas, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul 2011-2015. RPJM Daerah Kabupaten Bantul 2010-2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga

tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

7.1 Program Transisi

Program transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015, serta mengingat batas waktu bagi Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2015 nantinya, untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah tetap menyusun rancangan RKPD Tahun 2016 sesuai jadwal, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2015.

Selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten Bantul yang terpilih pada tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016-2020. Selain itu, sebelum RPJMD tahun 2016-2020 disusun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul tahun 2016 dapat berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2011-2015 ini.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. Disamping itu, dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang

dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5(lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

RPJM Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan merupakan pedoman dalam menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bantul. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya.

7.2.1. RPJMD Kabupaten Bantul Merupakan Pedoman Bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD

Dalam pelaksanaan urusan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

7.2.2. RPJMD Kabupaten Bantul Digunakan dalam penyusunan RKPD

RPJM Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011- 2015 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul 5(lima) tahun kedepan (2011-2015). RKPD dilaksanakan dalam masa

satu tahun yang berisikan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

7.2.3. Penguatan Peran para Stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJMD

Rancangan awal RPJM Daerah Kabupaten Bantul 2011-2015 telah melibatkan peran serta stakeholder atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Kabupaten Bantul yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan.

7.2.4. Merupakan Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja lima Tahunan dan Tahunan

RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan hasil kinerja kepala Daerah terpilih untuk masa lima tahun dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015.